

# **PAPUA**

## **'Surga' yang Terlantar**

Laporan Hak Asasi Manusia  
SKP Se-Papua 2015-2017

*Undang-undang Republik Indonesia  
Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta*

*Lingkup Hak Cipta  
Pasal 1*

*Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

# PAPUA

## 'Surga' yang Terlantar

Laporan Hak Asasi Manusia  
SKP Se-Papua 2015-2017

Bernard Koten  
Rudolf Kambayong  
Markus Malar, OSA  
Linus Dumatubun, Pr  
Anselmus Amo, MSC



Jayapura:  
SKPKC (Sekretariat Keadilan, Perdamaian, dan Keutuhan  
Ciptaan) Fransiskan Papua

**Papua ‘Surga’ yang Terlantar:  
Laporan Hak Asasi Manusia SKP Se-Papua, 2015-2017**

© SKPKC Fransiskan Papua

**Cetakan Pertama, Agustus 2018**

Tim Penulis  
Bernard Koten  
Rudolf Kambayong  
Markus Malar, OSA  
Linus Dumatubun, Pr  
Anselmus Amo, MSC

Penyunting: Basilius Triharyanto  
Penata Letak: Anastasia Lintang

**Penerbit**

SKPKC Fransiskan Papua  
Jl. Kemiri Kompleks Misi Katolik  
Biara St. Antonius Sentani, Jayapura  
Papua 99352  
[www.fransiskanpapua.org](http://www.fransiskanpapua.org)  
Email: [skpkc2010@gmail.com](mailto:skpkc2010@gmail.com)

KOTEN, Bernard, dkk; Penyunting, Basilius Triharyanto  
Papua Surga yang Terlantar: Laporan Hak Asasi Manusia SKP Se-Papua, 2015-2017  
Jayapura: SKPKC Fransiskan Papua, 2018  
xii + 105 hlm ; 17 cm x 24 cm  
ISBN 9786027446366

## Melambungkan ‘Nyanyian Sunyi’

*Lagu nan sendu dan syair yang menawan  
Mengalun di sana menyayat hatiku*

*Dan ada yang sendu puisi yang menawan  
Terjalin bersama.. oh..Nyanyian Sunyi..*

*Tanah yang permai yang kaya dan melarat  
Terhampar di sana di tubuh mereka*

*Dan bunyi ombaknya dan siul unggasnya  
Melagu bersama oh..Nyanyian Sunyi*

***Surga yang terlantar yang penuh senyuman***

*Laut mutiara yang hitam terpendam  
Dan sungai yang deras mengalirkan emas*

SYAIR LAGU Nyanyian Sunyi karya Arnold Clemens Ap pada 1980-an, mengisahkan Tanah Papua sebagai surga yang terlantar, tetapi masih tampak penuh senyuman.

Arnold AP lahir di Biak pada 1 Juli 1945 dan meninggal pada 26 April 1984. Arnold Ap adalah musisi dan seniman, mendirikan group musik “Mambesak”, yang melahirkan lagu-lagu yang berkisah pahit dan manisnya Tanah dan Orang Papua pada 1970-1980-an. Karya seni dan musiknya menginspirasi banyak orang. Lagunya diperdengarkan di radio-radio lokal dan digandrungi banyak orang Papua.

Munculnya Arnold Ap dan Mambesak ternyata dianggap membahayakan kedudukan Negara Indonesia di Tanah Papua. Dengan segala cara Arnold Ap dilenyapkan dan grup musik Mambesak dibubarkan.

Buku Papua: Surga yang Terlantar: Laporan Hak Asasi Manusia SKP Se-Papua, 2015-2017, dipersembahkan untuk melambungkan ‘Nyanyian Sunyi’, nyanyian yang sendu, yang sering dirasakan dan dialami orang-orang Papua, menjadi ‘puisi’ menawan.

# Daftar Isi

**Kata Pengantar: Mgr. H. Datus Lega, Pr — i**

**Prakata Penulis — iii**

## **BAGIAN I GEREJA KATOLIK DAN HAK ASASI MANUSIA — I**

Bab 1 Gereja Hadir untuk Menyelamatkan — 2

Bab 2 SKP Papua: Representasi Suara Perjuangan Gereja — 4

Bab 3 SKP Se-Papua: Menyuarakan Keadilan dan Perdamaian — 8

## **BAGIAN II SITUASI HAK ASASI MANUSIA DI TANAH PAPUA 2015 – 2017 — 12**

Bab 4 Aparat Keamanan di Balik Kasus Penembakan — 14

Bab 5 Masyarakat: Korban ‘Libido Kuasa Politik’ Elit Papua — 20

Bab 6 Suara Kritis yang ‘Terjahit’ — 23

Bab 7 Perang TPN OPM Vs TNI-Polri — 28

Bab 8 Peran Media dan Liputan Konflik Freeport — 30

Bab 9 Pembangunan Vs Pelanggaran HAM — 35

Bab 10 Darurat Kesehatan — 39

Bab 11 Pendidikan: Persoalan Klasik yang Tak terselesaikan — 57

Bab 12 Hancurnya Bumi, ‘Mama dan Rahim’ Papua — 59

Bab 13 Dunia Memantau Pelanggaran HAM Papua — 70

Bab 14 Dialog dan Upaya Mencari Solusi — 74

## **BAGIAN III REKOMENDASI DAN RESOLUSI — 76**

Bab 15 Penutup — 78

**LAMPIRAN — 85**

# Kata Pengantar

## Suara Uskup Komitmen dan Kepedulian

KARYA KERASULAN khususnya rekan-rekan di Sekretariat Keadilan dan Perdamaian (SKP) masing-masing Keuskupan di Tanah Papua tak pelak lagi berupaya untuk menegakkan keluhuran martabat manusia Papua di tengah keutuhan alam ciptaan. Ini sejalan dengan arus utama dari kerasulan *Justice and Peace* (Keadilan dan Perdamaian) sedunia yang telah memasukan secara integral *The Integrity of Creation* (Keutuhan Alam Ciptaan) dalam pelbagai agenda kegiatan.

Mengantarkan kerasulan khas ini di Tanah Papua sungguh tidak mudah. Apalagi ketika menghidupinya. Rupanya karena banyak pihak yang belum berhasil menghayati kehormatan harga diri manusia Papua, khususnya mereka yang terpinggirkan sekaligus terabaikan. Oleh karena itu dapat dipahami, di tengah kegalauan pencapaian hasil-hasil karya kerasulan di bidang Keadilan dan Perdamaian, rekan-rekan SKP se-Tanah Papua bersama sejumlah jejaring kerjanya menerbitkan buku “Papua ‘Surga’ yang Terlantar: Laporan Hak Asasi Manusia SKP se-Papua, 2015-2017”.

Buku ini sesungguhnya bukan saja berisi laporan demi laporan, baik itu bersifat naratif maupun bercorak investigatif. Lebih dari itu, buku ini bermaksud mengilhami munculnya gerakan-gerakan yang sungguh sinergis demi memainkan karya raksasa: menegakkan keadilan dan perdamaian di Bumi Cenderawasih ini. Buku ini, dengan demikian, bermaksud memotivasi rekan-rekan pegiat penegakan keadilan dan perdamaian yang memang harus diperjuangkan di Tanah Papua.

Barangkali tidak terlalu berlebihan untuk mengatakan bahwa buku ini pun berikhtiar untuk mengantarkan pendekatan: memahami Papua dari kacamata orang Papua dengan karakteristik kepapuannya. Tanpa memahami Papua dari kacamata Papua, nampaknya sulit menerobos jantung-hati Papua. Karena itu, buku ini mudah-mudahan membuka cakrawala pandang kita untuk juga belajar dari khazanah kekayaan Papua. Mengapa? Karena penelantaran tanah Papua sebagai tanah surgawi

niscaya merupakan pelanggaran berat dalam penegakan nilai-nilai keluhuran martabat manusia.

Buku ini pun merupakan hasil kerja sekurangnya tiga tahun dari ketekunan rekan-rekan SKP se-Tanah Papua berkiprah. Di tengah badai dan tantangan yang tidak kecil, dengan dukungan finansial yang terkadang tersendat bahkan tidak pasti, dapat terhimpun aneka laporan di sekitar HAM di Papua tercinta. Sekali lagi buah ketekunan untuk tetap mengadakan rapat secara berkala berganti-gantian setiap tahun di Agats, Jayapura, Merauke, Sorong dan Timika telah memantapkan hati untuk mempublikasikan kumpulan laporan ini dalam bentuk buku.

Sebagai salah seorang uskup di Tanah Papua, ijin kan saya mewakili rekan-rekan uskup lainnya, menghaturkan berlimpah terima kasih atas kerja keras sampai dengan diterbitkannya buku ini. Barangkali tetap merupakan pekerjaan rumah kita bersama bahwasannya bagian-bagian dari buku ini yang masih perlu ditindaklanjuti dalam aksi dan gerakan bersama haruslah terus memanggil komitmen dan kepedulian kita bersama: baik SKP se-Tanah Papua maupun Keuskupan-keuskupan dengan segenap perangkatnya untuk memajukan terus karya kerasulan di bidang keadilan dan perdamaian.

**Sorong, 19 April 2018**

**Mgr. H. Datus Lega, Pr**  
**Uskup Keuskupan Manokwari-Sorong**



# Prakata Penulis

TANAH PAPUA dan persoalannya masih menjadi sebuah topik yang selalu hangat dibicarakan dan didiskusikan. Persoalan di Papua bukan saja menjadi perhatian di tingkat lokal Papua tetapi juga di tingkat nasional dan internasional. Persoalan di Papua bukan juga menjadi kepentingan dan perhatian masyarakat, LSM/NGO, para pegiat kemanusiaan, pemerintah, tetapi juga menjadi kepentingan dan perhatian Gereja.

Persoalan di Papua dalam berbagai aspek kehidupan terus dan selalu menguras energi untuk kita pikirkan dan selesaikan. Sekretariat Keadilan dan Perdamaian (SKP) Se-Papua yang merupakan representasi Gereja Katolik di Tanah Papua terpanggil untuk menyuarakan dan melawan segala situasi ketidakberpihakan, ketidakadilan, kerusakan lingkungan dan sebagainya.

Sekretariat Keadilan dan Perdamaian se-Papua, terdiri dari SKP Keuskupan Manokwari Sorong, SKP Keuskupan Timika, SKP Keuskupan Agats, SKP Keuskupan Agung Merauke, KPKC OSA Christus Totus Papua dan SKPKC Fransiskan Papua.

Pada 25-30 November 2002 silam di Hotel Sentani Indah, Kabupaten Jayapura, SKP Keuskupan Jayapura mengundang semua pemangku kepentingan untuk bersama mendeklarasikan Papua Tanah Damai. Papua sebagai sebuah tempat atau tanah damai, bukan saja menjadi sebuah slogan, tetapi SKP Keuskupan Jayapura menawarkan beberapa hal dan aspek untuk menciptakan kedamaian tersebut. Ada sekitar sembilan unsur yang ditawarkan untuk menciptakan Papua Tanah Damai.<sup>1</sup>

Sesudah deklarasi Papua Tanah Damai, apakah kedamaian telah terwujud? Belum. Untuk mewujudkan tersebut butuh perjuangan dan kerja keras, terutama di kalangan orang-orang asli Papua. Dalam beragam peristiwa kekerasan dan tragedi kemanusiaan, orang-orang asli Papua tetap menjadi korban utama dari peristiwa itu. Dari korban nyawa, harta, dan yang tragis merendahkan kehormatan orang-orang Papua sebagai manusia bermartabat.

---

<sup>1</sup> Kesembilan unsur atau aspek yang ditawarkan untuk menciptakan Papua Tanah Damai adalah harmoni/keutuhan, komunikasi/informasi, rasa aman dan damai, keadilan dan kebenaran, kebersamaan/toleransi menghargai, kemandirian, kesejahteraan, pengakuan dan harga diri, partisipasi. Bandingkan "Membangun Budaya Damai dan Rekonsiliasi: Dasar Menangani Konflik di Papua" oleh Tim SKP Jayapura, 2006.

Situasi demikian menjadi tantangan bagi SKP Se-Papua untuk bekerja keras menciptakan dan mewujudkan Papua menjadi tanah yang damai. Maka, SKP Se-Papua kembali mengajak dan melihat cita-cita yang pernah dideklarasikan pada 2002 silam itu.

Dalam tiga tahun terakhir, 2015 hingga 2017, SKP Se-Papua mencatat beragam persoalan di Tanah Papua. Hal ini menjadi bagian diskusi dan refleksi kritis. Ada persoalan mendasar yang telah berlangsung beberapa dekade, ada juga persoalan terkini yang dipengaruhi situasi sosial dan politik di Papua, Jakarta, dan dunia. Berikut persoalan yang pantas menjadi perhatian serius mengenai Papua:

- Konflik yang berkepanjangan (penangkapan, penyiksaan dan penembakan oleh aparat keamanan).
- Persoalan layanan dasar (pendidikan dan kesehatan) dan menjamurnya HIV AIDS.
- Konflik karena kepentingan politik di dalam Pilkada.
- Kerusakan lingkungan dan kehilangan hak kepemilikan tanah yang disebabkan kehadiran mega proyek investor di Tanah Papua.
- Ruang berpendapat atau berekspresi di muka umum yang ditekan.
- Internasionalisasi persoalan Papua (PBB dan Pasifik).
- Janji-janji manis Negara Indonesia menyelesaikan persoalan hak asasi manusia (HAM) di Tanah Papua.
- Kebijakan Negara yang lebih mengutamakan pembangunan infrastruktur dan,
- Negara yang mengabaikan dan melupakan penyelesaian pelbagai kasus hak asasi manusia.

Kami, SKP Se-Papua meletakkan berbagai persoalan tersebut dalam kajian atau telaah kritis dengan perspektif Gereja Katolik. Kami menggunakan Ajaran Sosial Gereja, ensiklik para Paus, dan peraturan lainnya sebagai pisau analisis untuk mengelaborasi beragam persoalan itu.

Mengutip pernyataan Paus Fransiskus dalam Perayaan Hari Perdamaian Sedunia ke-49 pada 1 Januari 2016, “Ketika kita sehat dan nyaman, kita lupa tentang orang lain (sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Allah Bapa): kita tidak peduli dengan masalah-masalah mereka, penderitaan-penderitaan mereka dan ketidakadilan-ketidakadilan yang mereka pikul... hati kita menjadi dingin”, Gereja Katolik dipanggil untuk membantu segala penderitaan yang dialami oleh sesamanya dan dunia ini.

Di dalam ensikliknya ‘Laudato Si’: Tentang Perawatan Rumah Kita Bersama, yang dikeluarkan di Basilika Santo Petrus Roma, 24 Mei 2015 lalu, Paus Fransiskus mengingatkan umat Katolik di seluruh dunia bahwa “Rasa persatuan mendalam

dengan makhluk lain dan alam tidak mungkin menjadi nyata jika pada saat yang sama hati kita tidak dipenuhi kelembutan hati, kasih sayang dan kepedulian terhadap sesama manusia”.<sup>2</sup>

Buku ini memaparkan situasi hak asasi manusia selama tiga tahun dalam tiga bagian besar. Bagian pertama tentang Sekretariat Keadilan dan Perdamaian (SKP) Se-Papua dan perjuangannya dalam memperjuangkan keadilan di Tanah Papua. SKP sebagai representasi Gereja Katolik mengambil peran penting dalam menyuarakan kemanusiaan dan tragedi konflik kekerasan yang tak kunjung selesai. Gereja Katolik menjadi pijakan dan sebagai perspektif dalam memaknai berbagai situasi hak asasi manusia di Tanah Papua.

Bagian Kedua, memaparkan beberapa peristiwa tentang pelanggaran HAM di Tanah Papua dari tahun 2015-2017. Peristiwa-peristiwa yang diangkat ini berasal dari laporan SKP di masing-masing keuskupan, mitra dan jaringan SKP se-Papua serta rekaman beberapa media baik cetak maupun internet.

Kemudian di bagian akhir, bagian ketiga, menyajikan kesimpulan, rekomendasi, dan solusi. Dari analisis data-data dan berbagai peristiwa yang dihimpun oleh Tim SKP Se-Papua, Tim Penulis memberikan catatan kritis dan refleksi mendalam untuk membantu para pembaca dalam melihat dan memaknai situasi yang terjadi di Tanah Papua. Selain itu, para pembaca dan publik mengerti bagaimana Gereja Katolik di Tanah Papua menyikapi berbagai persoalan tersebut.

Semoga buku ini membantu para pembaca melihat sisi lain dan cara pandang berbeda dalam memaknai nilai-nilai keadilan, kedamaian, dan keutuhan di Tanah Papua.

Selamat membaca!

Jayapura, Juni 2018.

**Rudolf Kambayong**  
Koordinator SKP Se-Papua

---

2 Paus Fransiskus, *Ensiklik Laudato Si: Tentang Perawatan Rumah Kita Bersama* (Jakarta: Penerbit Obor), hal. 68, yang diterjemhakan oleh Martin Harun, OFM. Ensiklik ini dipublikasikan pada 18 Juni 2015 di Vatikan, Roma.



Biarawan-biarawati menuntut pengungkapan kasus penembakan anak-anak di Paniai



**Bagian I**  
**Gereja Katolik**  
**dan Hak Asasi**  
**Manusia**

## **Bab 1**

# **Gereja Hadir untuk Menyelamatkan**

---

KETIKA PAPUA berintegrasi ke dalam NKRI tahun 1969, semenjak itulah pelanggaran HAM terjadi. Bahkan menurut data yang ada sebelum berintegrasi sudah terjadi pelanggaran HAM yang mengkondisikan masyarakat Papua dalam bentuk teror dan intimidasi untuk menyetujui PEPERA. Kejadian itu terungkap ketika sebuah dokumen tentang pelanggaran HAM di Papua tahun 1965-1969 ditampilkan di National Security Archive (NSA) pada 17 Oktober 2017. Dokumen ini menjelaskan sekitar 53 orang meninggal di Bukit Arfay Manokwari. Orang-orang yang meninggal ini adalah korban tindakan kekerasan dari Alat Negara (TNI). Menurut Direktur Eksekutif LP3BH Cristian Warinussy, pelanggaran tersebut sampai saat ini belum diselesaikan oleh Pemerintahan Indonesia.<sup>1</sup>

Tak henti-hentinya masyarakat Papua dihantui oleh perasaan tidak nyaman melihat realitas yang selama ini dialami oleh sesama saudara mereka. Pelanggaran HAM yang terjadi di Papua menyentuh banyak aspek kehidupan dan sudah menghilangkan ratusan bahkan ribuan korban jiwa. Proses untuk menyelesaikannya hanya sebatas wacana dan kemudian hilang begitu saja.

Banyak oknum TNI/POLRI dengan alasan perintah untuk mengamankan kedaulatan NKRI telah mengambil tindakan-tindakan tidak manusiawi untuk meredam aksi kemanusiaan masyarakat Papua yang meminta keadilan bagi hidup dan tanahnya. Belum lagi ada aksi-aksi sekelompok korporasi yang dengan nafsu rakusnya ingin menguasai seluruh kekayaan alam Papua. Masyarakat Papua ditelanjangi dan dijadikan miskin serta mati di atas tanahnya sendiri. Pertanyaannya, sampai kapankah orang Papua harus diperlakukan seperti ini? Bukankah mereka juga manusia sama dengan manusia-manusia lainnya yang mendiami muka bumi ini, yang memiliki derajat, harkat dan martabat yang sama? Derita orang Papua adalah pukulan telak bagi matinya demokrasi di Indonesia. Papua tetap menjadi surga yang terlantar.

---

<sup>1</sup> Bdk. <https://suarawiyaimana.blogspot.co.id/2018/01/lp3bh-arsip-rahasia-as-bukti-baru.html>

Sejalan dengan pelanggaran HAM yang sudah, sedang dan mungkin akan terjadi, Gereja juga hadir, ada dan hidup di Tanah Papua. Kehadiran Gereja di Papua hanya dengan satu tujuan dan misi yakni menyelamatkan. Hadirnya Gereja tidak sebatas pada membaptis dan menjadikan bangsa Papua orang kristiani, tetapi menjaga dan merawat sehingga kawanan domba ini memiliki hidup yang manusiawi, sederajat dengan bangsa-bangsa lain di muka bumi.

Dalam Kehadirannya, Gereja Katolik kemudian berpapasan dengan realitas masyarakat Papua yang begitu menderita. Berbagai pelanggaran HAM ini akhirnya mendapat perhatian dari Gereja Katolik. Berbagai cara telah ditempuh Gereja Katolik untuk menyuarakan kenyataan pahit dan yang menyedihkan tersebut. Gereja Katolik tak henti-hentinya bersuara dengan satu tujuan Masyarakat Papua mesti mendapat perlakuan yang manusiawi di atas tanahnya sendiri.

Tentu saja, kita boleh bangga bahwa Gereja Katolik turut terlibat dalam berbagai masalah kemanusiaan di Papua, tetapi kita juga patut mengakui bahwa di beberapa tempat di Papua, Gereja Katolik terasa jauh dan berdiam diri melihat penderitaan masyarakat Papua. Harus diakui bahwa beberapa elemen masyarakat Papua mulai meragukan kehadiran Gereja Katolik dan keterlibatannya dalam masalah-masalah sosial dan pelanggaran HAM yang terjadi akhir-akhir ini.

Bertolak dari realitas ini, baiklah Gereja Katolik kembali melihat komitmen pelayanan dan panggilan sucinya. Kritik Paus Fransiskus terhadap cara berpastoral Gereja Katolik kiranya dijadikan oleh Gereja Katolik untuk berbenah. Beliau katakan bahwa dia lebih senang melihat Gereja yang terluka, Gereja yang kotor karena bersinggungan dengan kehidupan masyarakat kecil dari pada Gereja yang hanya sibuk dengan dirinya sendiri.<sup>2</sup>

---

2 Bdk. Evangelii Gaudium No. 49, Seruan Apostolik dari Paus Fransiskus pada 24 November 2013, lihat <http://jpicofmindonesia.com/2017/01/jpic-dan-gereja-masa-kini/>

## Bab 2

# SKP Papua: Representasi Suara Perjuangan Gereja

---

KONSILI VATICAN II yang dilaksanakan pada 11 Oktober 1962 dan 8 Desember 1965 merupakan sebuah pedoman baru bagi perjalanan Gereja Katolik di seluruh dunia. Di dalam Konsili Vatikan II tersebut, Gereja mulai berbenah diri, melihat diri dan berorientasi keluar, hidup bersama dengan yang lainnya.

Hal ini jelas terungkap di dalam dokumen *Gaudium et Spes* (Kegembiraan dan Harapan). Di bagian pendahuluan dari dokumen tersebut terungkap jelas “*KEGEMBIRAAN DAN HARAPAN, duka dan kecemasan orang-orang zaman sekarang, terutama kaum miskin dan siapa saja yang menderita, merupakan kegembiraan dan harapan, duka dan kecemasan para murid Kristus juga. Tiada sesuatu pun yang sungguh manusiawi, yang tak bergema di hati mereka. Sebab persekutuan mereka terdiri dari orang-orang, yang dipersatukan dalam Kristus, dibimbing oleh Roh Kudus dalam peziarahan mereka menuju Kerajaan Bapa, dan telah menerima warta keselamatan untuk disampaikan kepada semua orang. Maka persekutuan mereka itu mengalami dirinya sungguh erat berhubungan dengan umat manusia serta sejarahnya*”.<sup>3</sup> Di bagian lainnya seperti pada artikel ke-42, 43 dan 90, secara baik dianjurkan agar Gereja Katolik terlibat di dalam persoalan kemanusiaan di dunia ini.

Anjuran ini diteruskan oleh Paus Paulus VI yang mendirikan sebuah Komisi Kepausan “*Justitia et Pax*” lewat sebuah *motu proprio* (sebuah dokumen yang dikeluarkan oleh Paus) pada tanggal 6 Januari 1967. Dua bulan kemudian, dalam Ensikliknya *Populorum Progressio*, Paus Paulus VI No. 5 secara jelas Paus Paulus VI menyebutkan untuk membentuk sebuah panitia yang namanya adalah Panitia Keadilan dan Perdamaian. Setelah melalui periode uji-coba selama sepuluh tahun, Paus Paulus VI memberikan komisi ini status resmi melalui moto *Proprio Iustitiam et Pacem* pada tanggal 10 Desember 1976. Ketika Konstitusi Apostolik Pastor Bonus tanggal 28 Juni 1988 menata ulang Kuria Romawi, Paus Yohanes Paulus II mengubah namanya dari Komisi menjadi Dewan Kepausan, dan menegaskan kembali garis-garis besar kerjanya.

---

3 *Gaudium et Spes*, artikel 1



Selanjutnya, beberapa Dokumen Gereja Katolik lainnya seperti Rerum Novarum<sup>4</sup> (Hal-hal Baru), Sinode Para Uskup di tahun 1971, Evangelii Nuntiadi (Evangelisasi di dunia modern),<sup>5</sup> Redemptor Humanis,<sup>6</sup> memberikan penjelasan dan pemahaman kepada kita akan pentingnya usaha Gereja Katolik mewujudkan nilai-nilai keadilan dan perdamaian serta hak asasi manusia. Nilai-nilai luhur tersebut memang harus diperjuangkan oleh Gereja yang hidup di dunia. Perjuangan tersebut bukan saja untuk umatnya tetapi juga untuk semua orang agar semua seorang menjadi semartabat.

Seiring berjalannya waktu dan semakin menjamurnya permasalahan sosial kemanusiaan atau persoalan HAM (Sipol dan Ekosob) di Tanah Papua, maka 1 Juli 1998, Keuskupan Jayapura membentuk dan mendirikan Sekretariat Keadilan dan Perdamaian (SKP) Keuskupan Jayapura.<sup>7</sup> Setahun kemudian, di Keuskupan Agung Merauke (KAME), tahun 1999, Sekretariat Keadilan dan Perdamaian (SKP) terbentuk. Kehadiran SKP KAME sangat membantu menyuarakan hak-hak masyarakat adat di wilayah Selatan Papua. Selang dua tahun berikutnya, pada tahun 2004, Keuskupan Agats mendirikan sekretariat yang sama. Di daerah 'kepala burung' Keuskupan Manokwari Sorong, SKP-nya baru didirikan pada tahun 2004. Pendirian badan ini juga meneruskan apa yang sudah diwariskan dan diperjuangkan oleh para Paus pasca Konsili Vatikan II. Pendirian kesekretariatan ini bukan di Tanah Papua tetapi hampir di semua keuskupan di seluruh dunia.

Dengan demikian, kehadiran SKP di setiap keuskupan di Tanah Papua untuk berjuang dan berjalan bersama para korban, masyarakat yang tersingkir, masyarakat yang diintimidasi, diteror. Kehadiran SKP membantu kerja-kerja pastoral, untuk memeluk 'para penderita' agar mendapatkan hak dan diakui sebagai manusia bermartabat yang hidup di atas tanahnya sendiri.

---

4 Ensiklik Rerum Novarum adalah ensiklik pertama Ajaran Sosial Gereja yang dikeluarkan oleh Paus Leo XIII pada 15 Mei 1891. Ensiklik ini menaruh perhatian pada kondisi keadilan bagi martabat manusia, khususnya para kaum buruh pada saat itu.

5 Ensiklik Evangelii Nuntiadi merupakan nasehat apostolik yang diterbitkan pada 8 Desember 1975 oleh Paus Paulus VI. Ensiklik ini memberikan tekanan agar Gereja dalam pewartaannya dapat menyentuh manusia pada abad kedua puluh.

6 Ensiklik Redemptor Humanis merupakan ensiklik pertama yang ditulis oleh Paus Yohanes Paulus II. Ensiklik ini diumumkan secara resmi pada 4 Maret 1979. Ensiklik ini menawarkan solusi dari masalah-masalah yang bisa ditemukan melalui pengertian yang lebih sempurna akan seseorang.

7 Status formalnya SKP Keuskupan Jayapura berubah pada tahun 2010 sewaktu SKP mulai berfungsi dibawah naungan satu institusi saja, yakni Kustodi Fransiskan Duta Damai Papua. Nama diubah menjadi SKPKC Fransiskan Papua yang sekarang berkantor di Sentani, Kabupaten Jayapura.

## SKP Se-Papua dan Ajaran Sosial Gereja

Mengutip Ajaran Sosial Gereja sejak Paus Leo XIII dengan *Rerum Novarum* hingga Paus Fransiskus dengan *Laudato SI*, Gereja menaruh perhatian mendalam terhadap masalah kemanusiaan yang akhir-akhir ini ditegaskan secara luas dengan alam semesta sebagai kesatuan utuh ciptaan. Sudah sejak awal kehadirannya, Gereja Katolik sudah bersinggungan langsung dengan masalah-masalah kemanusiaan dan sejarah mencatat bahwa di era Paus Leo XIII, Gereja Katolik secara jelas menegaskan keberpihakan pada masalah-masalah kemanusiaan. Paus Yohanes Paulus XXIII di dalam Ensiklik *Pacem in Terris*<sup>8</sup> pada bagian tentang ‘Hak-hak Manusia’, Paus Yohanes mengajak semua orang, khususnya umatnya di Gereja Katolik untuk saling menghargai dan menghormati sesama lainnya. Setiap manusia memiliki hak untuk hidup, hak untuk mendapatkan pelayanan sosial yang baik, hak untuk bebas menentukan pilihannya, dan lain sebagainya.

“Akan tetapi yang pertama-tama perlu dibahas ialah hak-hak manusia. Ia berhak untuk hidup. Ia berhak atas keutuhan badannya dan atas upaya-upaya yang diperlukan untuk pengembangan hidup yang sewajarnya, khususnya makanan, pakaian, tempat berteduh, perawatan kesehatan, istirahat dan akhirnya pelayanan-pelayanan sosial yang dibutuhkan.”<sup>9</sup>

Keberpihakan Gereja bukan tanpa sebab. Keterlibatan Gereja terhadap persoalan HAM karena manusia adalah dan sebagai citra Allah yang mesti mendapat tempat istimewa dalam seluruh tata ciptaan. Manusia adalah rekan sekerja Allah. Keistimewaan inilah yang membuat manusia mesti diperlakukan sebagai subjek, bukan sebagai objek. Oleh karenanya segala macam bentuk eksploitasi terhadap manusia mesti mendapat perhatian serius Gereja. Gereja tidak boleh menutup mata terhadap berbagai penderitaan yang ‘mengebiri’ martabat manusia. Kehadiran Gereja Katolik untuk memperjuangkan terciptanya keadilan, perdamaian dan keharmonisan di atas muka bumi. Di dalam *Ensiklik Populorum Progressio*,<sup>10</sup> Paus Paulus VI mengajak Gereja untuk melihat perkembangan yang terjadi. Paus mengingatkan bahwa pembangunan itu bukan saja pembangunan ekonomi tetapi harus menyeluruh. Pembangunan itu harus memupuk perkembangan tiap manusia dan manusia seutuhnya.

“Perkembangan yang dibicarakan di sini tidak dapat dibatasi pada pertumbuhan ekonomi melulu. Supaya otentik, perkembangan harus menyeluruh; harus memupuk

8 Ensiklik *Pacem in Terris* merupakan ensiklik yang dikeluarkan oleh Paus Yohanes Paulus XXIII yang diterbitkan di Basilika St. Petrus, Roma, pada hari Kamis Putih, 11 April 1963 di tahun kelima masa kepausannya.

9 Salah satu bunyi Ensiklik *Pacem in Terris* di dalam artikelnya yang ke-11

10 *Ensiklik Populorum Progressio* (Perkembangan Bangsa-Bangsa) merupakan Ensiklik yang dikeluarkan oleh Paus Paulus VI, di Basilika St. Petrus, Roma, pada Hari Raya Kebangkitan, 26 Maret 1967.

perkembangan tiap manusia dan manusia seutuhnya. Yang bagi kita penting ialah manusia-tiap manusia perorangan, tiap kelompok manusiawi, dan umat manusia secara keseluruhan.”<sup>11</sup>

Dalam salah satu dokumen Konsili Vatikan II, *Gaudium Et Spes* menyatakan bahwa “KEGEMBIRAAN DAN HARAPAN”, duka dan kecemasan orang-orang zaman sekarang, terutama kaum miskin dan siapa saja yang menderita, merupakan kegembiraan dan harapan, duka dan kecemasan para murid Kristus juga. Pernyataan Gereja ini menegaskan posisi dan tugas Gereja yang sesungguhnya ketika berhadapan dengan masalah-masalah kemanusiaan. Artinya, suka dan duka, penderitaan umat manusia yang mengancam identitas kemanusiaannya harus menjadi tanggungjawab Gereja. Dengan lain kata, sukacita umat manusia adalah sukacita Gereja dan penderitaan umat manusia adalah penderitaan Gereja bukan sebaliknya. Gereja tidak punya pilihan lain dan tidak diminta untuk memilih karena pilihan itu sudah jelas. Ketika Gereja tidak memilih dan bungkam sudah sepatutnya dievaluasi.

Di dokumen *Populorum Progressio* dari Paus Paulus VI menyinggung pentingnya perhatian yang serius terhadap perkembangan bangsa-bangsa lain yang masih berada dalam taraf kemiskinan, yang masih terbelakang. Bangsa-bangsa ini harus dibantu untuk bertumbuh dan berkembang bukan semakin dimiskinkan dan dieksploitasi hidupnya dan kekayaan alam yang dimiliki. Gereja Katolik harus menjadi garda depan pembelaan Hak Asasi Manusia apa pun resikonya.

---

<sup>11</sup> Salah satu bunyi Ensiklik *Populorum Progressio* di dalam artikelnya yang ke-14

## **Bab 3**

# **SKP Se-Papua: Menyuarakan Keadilan dan Perdamaian**

---

SESUAI AJARAN Sosial Gereja, setiap SKP di lima keuskupan Tanah Papua terus bergerak, terlibat dan menyuarakan persoalan masyarakat Papua pada umumnya dan khususnya orang asli Papua. Keterlibatan masing-masing SKP berdasarkan kebutuhan dan tuntutan kondisi masyarakat basis di setiap keuskupannya.

Pada tahun 2015, misalnya, bersama dengan jaringan di Kota Jayapura, Sekretariat Keadilan, Perdamaian dan Keutuhan Ciptaan Fransiskan Papua mendorong pengungkapan kasus penembakan 8 Desember 2014 di Enarotali, Paniai. Walaupun hingga saat ini janji manis dari pemangku kebijakan belum terealisasi.<sup>12</sup> Di tahun yang sama, tahun 2015 dan awal tahun 2016 (Januari – April 2016), bersama masyarakat adat Suku Yerisiam Gua dan koalisi melakukan advokasi di Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura terkait hak ulayat yang dirampas oleh PT Nabire Baru. Walaupun masyarakat harus kalah.

Penolakan akan derasnya investasi sawit di Tanah Papua terus dilakukan. Sekretariat Keadilan dan Perdamaian (SKP) Keuskupan Timika bersama Uskup Keuskupan Timika, Mgr. John Philip Saklil, Pr bersuara untuk menghentikan izin dari perusahaan sawit PT Palm Indonesia di sepanjang hulu Sungai Kamoro, Timika. Teguran ini diberikan kepada Gubernur Papua untuk mencabut izin PT Palm yang membuka dan memabat hutan berskala besar sejak tahun 2008. Surat teguran ini diterbitkan pada 17 Desember 2014 dan diteruskan ke Gubernur Papua saat itu.

Di Kabupaten Merauke, SKP KAME bersama masyarakat adat di tiga kabupaten (Mapi, Merauke dan Boven Digoel) terus meneriakan sikap arogan dan monopoli dari berbagai perusahaan. Selain melawan derasnya arus investasi, SKP KAME juga terus memberdayakan masyarakat di beberapa kampung untuk peningkatan kehidupan ekonomi. Masyarakat didampingi untuk bisa berdagang dan berbisnis agar mampu

---

<sup>12</sup> Bdk. Laporan SKPKC FP tentang Advokasi Kasus Paniai yang tidak dipublikasikan.

bersaing terhadap derasnya penguasaan orang luar.

Di wilayah pelayanan Keuskupan Agats, SKP Keuskupan Agats terus melakukan pemetaan wilayah adat dan persoalan sosial masyarakat Asmat. Berangkat dari persoalan kejadian luar biasa (KLB) Asmat, SKP Keuskupan Agats sudah melakukan pendataan dan segala informasi sudah diberitahukan kepada SKPD Pemda Kabupaten Asmat untuk ditindaklanjuti. Selain itu, SKP Keuskupan Agats juga melakukan pelayanan bagi penderita kusta di Kampung Sa, Erma dan Mumugu, Distrik Sawa-Erma sejak tahun 2011-2015. Di sana, SKP Keuskupan Agats melakukan pemetaan persoalan dan membantu menyuarkan persoalan itu ke Pemda Kabupaten Asmat. Selain itu mendampingi masyarakat dalam pembuatan regulasi kampung dan mendampingi korban kekerasan. Selain di Kampung Sa, Erma dan Mumugu, SKP Agats juga melayani di beberapa kampung yang lainnya seperti Kampung Karbis, Burbis, Medah, Binam, Busiri, Keta, Sambrueq dan Senggo.

Kehadiran Gereja Katolik dalam menyuarkan suara kenabian bukan pertama-tama berkaitan dengan dunia dan situasi yang terjadi melainkan manusia sebagai pelaku dan korban dari peristiwa yang ada. Dengan kata lain, keterlibatan Gereja Katolik karena manusia hadir dalam kejadian atau peristiwa yang ada. Keteraturan yang diharapkan kini semakin jauh. Banyak peristiwa pelanggaran kemanusiaan terjadi dimana-mana, termasuk di Tanah Papua.

Dalam kerangka teologis, seluruh tatanan kosmos dan manusia sebagai pelaku utama karya Allah mesti mendapat perlakuan yang sama. Manusia dalam bentuk totalitas kehadirannya mesti mendapat perlakuan manusiawi dalam seluruh eksistensinya. Sebagai makhluk yang diciptakan secitra dengan Allah, derajat semua manusia sama entah status sosialnya seperti apa. Oleh karenanya, dalam kesetaraan itu, Tuhan Allah menghendaki terciptanya keharmonisan hidup yang tercermin dalam nilai-nilai kehidupan, yaitu penghormatan dan penghargaan antar sesama manusia dan tentu juga dalam kebersamaan dengan alam ciptaan.

Sebagai konsep membangun keberlangsungan hidup antar manusia dan kosmos, perlulah kita mencermati sembilan unsur berikut ini. Pertama, **partisipasi**.<sup>13</sup> Partisipasi berarti terbuka untuk bekerja sama dengan pihak lain. Wujud partisipasi yang dilakukan adalah mengungkapkan pandangan dan pikiran-pikiran seperti melalui demonstrasi, tulisan, membuat laporan berdasarkan fakta serta bukti yang jelas. Partisipasi dapat disalurkan melalui peran, kedudukan dan keahlian masing-masing. Kedua, **kebersamaan dan toleransi menghargai**.<sup>14</sup> Kebersamaan tidak sama dengan keseragaman atau kesamarataan, melainkan dalam kebersamaan ada

<sup>13</sup> Tim SKP Jayapura, "Membangun Budaya Damai dan Rekonsiliasi: Dasar Menangani Konflik di Papua": Sekretariat Keadilan dan Perdamaian Keuskupan Jayapura, 2006. Hal. 27

<sup>14</sup> Ibid., Tim SKP Jayapura, hal. 29

perbedaan yang perlu dipandang sebagai kekayaan dan kekuatan. Sedangkan toleransi tetap membutuhkan sikap kritis yakni mampu menerima tawaran baru, mengakui atau menghargai perbedaan tanpa meninggalkan tatanan nilai setiap komunitas yang telah dianut secara turun temurun.

Unsur ketiga, **komunikasi atau informasi**.<sup>15</sup> Konfirmasi informasi adalah salah satu kunci dalam segala seluk-beluk partisipasi dalam dunia dewasa ini. Informasi yang salah dapat menyesatkan orang dan sebaliknya, informasi yang benar dapat membantu seseorang untuk menempatkan diri dan sesamanya secara benar. Keempat, **kesejahteraan**.<sup>16</sup> Kesejahteraan diartikan sebagai segala kebutuhan primer setiap orang terpenuhi secara wajar sebagai manusia. Kebutuhan ini tidak hanya dimiliki oleh sekelompok orang saja. Tanpa ada pemerataan kebutuhan primer sulit untuk mengatakan bahwa ada perdamaian di Tanah Papua.

Unsur kelima adalah **rasa aman dan nyaman**.<sup>17</sup> Kebutuhan rasa aman dan nyaman mendorong setiap orang memperjuangkannya. Unsur rasa aman sangat menentukan dinamika pada aspek-aspek hidup yang lain. Rasa aman memungkinkan masyarakat dapat berpikir dengan tenang, berkreasi dan berupaya membangun masyarakat dan Tanah Papua dengan baik. Sudah bertahun-tahun lamanya hak masyarakat Papua untuk merasa aman kurang diperhatikan. Keenam, **rasa keadilan dan kebenaran**.<sup>18</sup> Kedua unsur ini merupakan nilai sentral yang selalu menyentuh berbagai aspek dalam praktek hidup kita. Berbagai langkah strategis praktis yang diefektifkan untuk mewujudkan keadilan dan kebenaran seperti advokasi, penelitian, pengungkapan fakta, mediasi dan negosiasi. Satu hal yang membayangi kehidupan bermasyarakat di Papua adalah pelurusan sejarah. Pelurusan sejarah Papua adalah salah satu tuntutan masyarakat yang dapat dicatat dalam rangka perwujudan keadilan dan kebenaran.

Unsur ketujuh, **kemandirian**.<sup>19</sup> Masyarakat Papua menghendaki untuk mengatur diri sendiri tanpa mau menguntungkan diri pada orang lain. Itu berarti masyarakat di Tanah Papua harus berinisiatif mengambil peran dengan memanfaatkan segala sumber daya (alam dan manusia) secara optimal. Fenomena mental proyek sesungguhnya bertolak belakang dengan aspek kemandirian. Mental proyek menunjukkan ketergantungan masyarakat terhadap bantuan orang lain. Selama mental ini masih terus dipelihara masyarakat akan tetap menunggu pihak lain sebagai penyambung hidupnya.

---

15 Ibid., Tim SKP Jayapura, hal. 30

16 Ibid., Tim SKP Jayapura, hal. 32

17 Ibid., Tim SKP Jayapura, hal. 34

18 Ibid., Tim SKP Jayapura, hal. 36

19 Ibid., Tim SKP Jayapura, hal. 38

Lalu unsur kedelapan adalah **harga diri dan pengakuan**.<sup>20</sup> Terkait dengan unsur ini jelas bahwa harga diri banyak orang asli Papua ditekan. Dalam sejarah penderitaan Bangsa Papua, harga diri dan pengakuan terhadap dirinya banyak berkaitan dengan perlakuan dan penilaian orang lain. Sikap saling mengakui eksistensi setiap pribadi merupakan usaha menjadikan Papua sebagai tanah damai. Mengangkat harga diri dapat juga dilakukan dengan menciptakan kegiatan sesuai potensi-potensi yang dimiliki oleh masyarakat di Papua.

Unsur yang terakhir, kesembilan, **keutuhan atau harmoni**.<sup>21</sup> Manusia merupakan salah satu dari seluruh kesatuan alam semesta. Manusia merupakan bagian kecil yang di dalamnya. Manusia sangat tergantung dengan alam bukan sebaliknya. Gaya hidup yang cenderung konsumtif telah mengancam keselamatan manusia sendiri dan tempat di mana manusia itu berlindung.

Sebagai satu kesatuan ciptaan, manusia sangat tergantung pada alam semesta. Beberapa kejadian sudah tampak bagi manusia, ketika alam semesta dirusak maka bencana kapan saja terjadi dan akhirnya manusia menjadi susah dan mengalami banyak kerugian bahkan sampai kehilangan nyawa. Bercermin dari beberapa kejadian bencana yang menimpa manusia, Gereja Katolik terus menyuarakan pentingnya merawat bumi sebagai tempat tinggal bersama. Paus Fransiskus dalam Ensiklik *Laudato Si* memperingatkan dunia akan bahaya ketamakan yang telah mengorbankan lingkungan dan alam semesta yang bila tidak dikontrol dengan baik maka sudah pasti berdampak tidak baik bagi hidup manusia. Bila manusia merawat alam semesta dengan baik dan benar, tentu hidupnya juga akan aman.

---

20 Ibid., Tim SKP Jayapura, hal. 39

21 Ibid., Tim SKP Jayapura, hal. 41





Kasus Pilkada Intan Jaya





**Bagian II**

**Situasi**

**Hak Asasi Manusia**

**di Tanah Papua**

**2015 - 2017**

## Bab 4

# Aparat Keamanan di Balik Kasus Penembakan

---

*Apapun alasannya, menyerang warga sipil dengan menggunakan alat negara sudah tentu merupakan pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia (HAM). Tanpa diberi kewenangan oleh negara atau pun jika negara tidak dalam keadaan darurat, maka seorang anggota TNI/POLRI TIDAK BERHAK menggunakan peralatan perang yang dipercayakan oleh negara untuk menyerang warga masyarakat sipil. Penyalahgunaan kewenangan ini mesti dipandang sebagai pengkhianatan terhadap negara.<sup>22</sup>*

BEBERAPA TAHUN terakhir ini, dari tahun 2015 hingga 2017, pelbagai kasus yang terjadi di Tanah Papua sebagian besar terkait dengan aparat keamanan Negara. Penangkapan, penyiksaan dan penghilangan nyawa (penembakan) masyarakat sipil terus dilakukan oleh aparat keamanan.

Jelang akhir 2014, tepatnya pada 8 Desember 2014<sup>23</sup> di Lapangan Enarotali, Kabupaten Paniai, aparat keamanan melakukan penembakan kepada masyarakat sipil, yang mengorbankan empat orang muda meninggal dunia. Kasusnya menguap tanpa proses pengadilan yang fair, karena pelakunya dituntut meminta maaf, tanpa hukuman penjara dan sanksi berat.

Kasus penembakan warga sipil oleh aparat keamanan kembali terjadi di wilayah yang bersebelahan dengan Kabupaten Paniai, yaitu Kabupaten Intan Jaya. Di sebuah kampung bernama Bilogai, pada 17 Juli 2015 aparat keamanan menembak seorang warga sipil. Saat bersamaan pada 17 Juli 2015, penembakan warga sipil oleh aparat keamanan terjadi di Kabupaten Tolikara, karena dipicu kericuhan yang menyebabkan terbakarnya toko-toko dan api menjalar hingga sebuah musala ikut terbakar.

---

22 Bdk. Uskup Keuskupan Timika, Mgr. Jhon Philip Saklil, Pr: Surat Pernyataan Sikap Gereja Katolik Keuskupan Timika terkait penembakan di Kampung Oneibo, Deiyai. Lihat juga di <http://fransiskanpapua.org/2017/08/05/pernyataan-uskup-timika-mgr-jhon-philip-saklil-pr-penembakan-di-deiyai/>

23 Bdk. Laporan Sekretariat Keadilan dan Perdamaian Keuskupan Timika tentang Penembakan di Enarotali 2014

Kejadian Tolikara ini mengalirkan simpati dari berbagai kalangan. Pemerintah daerah dan pusat terlihat sibuk membahas dan mengurus musala yang terbakar. Namun pemerintah tidak terlalu sibuk dan mengabaikan dengan warganya yang tertembak. Kemudian pada 28 Agustus 2015, empat orang TNI dari kesatuan Kodim 1710 ‘mengadili’ enam warga sipil yang sedang berdoa dan bersyukur di sebuah rumah (bekas Gedung Gereja Katolik St. Fransiskus Assisi) Koperapoka, Kabupaten Mimika.<sup>24</sup> Akibatnya, dua orang Imanuel Mairimau dan Yulianus Okoware terpaksa menemui ajalnya. Di akhir tahun 2015, pada 1 Desember, di Kampung Wadapi dan Wanampompi, Distrik Angkaisera Kabupaten Kepulauan Yapen, masyarakat yang sedang berunding dengan aparat keamanan justru diserang dan ditembaki oleh aparat gabungan dari Polri dan TNI. Erik Manitori, Kakaknya Yonas Manitori, Darius Anderebi dan Yulianus Robaha terkena tembakan dan meninggal dunia.<sup>25</sup>

Kegemaran menembaki warga yang diperagakan oleh Alat Negara tidak berakhir. Selain kegemaran menembaki orang, Alat Negara seringkali melakukan penyiksaan terhadap warga sipil. Pada 7 Maret 2016, di Jogatapa, Kabupaten Intan Jaya, tiga pemuda (Willem Duwitau, Jhon Sondegau dan Martinus Sondegau) mendapat penganiayaan dari Brimob Detasemen C. Ketiga pemuda dianiaya karena menegur Alat Negara yang sedang mabuk dan berkendara tanpa menghidupkan lampu kendaraan.<sup>26</sup> Di Kabupaten Mappi, seorang warga Titus Sagaimu tertembak sampai meninggal dunia. Pimpinan Polres Mappi AKBP Djafar Sidik mengatakan bahwa alasan penembakan karena korban dalam keadaan mabuk sedang berusaha melawan aparat.<sup>27</sup> Masih di wilayah Selatan Papua, di Kampung Wanam Wogikel, Distrik Ilwayab, Kabupaten Merauke, pada 14 September 2016, sekitar pukul 19.00 WIT, Tubuh Melky Balagaize tertembak timah panas milik anggota Polisi Air Briptu Diram, yang dalam keadaan mabuk melepaskan tembakan ke Melky. Ia berhasil melarikan diri namun dikejar lagi oleh teman Diram, Yayan. Yayan memukul Melki yang sudah terluka dengan popor senjata miliknya.<sup>28</sup>

Suara kritis dari masyarakat Papua harus berhadapan dengan Alat Negara. Semuanya berujung pada penangkapan, penyiksaan dan bahkan harus ditembak. Pada 2 Mei 2016, di Tanah Papua terjadi penangkapan besar-besaran massa yang melakukan aksi damai. SKPKC Fransiskan Papua mengumpulkan data sekitar 1.700 orang ditangkap. Di Kota Jayapura ada empat orang mendapatkan perlakuan

24 Bdk. Laporan Sekretariat Keadilan dan Perdamaian Keuskupan Timika tentang Penembakan Warga Sipil di Koperapoka, Mimika, Agustus 2015.

25 Bdk. Laporan Sekretariat Keadilan dan Perdamaian Keuskupan Timika tentang Penembakan di Kampung Wanampompi, Desember 2015.

26 Bdk. Laporan SKP Keuskupan Timika, 2016 yang tidak dipublikasikan

27 Bdk. Koran Jubi

28 Bdk. Laporan Sekretariat Keadilan dan Perdamaian (SKP) Keuskupan Agung Merauke yang tidak dipublikasikan

tidak baik dari Alat Negara. Mereka ditarik ke mobil Dalmat, lalu dipukuli. Beberapa massa aksi yang ditahan harus merelakan kulit tubuhnya terbakar oleh panasnya sinar matahari dan pantulan panas dari dinding seng di Markas Brimob Kotaraja.<sup>29</sup> Pada saat bersamaan di Kabupaten Timika, Ketua KNPB wilayah Timika Steven Itlay dan beberapa temannya ditangkap dan diperlakukan tidak manusiawi. Ketika ditangkap dan tanpa perlawanan, Steven Itlay dicekik dan dimasukkan ke dalam penjara. Steven Itlay harus berjuang melawan pengap dan sempitnya udara di ruang tahanan. Perlakuan ini menyebabkan Steven Itlay menderita sakit sesak napas.<sup>30</sup>

Di Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat, Senin, 2 Mei 2016, Alat Negara melakukan tindakan yang tidak terpuji. Alat Negara dari Polres Fakfak setelah berhasil menahan massa aksi, anggota Polres Fakfak menyiksa massa aksi di Markas Polres Fakfak. Selain menyiksa massa (usia anak-anak), Alat Negara mengajak massa untuk menonton film porno dari salah satu HP milik anggota Polres. Setelah itu salah satu anggotanya melakukan tindakan asusila terhadap beberapa massa. Korban (DH, TM, HH dan WH) mengalami trauma setelah kejadian tersebut.<sup>31</sup>

Kembali lagi ke wilayah selatan Papua, tepatnya 1 Desember 2016, di Kali Mak, Kabupaten Boven Digoel, sekitar pukul 15.00 waktu setempat, Oktovianus Guam (IG)<sup>32</sup> ditembak oleh aparat kepolisian. Menurut penjelasan Kevin Guam Amute (Kakak Kandung Korban), oktovianus ditembak tetapi pihak kepolisian tidak memberitahukan kepada keluarga. Keluarga baru mendapatkan informasi pada pukul 21.00 WIT. Korban ditembak tanpa ada alasan jelas. Pelaku menembaki Oktovianus ketika dia mandi di Kali Mak, Boven Digoel.

Di awal tahun 2017, tepatnya 11 Januari 2017, seorang petani di Kampung Beraf, Kabupaten Jayapura, Bapak David Tarkouw ditembak oleh Alat Negara (aparat Polres Jayapura). Menurut pengakuan Bapak David, dia sudah meminta untuk menyerah tetapi aparat kepolisian tetap menyeret dan menembaknya.<sup>33</sup> Masih pada bulan yang sama, tepatnya 24 Januari 2017, Alat Negara menggelar sebuah aksi 'Sweeping Mantap Praja' di Kabupaten Dogiyai. Akibat sweeping ini puluhan masyarakat harus mengalami penyiksaan. Bahkan ada beberapa masyarakat yang meninggal dunia dan mengalami luka ringan dan berat. Di dalam laporannya Benediktus Goo menjelaskan beberapa peristiwa terkait sweeping tersebut. Seorang warga yang bermarga Pekey yang dalam

29 Bdk. Laporan Sekretariat Keadilan Perdamaian dan Keutuhan Ciptaan Fransiskan Papua (SKPKC FP) yang tidak dipublikasikan

30 Aventinus Jenaru, OFM, dkk, "Papua Di Ambang Kehancuran: Beragam Peristiwa dan Fakta Hak Asasi Manusia di Papua 2016, hal. 37

31 Bdk. Laporan Elsham Papua yang tidak dipublikasikan

32 Bdk. <https://suarapapua.com/2016/12/27/kata-keluarga-korban-polisi-indonesia-tembak-mati-oktovianus-guam-boven/>

33 Bdk. Laporan LBH Papua yang tidak dipublikasikan

perjalanan ke Nabire, Selasa (10 Januari 2017) ditahan oleh aparat gabungan. Pekey kemudian dipukul sampai babak belur dan dibawa ke Mapolsek Moenamani. Pada pukul 16.00 WIT, Pekey menghembuskan nafasnya ketika tiba di rumahnya. Aksi ini dikecam oleh pihak Gereja dan masyarakat Dogiyai. Selain sweeping alat tajam, aparat keamanan juga mengambil uang yang dibawa oleh masyarakat.<sup>34</sup>

Di Kabupaten Kepulauan Yapen, seorang tokoh yang dianggap sebagai tokoh Papua Merdeka Michael Merani ditembak dan disiksa di dalam perjalanan ke Mapolres Yapen pada 27 Maret 2017. Michael diduga meninggal ketika dalam perjalanan atau sewaktu ditahan di Mapolres Yapen.<sup>35</sup> Sebelum penembakan di Kampung Oneibo, Deiyai, Alat Negara melakukan penikaman terhadap dua warga sipil di Kampung Uwabutu. Yus Degei (32 thn) dan Piet Degei (27 thn) hendak membeli sabun rinso di sebuah Kios, namun keduanya dituduh mencuri sabun rinso. Pemilik kios memberitahukan dugaan tersebut ke anggota Timsus 753, yang kemudian anggota timsus. Alat Negara ini langsung menuju ke Yus dan Piet tanpa bertanya tetapi langsung menikam keduanya. Yus dan Piet akhirnya mendapat perawatan di RSUD Madi.<sup>36</sup>

Pada 1 Agustus 2017, di Kampung Oneibo, Distrik Tigi, Kabupaten Deiyai, beberapa warga sipil menerima timah panas atau tembakan dari anggota Brimob. Akibatnya seorang warga sipil Yulianus Pigai (27 thn) meninggal dunia. Sedangkan kesebelas teman yang lainnya mengalami luka tembak serius dan dirawat di rumah sakit.<sup>37</sup> Aksi ini mendapat kecaman dari pihak Gereja, pemerintah, legislatif dan para pegiat kemanusiaan serta mahasiswa yang tergabung dalam solidaritas untuk korban Deiyai. Uskup Keuskupan Timika Mgr. John Philip Saklil, Pr di dalam surat pernyataan mengecam dan mengutuk semua bentuk tindak kekerasan terhadap kemanusiaan yang menggunakan alat negara untuk menghilangkan nyawa warga masyarakat sipil.<sup>38</sup>

Penembakan di Kampung Oneibo membangkitkan rasa solidaritas warga baik itu di Papua maupun di luar Papua. Banyak pihak mendesak agar pelakunya dihukum seberat-beratnya karena telah menghilangkan nyawa manusia yang lainnya. Para pelaku penembakan akhirnya dijatuhi hukuman permintaan maaf dan pemindahan tugas setelah menjalani proses persidangan kode etik kemiliteran di Polda Papua.

34 Sweeping ini dilakukan dari September 2016 dan diteruskan pada Januari 2017. Bdk. <http://suarapapua.com/2017/01/25/sweeping-tanpa-arrah-jelang-pilkada-dogiyai/>, <https://www.tabloidjubi.com/artikel-2965-sweeping-aparat-gabungan-mulai-meresahkan-masyarakat-dogiyai-akan-datangi-dprd.html>

35 Bdk. Laporan SKP Keuskupan Timika tentang Penyiksaan Warga Sipil di Kepulauan Yapen, 2017 yang tidak dipublikasikan.

36 Bdk. <http://suarapapua.com/2017/05/04/penikaman-dua-warga-di-paniai-dap-tarik-pasukan-tak-jelas/>

37 Ibid.

38 Bdk. Uskup Keuskupan Timika, Mgr. Jhon Philip Saklil, Pr: Surat Pernyataan Sikap Gereja Katolik Keuskupan Timika terkait penembakan di Kampung Oneibo, Deiyai. Lihat juga: <http://fransiskanpapua.org/2017/08/05/ Pernyataan-uskup-timika-mgr-jhon-philip-saklil-pr-penembakan-di-deiyai/>



Air mata belum mengering, satu minggu kemudian, alat negara dari anggota TNI kembali berulah di Pelabuhan Paomako, Kabupaten Timika pada 9 Agustus 2017. Tiga orang warga sipil terkena tembakan dari anggota aparat tersebut, yaitu Theo Camtar dan dua temannya. Theo Camtar tewas di tempat kejadian.<sup>39</sup>

Di Kabupaten Nduga, tepatnya di Distrik Mugi, pada 15 Desember 2017, aparat keamanan melakukan penyisiran dan penembakan terhadap warga sipil.<sup>40</sup> Berdasarkan laporan dari Koalisi Untuk Keadilan Hukum dan HAM Pegunungan Tengah penyisiran ini dilakukan karena terjadi penyerangan dan penembakan terhadap aparat pada 12 Desember 2017. Penyerangan ini menyebabkan seorang operator alat berat Yovicko Sondak tertembak dan meninggal serta seorang anggota TNI Prada Didimus Abindodifu luka-luka. Walaupun demikian penyisiran oleh aparat TNI ini dinilai terlalu berlebihan. Akibatnya lima warga sipil ditembak, empat orang dianiaya dan dua rumah milik warga dibakar dalam penyisiran tersebut.

### Alat Negara 'Gemas' dengan Generasi Muda Papua

Sejak penembakan anak muda Papua di Lapangan Karel Gobay, Enarotali, Kabupaten Paniai (8 Desember 2014), Alat Negara masih 'gemas' dengan generasi muda Papua. Di Kabupaten Dogiyai, pada 26 Juni 2015, di Ugapuga, Alat Negara (TNI) kembali beraksi di malam hari. Aksi ini menewaskan seorang pemuda. Di Kabupaten Mimika, pada 28 September 2015, Alat Negara (Aparat Kepolisian) kembali menembaki dua warga sipil, siswa SMK. Kaleb Bagau (18 tahun) meninggal dunia dan temannya Efrando Sabarofek (17 tahun) berjuang untuk melewati masa kritisnya.<sup>41</sup>

Pada 27 Mei 2016, Alat Negara (Polres Nabire) mengejar Owen Pekey (17 tahun). Owen akhirnya meninggal di dalam pengejaran tersebut. Dari pihak kepolisian memberikan keterangan lain, Kapolres Nabire mengungkapkan bahwa kematian Owen Pekey adalah kecelakaan lalu lintas tunggal.<sup>42</sup> Pada 27 Agustus 2016, Alat Negara begitu 'gemas' dengan anak-anak sekolah, seperti Otinus Sondegau, 16 tahun, seorang pelajar SMP. Ia ditembak oleh anggota Brimob. Hidup Otinus berakhir di depan rumahnya di Kampung Zogasiga, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya.<sup>43</sup> Sebelum penembakan yang dialami oleh Otinus, Brimob sudah melakukan percobaan penembakan terhadap dua anak Malon (Nolo) Sondegau dan Nope Sani, pada 25

39 Laporan SKP Keuskupan Timika, 2017., *Op.cit.* Lihat juga: <http://fransiskanpapua.org/2017/08/15/laporan-penembakan-3-warga-sipil-di-paomako-mimika/>

40 Bdk. Laporan Koalisi Untuk Keadilan Hukum dan HAM Pegunungan Tengah, <http://fransiskanpapua.org/wp-content/uploads/2017/12/Pers-Rilis-penyisiran-nduga.pdf>

41 *Ibid.*

42 Aventinus Jenaru, OFM, dkk, *Op.cit.*, hal. 58

43 *Ibid.*, hal. 59

Agustus 2016. Kedua anak tersebut berhasil meloloskan diri dari tembakan itu.<sup>44</sup>

Di akhir tahun 2017, tepatnya pada Perayaan Natal 25 Desember 2017, seorang pelajar Nikolaus Bernolpus (19) ditembak hingga meninggal dunia oleh aparat kepolisian Polres Mappi Briпка DE.<sup>45</sup> Menurut Direktur SKP Keuskupan Agung Merauke Pater Anselmus Amo, MSC, Briпка DE itu harus dihukum seberat-beratnya karena sudah 'bermain hakim sendiri'. Walaupun demikian, peristiwa ini masih menjadi pertanyaan dan harus dialami terkait apakah benar warga yang melakukan penyerangan yang berakibat pada penembakan tersebut. Sedangkan menurut Kapolres Mappi AKBP Wartono, penembakan itu terjadi karena ada perkelahian. Aparat kepolisian tidak menerima teguran dari korban sehingga pelaku melakukan penembakan.



Aksi demonstrasi damai menolak sweeping yang dilakukan oleh aparat keamanan terhadap masyarakat di Dogiyai. Foto: Arsip SKPKC Fransiskan Papua

44 Bdk. Laporan Elsham Papua yang tidak dipublikasikan dan Aventinus Jenaru, OFM, dkk, Op.cit., hal. 56. Kedua anak ini (Malon dan Nope) menjual kayu bakar ke kepada PT Tigi Jaya, perusahaan yang mengerjakan proyek pengaspalan jalan Trans Papua. Karena ditolak maka ada adu mulut antara keduanya dengan karyawan perusahaan. Perusahaan menelpon aparat keamanan Brimob untuk datang ke tempat kejadian. Tiba di tempat kejadian, Brimob langsung menembaki kedua anak tersebut. Untungnya kedua berhasil meloloskan diri dari tembakan tersebut.

45 Bdk. <http://tabloidjubi.com/m/artikel-12669-keuskupan-agung-merauke-pelaku-penembakan-remaja-di-mappi-harus-diperiksa-kejiwaannya.html> dan <http://www.liputan24.com/2017/12/keuskupan-agung-merauke-pelaku.html>

## **Bab 5**

# **Masyarakat: Korban 'Libido Kuasa Politik' Elit Papua**

---

MASYARAKAT KECIL tetap menjadi korban dari pelbagai konflik yang terjadi di Tanah Papua. Masyarakat sepertinya menjadi terbiasa dan tidak tahu ketika mereka dijadikan tumbal. Pengetahuan yang mungkin terbatas, pengaruh janji-janji manis dan tidak mau mengalah, masyarakat akhirnya sangat rentan dan mudah diadudomba oleh anak tanah Papua sendiri. Hal ini terlihat ketika terjadi pesta demokrasi atau Pemilihan Kepala Daerah di Tanah Papua. Pada tiga tahun terakhir, daerah yang heboh diberitakan adalah Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Nduga, Kabupaten Intan Jaya dan Kabupaten Maybrat.

Pelaksanaan Pilkada dilakukan di tujuh provinsi, 76 kabupaten dan 18 kota di Indonesia. Di Tanah Papua, untuk Provinsi Papua dilaksanakan di 11 daerah yakni: Kabupaten Puncak Jaya, Lanny Jaya, Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Sarmi, Mappi, Tolikara, Kepulauan Yapen, Dogiyai, Nduga dan Kabupaten Intan Jaya. Sedangkan di Provinsi Papua Barat: Pilkada Gubernur Papua Barat, Kabupaten Tambrau, Maybrat, Kabupaten dan Kota Sorong.

Di daerah-daerah Provinsi Papua, pihak Polda Papua telah memetakan tujuh daerah rawan konflik Pilkada. Di hadapan para tokoh masyarakat di Jayapura, Selasa 4 Oktober 2016, pihak Polda Papua melalui pimpinannya Kapolda Papua Irjen Pol. Paulus Waterpau menjelaskan situasi yang akan terjadi.

“Kerawanan Pilkada 2017 tak dapat disamakan dengan pilkada serentak pada 2015. Rawan konflik kali ini lebih tinggi. Salah satunya di Kabupaten Tolikara yang ada dugaan dendam lama kepada pasangan calon. Tak hanya itu, Pilkada mendatang juga dapat dimanfaatkan oleh sekelompok orang untuk menjatuhkan pasangan lainnya”.<sup>46</sup>

Pernyataan Kapolda Irjen Pol. Paulus tersebut tentu ada benarnya mengingat setiap konflik yang terjadi pra, sedang dan pasca Pilkada di Provinsi Papua.

---

46 Bdk.<http://pilkada.liputan6.com/read/2618255/7-kabupaten-di-papua-rawan-gangguan-separatis-saat-pilkada-2017>



Konflik Pilkada Intan Jaya mulai pecah pada 23-24 Februari pasca pleno hasil pemungutan suara. Massa antara pendukung – yang adalah masyarakat kecil – saling bentrok untuk mendukung kandidatnya masing-masing. Konflik berakibat pada jatuhnya korban. Selain fasilitas umum terbakar, Kolenga Wenda (45) dan beberapa temannya menjadi tumbal. Di beberapa media menyebutkan jumlah korban manusia yang berbeda-beda. Di media Metro Merauke menyebutkan bukan Kolenga Wenda yang meninggal tetapi ada empat masyarakat yang lainnya.<sup>47</sup> Ada yang menyebutkan sekitar 59 orang mengalami luka akibat terkena alat-alat tajam (panah dan tebasan parang) serta luka karena terbakar.<sup>48</sup> Konflik berlanjut pada Agustus pasca pembacaan keputusan oleh Mahkamah Konstitusi terkait pemenang Pilkada Intan Jaya, 30 Agustus 2017. Masyarakat pendukung salah satu kandidat yang tidak puas membakar sejumlah fasilitas pendukung kinerja Pemkab Intan Jaya, seperti Kantor Dinas Kesehatan, Kantor Keuangan dan Kantor Kesbangpol Intan Jaya. Bupati Natalis Tabuni menjelaskan ke beberapa media bahwa pelayanan publik ke masyarakat tidak berjalan. Para pegawai pemerintahan memilih untuk mengungsi ke luar Intan Jaya.<sup>49</sup> Dari pihak Polda Papua akhirnya mengerahkan pasukannya untuk mengamankan situasi tersebut. Sebanyak 100 personil Brimob dari Detasemen A Polda Sulawesi Selatan didatangkan ke Intan Jaya.

Konflik Pilkada Intan Jaya juga terjadi di Kabupaten Maybrat. Masyarakat yang semulanya adalah keluarga hancur karena terhasut oleh ‘libido’ kuasa dari para kontestan Pilkada Maybrat. Para kontestan adalah anak suku atau ‘anak tanah’ Maybrat saling berebut kuasa, menjadi seorang *Big Man* di tanahnya. ‘Libido’ anak tanah ini mengorbankan sesamanya. Sebelum pelaksanaan Pilkada serentak di Maybrat, Kapolda Papua Barat Brigjen Pol. Royke Lumowa, pada 2 Oktober 2016, memprediksi bahwa Maybrat merupakan salah satu daerah rawan konflik dalam Pilkada.

“Dari 13 kabupaten/kota Papua Barat, Kabupaten Manokwari dinilai sebagai daerah yang paling rentan terjadi konflik. Beberapa daerah lain di antaranya, Kota Sorong, Kabupaten Maybrat dan Tambrau.”<sup>50</sup>

Menurut pengakuan salah satu tokoh masyarakat Maybrat Bapak Samuel Jitmau, pelaksanaan Pilkada di Maybrat ini sangat kacau. Bahkan rumahnya menjadi amukan dari massa pendukung salah satu kandidat. Selain itu kunjungan para petinggi militer dan kepolisian juga berkunjung ke Maybrat untuk melihat secara langsung proses Pilkada tersebut. Hasilnya, pleno yang ditetapkan oleh KPUD tidak diterima

47 Bdk. <https://metromerauke.com/2017/02/25/bentrok-pilkada-di-intan-jaya-papua-korban-tewas-bertambah/>

48 Bdk. <https://kabarpapua.co/61-orang-korban-konflik-pilkada-intan-jaya-masih-dirawat/>

49 Ibid., <https://kabarpapua.co/61-orang-korban-konflik-pilkada-intan-jaya-masih-dirawat/>

50 Bdk. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20161002202821-12-162753/polda-papua-barat-siapkan-5000-personel-jelang-pilkada-2017/>

oleh kandidat dan massa pendukungnya. Proses pleno ini terpaksa dijaga ketat oleh beberapa kesatuan militer dengan bersenjata lengkap. Aparat gabungan dari TNI Angkatan Darat, Polri dan Marinir menjaga keamanan di sekitar Kantor KPUD Maybrat dan beberapa titik rawan di Kota Ayamaru.<sup>51</sup> Menurut Kapolda Papua Barat Brigjen Pol. Martuani Sormin, pada 24 Februari 2017, pengamanan pleno pemungutan suara Pilkada Maybrat melibatkan 890 personil TNI-Polri. Kecurangan pemungutan suara yang terjadi di 24 distrik menyebabkan Pleno KPUD Maybrat dalam suasana panas.

Konflik karena kepentingan elit politik di dua kabupaten ini menunjukkan kepada kita semua bagaimana pesta demokrasi itu berjalan. Pesta ini bisa kita katakan pesta 'konflik' dan 'egoisme' para elit di Tanah Papua. Mereka lebih senang memuaskan 'libido kuasa politiknya', mengorbankan warganya ketimbang memperhatikan masyarakatnya. Apakah mungkin kepuasan seorang kontestan politik terletak pada jatuhnya korban?

---

51 Bdk. <https://daerah.sindonews.com/read/1182904/174/pleno-kpu-maybrat-dijaga-ketat-pasukan-bersenjata-laras-panjang-1487909179>

## Bab 6

# Suara Kritis yang 'Terjahit'

---

*Kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum masih menjadi sebuah diskusi serius di Tanah Papua dalam kurun waktu 17 tahun ini. Suara kritis untuk sebuah kebenaran terus ditekan di Tanah Papua. Bukan saja suaranya, tetapi para 'pemilik suara kritis' tersebut pun menjadi korban 'amukan negara'.*

PADA 2015, begitu terasa bagaimana negara memperlakukan warganya. Di Kabupaten Merauke, pertemuan yang diadakan oleh Komite Nasional Papua Barat (KNPB) cabang Merauke, Sabtu 16 Mei 2015, dibubarkan oleh pihak Polres Merauke. Dua anggota KNPB ditahan di Mapolres Merauke. Di Universitas Papua (UNIPA) Manokwari sebanyak 70 anggota KNPB yang melakukan aksinya dibubarkan oleh aparat kepolisian dan Brimob. Mereka akhirnya ditahan di Mako Brimob Manokwari pada 20 Mei 2015.<sup>52</sup>

Pada 17 dan 18 Agustus 2015, aksi massa yang tergabung dalam kelompok Mahasiswa Intan Jaya Peduli Pembangunan Intan Jaya dibubarkan oleh aparat kepolisian dan Brimob. Aksi ini menarik karena bukan saja pihak keamanan tetapi Bupati Intan Jaya sendiri turut serta membubarkan aksi ini. Dari Laporan Melianus Duwitau kepada SKPKC Fransiskan Papua, Bupati Intan Jaya Natalius Tabuni bersama dengan anggota Brimob Intan Jaya membubarkan aksi tersebut. Bupati Natalius sempat memukul seorang anggota massa aksi. Padahal aksi ini menyuarakan macetnya layanan publik oleh pemerintah di Intan Jaya. Massa aksi memutuskan untuk melakukan aksi bertepatan hari Kemerdekaan RI pada 17 Agustus 2015 karena dalam kesempatan itu banyak pegawai negeri yang hadir untuk mengikuti upacara 17 Agustus.

"Kami sengaja melakukan aksi pada waktu itu (17 Agustus) karena banyak dari pegawai negeri, kepala SKPD hadir. Selama ini mereka tidak berada di Intan Jaya. Kebanyakan dari mereka tinggal di luar Intan Jaya seperti Nabire dan Timika. Kami tahu mereka hadir pada saat itu supaya dilihat oleh masyarakat bahwa mereka ada.

---

52 Tim SKPKC Fransiskan Papua, "Memoria Passionis Papua: Potret Hak Asasi Manusia Selama 2015", hal. 213

Kami palang mereka di jalan supaya mereka tidak usah pulang. Karena setelah upacara itu mereka kabur dari tempat tugasnya di Intan Jaya.”<sup>53</sup>

Pada 8 Oktober 2015, massa aksi yang tergabung dalam Solidaritas Korban Pelanggaran HAM Papua harus berhadapan dengan aparat keamanan. Satuan polisi gabungan dari Polresta Jayapura dan Polsek Abepura melakukan tindakan tidak terpuji. Pembubaran massa aksi dengan menabrak kelompok orang yang sedang berorasi menyuarakan pengungkapan dan penyelesaian kasus penembakan 8 Desember 2014 di Enarotali, Kabupaten Paniai. Saat itu massa berhasil menghindari mobil polisi yang menerabas kelompok demonstran. Dalam peristiwa ini, sebanyak 18 orang ditahan dan digiring ke Mapolsek Abepura<sup>54</sup>. Karena tindakan yang tidak terpuji ini, melalui Koordinator SKP HAM Papua Penias Lokbere dalam jumpa pers di Kantor KontraS Papua, 9 Oktober 2015, menjelaskan bahwa aksi SKP HAM Papua adalah aksi damai dan sudah memberikan surat pemberitahuan kepada pihak kepolisian.

“Perilaku pembubaran paksa aksi damai kemarin oleh aparat kepolisian merupakan perilaku keji yang menodai nilai kemanusiaan dan membuat orang tidak lagi berani menyampaikan pendapat yang benar dan kritis di muka umum meskipun dijamin oleh undang-undang.”<sup>55</sup>

Berbicara terkait ruang kebebasan di Tanah Papua, Presiden RI Joko Widodo dalam kunjungannya ke Tanah Papua pada Mei 2015, pernah mengatakan bahwa akan memberikan dan membuka akses bagi jurnalis asing ke Papua. Walaupun demikian, kenyataannya di luar dari harapan itu. Bukan saja wartawan asing tetapi wartawan lokal dan masyarakat yang kritis mendapat intimidasi dari Negara. Pada 11 November 2015, sekelompok masyarakat melakukan ziarah dan berdoa di Makam Theys Elluay untuk mengenang jasa Theys Elluay didatangi oleh aparat keamanan dan melarang kegiatan tersebut.

Pada 2016, semakin deras dan kuat tekanan terhadap suara kritis dari masyarakat, yang menyoroti ketidakadilan dan pengungkapan kebenaran. Pada 18 Maret 2016, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Cenderawasih (Uncen) Jayapura melakukan aksi demo untuk menolak kedatangan Menkopolkum Luhut Binsar Pandjaitan. <sup>56</sup> Mereka menolak karena pernyataan<sup>57</sup> seorang pejabat publik dan Negara yang tidak

53 Ungkapan yang disampaikan oleh Koordinator Aksi Melianus Dowitouw dalam laporannya ke SKPKC Fransiskan Papua. Lihat juga, <http://fransiskanpapua.org/2017/05/15/ruang-demokrasi-semakin-tertekan/>.

54 Laporan SKPKC Fransiskan Papua yang tidak dipublikasikan, Oktober 2015. Dari 18 orang tersebut, 6 diantaranya adalah anggota religius/biarawan dari Ordo St. Agustinus (OSA) dan Ordo Fratrum Minorum (OFM).

55 Salah satu pernyataan sikap yang disampaikan oleh SKP HAM Papua dalam konferensi pers, 9 Oktober 2015.

56 Bdk. Kumpulan Kronik dari SKPKC Fransiskan Papua tahun 2016 tentang Kebebasan Berekspresi yang tidak dipublikasikan.

57 Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan RI Luhut Binsar Pandjaitan mengeluarkan pernyataan pada 19 Februari 2016, “Ya pergi saja mereka ke MSG sana, jangan tinggal di Indonesia”.

beraturan. Bagaimana mungkin mengusir orang Papua dari tanahnya?

Cerita kemurkaan Negara terhadap suara kritis di Tanah Papua masih terus berlanjut. Di Kabupaten Mimika, doa dan orasi di halaman Gereja Jemaat Golgota Kampung Bhintuka, Distrik Kuala Kencana, Selasa 5 April 2016, terpaksa berhadapan lagi dengan Alat Negara. Dari aksi pembubaran yang diperagakan oleh Alat Negara ini menangkap Ketua KNPB Mimika Steven Itlay. Cerita selanjutnya, Steven Itlay diperlakukan seperti bukan seorang manusia. Steven harus mendapat perlakuan buruk dalam masa tahanan. Steven disiksa dalam ruang tahanan yang sangat sempit dan berbau. Steven menderita sakit sesak nafas<sup>58</sup>. Tindakan-tindakan yang tidak terpuji ini mendapat tanggapan dari seorang advokad. Pengacara Gustaf Kawer, Kamis 7 April 2016, dalam pernyataan di *Koran Jubi* (8 April 2016), mengatakan pemerintahan reformasi tidak berbeda dengan pemerintahan orde lama dan baru. Pemerintah begitu represif terhadap rakyatnya yang kritis<sup>59</sup>.

Dukungan akan suara keanggotaan ULMWP di MSG yang menyuarakan pelanggaran HAM di Papua dan memperjuangkan suara kemerdekaan, sepertinya membakar semangat negara melalui alatnya terus melakukan tekanan dan intimidasi. Sekretaris Jenderal KNPB Ones Suhuniap pada Rabu, 13 April 2016 mengatakan bahwa pada masa kepemimpinan Presiden (Jokowi) sudah lebih 1000 orang Papua ditangkap. Padahal suara kritis yang disampaikan dalam aksi itu dilakukan dengan damai dan tidak anarkis<sup>60</sup>.

Penangkapan lebih masif lagi dari Negara terjadi pada bulan Mei 2016. Pada 2 Mei 2016, masyarakat yang dimotori oleh KNPB dan AMP melakukan aksi demonstrasi damai serentak di seluruh Tanah Papua dan beberapa daerah di luar Papua memberikan dukungan kepada ULMWP (United Liberation Movement for West Papua). Berdasarkan laporan yang diperoleh SKPKC Fransiskan sekitar 1.700-an orang ditangkap. Di kota Jayapura, selain ditangkap, ada 7 orang disiksa dan dipukul. Kemudian massa yang ditangkap itu digelandang dan dijemur di bawah panasnya terik matahari dan pantulan dinding seng di Mako Brimob Papua di Kotaraja<sup>61</sup>.

Selain penangkapan, perlakuan kurang terpuji juga terjadi pada salah satu jurnalis di Papua. Wartawan *Suara Papua* Ardiles Bayage mendapat interogasi dan pukulan dari Alat Negara ketika Ardiles melakukan liputan aksi tersebut<sup>62</sup>. Sekretaris Jenderal AJI Arfi Bambani, di Jakarta, Kamis (12 Mei 2016), mengatakan, wartawan asli

---

58 Aventinus Jenaru, OFM, dkk, Op.cit., hal. 37

59 Kumpulan Kronik dari SKPKC Fransiskan Papua tahun 2016 tentang Kebebasan Berekspresi yang tidak dipublikasikan

60 Ibid., hal. 36

61 Laporan SKPKC Fransiskan Papua yang tidak dipublikasikan.

62 Kumpulan Kronik dari SKPKC Fransiskan Papua 2016 tentang Kebebasan Berekspresi, tidak dipublikasikan

Papua juga kesulitan menjalankan tugasnya sebagai jurnalis karena ketika meliput aksi, aparat keamanan melihat mereka wartawan yang pro kemerdekaan.<sup>63</sup> Padahal, mereka adalah seorang jurnalis, yang menjalankan kegiatan jurnalistiknya, meliput peristiwa yang terjadi di lapangan.

Di tahun yang sama, tahun 2016, Negara dengan berbagai cara meredam perlawanan suara kritis KNPB. Negara mulai menyatukan kelompok dan masyarakat yang lainnya (orang asli Papua dan pendatang) bersama melawan KNPB. Mereka mengeluarkan berbagai pernyataan di media untuk menolak kehadiran KNPB di Tanah Papua. Di koran harian *Bintang Papua* dan *Cenderawasih Pos* (13 Mei 2016) memberitakan bahwa ada beberapa tokoh adat wilayah Mamta mendeklarasikan untuk menolak keberadaan KNPB. Pada Kamis 2 Juni 2016, ada kelompok yang menamakan dirinya Kelompok Barisan Rakyat (BARA) Pembela NKRI di kota Jayapura melakukan aksi demo di Kantor DPR Papua. Aksi mereka adalah aksi tandingan bagi kelompok yang lainnya. Aksi mereka ini adalah terkesan dipolitisir oleh kelompok tertentu untuk menciptakan konflik di Tanah Papua. Wakil Ketua Komisi I DPR Papua Orwan Toli Wone, di koran *Bintang Papua* (6 Juni 2016), menduga kelompok BARA NKRI ini digunakan sebuah kepentingan tertentu dari orang atau kelompok tertentu.

Pada bulan yang sama, 15 Juni 2016, massa yang dimotori oleh KNPB kembali melakukan aksi demonstrasi damai. Aksi ini bukan seperti BARA NKRI tetapi tujuan dan maksud dari aksi mereka sangat jelas. Itu bukan karena baru terjadi sekarang tetapi aksi tersebut sudah bertahun-tahun dilakukan oleh KNPB. Lembaga Bantuan Hukum Jakarta merilis laporannya bahwa sebanyak 1.168 orang ditangkap.<sup>64</sup> Selain tuntutan mereka untuk mendukung ULMWP, massa juga menolak tim penyelesaian HAM Papua bentukan Menkopolkam RI.

Begitu banyak dalil yang disampaikan oleh Alat Negara untuk membatasi ruang gerak dan suara kritis terhadap persoalan HAM di Tanah Papua. Alasan klasik yang selalu disampaikan adalah 'Kami (polisi) tidak memberikan izin untuk aksi'. Pernyataan ini begitu gampang dimentahkan dengan UU No.9 Tahun 1999 tentang menyampaikan pendapat di muka umum. Tidak perlu mendapatkan izin dari aparat keamanan. Aparat keamanan hanya perlu menerbitkan surat pemberitahuan aksi bukan surat setuju akan aksi tersebut. Direktur LBH Jakarta Alghiffari Aqsa pada 28 Mei 2016 mengatakan, tindakan polisi yang kerap kali tidak mengeluarkan Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) terhadap aksi-aksi damai yang dilakukan di Papua, termasuk penangkapan, adalah bukti bahwa kepolisian atau pemerintah masih diskriminatif terhadap rakyat Papua. Sepanjang ekspresi tersebut dilakukan dengan

---

63 Ibid.

64 Ibid.

cara damai, kepolisian dan Pemerintah Indonesia harus menghormatinya.<sup>65</sup>

Perlakuan diskriminatif terhadap suara kritis dari Papua juga terjadi di luar Tanah Papua. Rencana aksi mahasiswa di Asrama Kamasan Yogyakarta, Jumat 15 Juli 2016 mendapat perlawanan yang begitu luar biasa dari aparat keamanan. Selain aparat keamanan, Negara 'memakai' Ormas di Yogyakarta untuk meredam aksi tersebut. Dari pengakuan massa aksi di Asrama Kamasan bahwa mereka diteriaki kata-kata kotor. Juru bicara Persatuan Rakyat Pembebasan Papua Barat Roy Kareba, pada Jumat, 15 Juli 2016, mengatakan, rencana aksi damai di luar Asrama Papua batal karena pertimbangan keamanan. "Sebanyak 22 kawan Papua yang hendak menuju asrama ditangkap polisi tanpa alasan yang jelas."<sup>66</sup> Bahkan diberitakan bahwa Sultan Yogyakarta sempat menyebutkan mahasiswa Papua di Yogyakarta adalah separatis. Kegilaan Negara terus ditunjukkan ketika dalam proses sidang Obby Kogoya di Pengadilan Negeri Sleman, 30 Agustus 2016. Negara melalui alatnya, hadir di ruang sidang dengan bersenjata lengkap dan berdiri di bagian belakang meja hakim.<sup>67</sup>

Ruang untuk bebas berpendapat di muka umum semakin tidak dihargai dengan dikeluarkannya Maklumat oleh Kapolda Papua Irjen Pol. Paulus Waterpauw. Di Markas Polda Papua, Jayapura, pada 1 Juli 2016 Kapolda Papua Irjen Pol. Paulus Waterpauw mengeluarkan sebuah maklumat tentang penyampaian pendapat di muka umum.<sup>68</sup> Berbagai macam reaksi atau tanggapan terhadap maklumat tersebut. Direktur Eksekutif LP3BH Christian Warinussy menjelaskan sudah ada peraturan nasional dan internasional yang lebih tinggi dari sebuah maklumat tersebut. Sehingga pada prinsipnya pihak kepolisian dan Negara tidak berhak membatasi kebebasan berpendapat, berserikat, dan berekspresi dari masyarakat.<sup>69</sup>

Pembungkaman ruang demokrasi itu terus berjalan di tahun 2017. Setiap aksi yang dilakukan oleh masyarakat Papua selalu berhadapan dengan begitu banyak pasukan yang bersenjata lengkap. Ruang demokrasi di Tanah Papua tetap dan mungkin sampai seterusnya dikekang dan ditekan. Negara dengan segala kepentingannya menutup suara kritis rakyat Papua yang menuntut akan adanya sebuah keadilan, perdamaian, dan kebebasan di tanahnya sendiri.

---

65 Ibid.

66 Ibid., Bdk. <https://koran.tempo.co/konten/2016/07/18/401956/Asrama-Mahasiswa-Papua-Dikepung-Polisi>

67 Bdk. <http://tabloidjubi.com/16/2016/08/31/aparat-bersenjata-di-sidang-praperadilan-obby-kogoya/> dan <http://m.metrotvnews.com/jateng/peristiwa/PNG4290b-polisi-bersiaga-jelang-vonis-mahasiswa-obby-kogoya>

68 Pada bagian pertama Maklumat tersebut, Alat Negara sangat tidak benar dan membatasi hak orang. orang yang melakukan aksi penyampaian pendapat di muka umum akan dicatat dan dimasukkan ke dalam catatan kriminal kepolisian dan yang bersangkutan tidak diterbitkan surat SKCK untuk melanjutkan studinya dan mencari pekerjaan.

69 Bdk. <https://suarapapua.com/2016/07/25/maklumat-kapolda-papua-langgar-ham-oap/>



## Bab 7

# Perang TPN OPM Vs TNI-Polri

---

DI PENGHUJUNG 2017, publik Papua, nasional maupun dunia internasional menerima kabar ada ‘perang’ antara TPN OPM dengan Alat Negara (Polri dan TNI). Berbagai informasi terus berkembang untuk memperjuangkan kepentingannya masing-masing. Bermula dari informasi terkait penembakan pada Sabtu, 21 Oktober 2017 di Kampung Utikini, Kabupaten Mimika terhadap dua anggota satuan Brimob Batalyon B Timika,<sup>70</sup> kasus penembakan itu terus berjalan. Sehari sesudahnya, pada Minggu, 22 Oktober 2017 di sekitar Jembatan Utikini, anggota Brimob Briptu Pramana Putra terkena tembakan.<sup>71</sup>

Peristiwa penembakan mendapat respon dari Negara Indonesia dengan mengutus pasukan dari Polri dan TNI ke tempat kejadian. Utusan pasukan itu untuk melakukan pertempuran dengan para Tentara Pembebasan Papua Barat. Di beberapa kesempatan pimpinan kepolisian dan TNI menyebut bahwa kelompok yang melakukan penembakan tersebut adalah Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB). Di dalam sebuah telewicara antara televisi *Metro TV* dengan Kapolda Papua Irijend Pol. Boy Rafli Amar terungkap penjelasan dari Kapolda tentang siapa pelaku penyerangan dan penembakan tersebut.

“Mereka adalah kelompok kriminal, menjarah dan merampas alat komunikasi dari warga masyarakat, termasuk uang, bahkan ada juga yang melaporkan terjadinya tindakan pidana pemerkosaan. Kalau kita lihat mereka ini adalah memang generasi-generasi muda dari kelompok kriminal bersenjata yang antara lain mereka juga ada dari keturunan yang dulu juga pernah menjadi buronan dari kepolisian seperti Kelly Kwalik, anaknya juga ada di dalam kelompok ini. Kemudian juga dari Arjun Waker, dimana adiknya Saptinus Waker dan beberapa generasi muda berikutnya berada di dalam kelompok ini yang saat ini melakukan isolasi terhadap warga tersebut. Kita masih mendalami motif mereka.”<sup>72</sup>

---

70 Bdk. <http://metromerauke.com/2017/10/23/kronologi-penembakan-7-anggota-brimob-di-mimika-dalam-3-hari/>

71 Ibid.

72 Suara dari Kapolda Papua Irijend Pol. Boy Rafli Amar dalam telewicara dengan Media Metro TV pada 9 November 2017, Bdk. <http://m.metrotvnews.com/play/2017/11/09/785669>



Namun bagi mereka yang melakukan penembakan, secara jelas dan terang-terangan membantah tuduhan tersebut. Mereka mengakui bahwa mereka bukan KKB melainkan Tentara Perjuangan Kemerdekaan OPM. Hal ini terdengar jelas di dalam unggahan video yang berdurasi 16.09 menit di sebuah akun You Tube.<sup>73</sup> Mereka tidak menyembunyikan identitasnya, di kepala surat yang ditulis dengan tulisan tangan terbaca dan terlihat secara jelas bahwa mereka dari Markas Komando Daerah Militer (Makodam) III Timika TPN OPM Papua Barat.

Alasan mereka melakukan penembakan juga secara jelas disampaikan di dalam tulisan surat tersebut. Berikut bunyinya:

*"...Kami Tentara Pembebasan Nasional Organisasi Papua Merdeka (TPN OPM) melakukan penyerangan di areal Freeport Mc. Moran/PT. Freeport Indonesia berdasarkan surat perintah operasi (PO), yang dikeluarkan di Mabas oleh Jendral Jack Millian Kemong, bunyi perintah operasi adalah; Mukadimah Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945; bahwa sesungguhnya kemerdekaan ialah hak segala bangsa di dunia oleh sebab itu penjajahan di atas dunia harus dihapuskan sebab tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mukadimah UUD 1945 adalah dasar hukum dan peraturan perundang-undangan pemerintah Indonesia itu sendiri. Pemerintah Indonesia harus sadar bahwa penjajahan atas bangsa Papua ras melanesia berarti UUD pemerintah Republik Indonesia tahun 1945 tidak diberlakukan dan tidak dihormati oleh pemerintah Republik Indonesia itu sendiri. Berdasarkan surat perintah operasi tersebut kami sudah melakukan dan akan melakukan aksi-aksi penyerangan di areal Freeport..."*<sup>74</sup>

Alasan penyerangan dan penembakan tersebut mendapat respon yang begitu cepat dari Negara. Negara menggerakkan segala kekuatannya. Negara menunjukan sebagian kekuatannya di Kabupaten Mimika. Sebanyak 100 personil Brimob dari Polda Nusa Tenggara Barat (NTB), 100 personil dari Polda Kalimantan Tengah dan 100 personil dari Kelapa Dua Jakarta diutus ke daerah Mimika untuk berperang dengan TPN OPM Makodam III Mimika. Satu sisi menakutkan, di sisi lain terkesan berlebihan karena melawan hanya sekitar 20-an anggota TPN OPM, Negara harus mengutus sekitar 300 personil Brimob, belum terhitung dengan dari kesatuan TNI. Selain itu Kapolda Papua Irjen Pol. Boy Rafli Amar mengeluarkan Maklumat pada 12 November 2017 untuk TPN OPM.<sup>75</sup>

73 Bdk. <https://www.youtube.com/watch?v=749uca-pMZ4> atau di dalam lima lembar surat tulisan tangan dari TPN OPM wilayah Mimika, bdk. <http://www.tabloid-wani.com/2017/10/statement-oleh-TPN-OPM-makodam-III-timika-west-papua.html>

74 Ibid.,

75 Isi Maklumat Kapolda Papua: diperintahkan kepada seluruh masyarakat sipil yang menguasai, membawa, memiliki, mempergunakan senjata api secara ilegal agar secepatnya: 1. Meletakkan senjata dan menyerahkan diri kepada aparat penegak hukum (Kepolisian Negara Republik Indonesia). 2. Agar tidak melakukan perbuatan melanggar hukum seperti pengancaman, penganiayaan, perampokan, penjarahan, pemerkosaan, pembunuhan dan perbuatan kriminal lainnya.

## Bab 8

# Peran Media dan Liputan Konflik Freeport

---

SALAH SATU hal yang cukup menarik dari ‘peperangan’ pada Oktober 2017 di areal PT Freeport adalah peran serta media yang mempublikasikan situasi di sekitar Kampung Banti, Kimberly dan Utikini. Informasi yang dikonsumsi oleh publik pun berbeda-beda berdasarkan apa yang mereka dengar, tonton dan baca. Publik mencerna apa yang disajikan oleh media baik cetak, internet dan dalam bentuk audio visual. Dengan demikian publik pun memahami apa yang diketahuinya. Pertanyaannya bagi media adalah sejauh mana independensi sebuah media di dalam mengolah danewartakan informasi?

Berita seperti dugaan kriminal perkosaan, penyanderaan sekitar 1.300 warga yang disampaikan oleh Kapolda Papua Irjend Pol. Boy Rafli Amar menjadi perdebatan dan diskusi yang cukup kuat pada beberapa media. Pernyataan Kapolda Boy ditanggapi oleh TPN OPM. Media *Tempo.co* menurunkan berita dengan judul “Polisi Dinilai Manipulasi Kabar Penyanderaan Warga Papua”<sup>76</sup> yang tentunya membantah pernyataan Kapolda Boy. Di media ini, Pengacara HAM Veronica Koman membantah berita penyanderaan dan intimidasi terhadap 1300 warga di Desa Kimberly dan Banti, Distrik Tembagapura, Kabupaten Mimika. Mengejutkan lagi pengakuan dari seorang warga yang mendiami Desa Banti yang juga adalah pemimpin Suku Amungme Jonathan Kibak menuturkan bahwa orang-orang di sana (Kampung Banti) aman, tidak disandera. Warga dibiarkan bebas. Menurut Kibak, pihak TPN OPM tidak menjamin keselamatan warga di sana jika warga melewati zona pertempuran dan terjebak di dalam baku tembak.<sup>77</sup>

“Saya ingin menegaskan, bahwa kami tidak disandera. Tidak ada orang di kampung yang berhenti melakukan aktivitas sehari-hari.”<sup>78</sup>

---

76 Bdk. <https://nasional.tempo.co/read/1033025/polisi-dinilai-manipulasi-kabar-penyanderaan-warga-papua>

77 Bdk. <http://tabloidjubi.com/artikel-11432-warga-banti--kami-tidak-disandera.html>

78 Ibid.



Aksi koalisi masyarakat di Kantor DPRD Mimika pada November 2017. Tampak seorang demonstran meminta media nasional menghentikan berita hoaks seputar konflik di Tembagapura. Foto: istimewa

Di tempat terpisah Komandan TPN OPM Hendrik Wanmang menjelaskan bahwa warga di Kampung Kimberly dan Banti tidak dijadikan sasaran tetapi terjebak karena berada di dalam zona konflik.

“Saya masih mempertimbangkan bagaimana mengeluarkan mereka dari sini. Jika saya mengeluarkan mereka, saya harus mempertimbangkan apa yang akan dilakukan oleh TNI dan polisi terhadap orang asli Papua. Saya tidak ingin ada nyawa yang hilang, saya tidak ingin ada masyarakat yang menjadi korban.”

Di media *tirto.id* menceritakan TPN OPM membantah tuduhan dari pihak aparat keamanan bahwa ada pemerkosaan yang dilakukan di Tembagapura oleh TPN OPM. Menurut Hendrik Wanmang, informasi pemerkosaan tersebut digunakan oleh pihak aparat keamanan untuk mengerahkan personil bersenjata ke kampung-kampung di Distrik Tembagapura<sup>79</sup>. Pihak Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) menilai peristiwa yang terjadi di Papua bukanlah penyanderaan tetapi merupakan sebuah perlawanan yang menentang kekuasaan pemerintah Indonesia. Menurut salah seorang peneliti LIPI Cahyo Pamungkas, masalah utama di sana adalah ketidakadilan yang sudah terjadi sekian lama.<sup>80</sup>

79 Bdk. <https://tirto.id/tpn-opm-di-timika-tidak-benar-ada-perkosaan-dan-penyanderaan-czYp>

80 Bdk. <http://news.metrotvnews.com/hukum/Wb72JBaN-peneliti-lipi-sebut-konflik-papua-terkait-gerakan-papua-merdeka>

Dampak dari situasi ini cukup jelas bahwa secara psikologis warga di Kampung Banti dan Kimbely serta warga di wilayah sekitarnya pasti tertekan. Pelayanan dasar pun terganggu. Kepala Kepolisian Resor Mimika AKBP Viktor Mackbon kepada media *Antara Papua* menjelaskan bahwa karena peristiwa tersebut masyarakat Banti dan sekitarnya sulit mendapatkan pelayanan publik seperti kesehatan dan pendidikan (kegiatan belajar mengajar). “Petugas Medis dan guru yang bertugas di Banti sudah diungsikan guna menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan.”<sup>81</sup>

Debat pendapat antara para pejabat pemerintahan dan pihak aparat keamanan pun tersaji di dalam peristiwa tersebut. Panglima Daerah Militer XVII/Cenderawasih Mayjen TNI George Elnadus Supit menjelaskan bahwa pengejaran dan upaya menghentikan TPN OPM di Mimika sebaiknya aparat keamanan mengesampingkan dulu HAM. Pendapat ini ditanggapi oleh salah satu anggota DPR Papua Laurens Kadepa. Laurens justru khawatir dengan sikap aparat keamanan di dalam penanganan situasi di Tembagapura. Masyarakat sipil dapat menjadi korban di dalam penghentian kelompok TPN OPM. “Ini yang saya khawatirkan. Saya setuju penegakan hukum, tapi saya tidak sependapat kalau mengesampingkan HAM.”<sup>82</sup>

Penyebaran informasi dari media dengan kepentingannya telah mengaburkan informasi sebenarnya di lapangan. Vero Koman menjelaskan bahwa semua distorsi pemberitaan sepihak ini disebabkan buruknya kebebasan pers di Papua, termasuk masih ditutupnya akses jurnalis asing ke Papua.<sup>83</sup> Sejalan dengan itu Gerakan Masyarakat untuk Demokrasi (Gema Demokrasi), pada 15 November 2017 mengeluarkan siaran persnya di Jakarta. Pihak Gema Demokrasi di dalam siaran persnya mengutip pernyataan Pejabat Humas Polda Papua AKB Suryadi Diaz yang disampaikannya ke BBC pada 12 November 2017, mengatakan bahwa para anggota TPN OPM tidak menyandera penduduk, melainkan bersiaga di sejumlah titik yang menjadi pintu utama Kampung Banti dan Kimberly. Menurut Gema Demokrasi frasa penyanderaan yang digunakan oleh beberapa media sangat berlebihan dan dapat menimbulkan konflik-konflik yang baru.<sup>84</sup>

Untuk menghentikan informasi yang bermuatan kepentingan tertentu, Gema Demokrasi mendesak: pertama, seluruh media massa untuk tidak menggunakan frasa penyanderaan dan harus menyajikan fakta aktual, akurat dan berimbang. Kedua, aparat keamanan mengedepankan upaya persuasif agar tidak ada korban yang

81 Pernyataan Kapolres Mimika AKBP Viktor Mackbon, bdk. <https://www.antaranews.com/berita/662727/setelah-penembakan-mimika-masyarakat-sulit-dapatkan-layanan-publik>

82 Bdk. <http://tabloidjubi.com/artikel-11344-tni-dinilai-abaikan-ham-legislator-tak-ingin-warga-sipil-korban-.html>

83 Op.Cit., <https://tirto.id/tpn-opm-di-timika-tidak-benar-ada-perkosaan-dan-penyanderaan-czYp> pernyataan Pengacara HAM Vero Koman di Jakarta

84 Bdk. Siaran Pers yang dikeluarkan oleh Gema Demokrasi pada 15 November 2017, di Jakarta

berjatuhan dan berhenti menyebarkan informasi yang tidak sesuai faktanya. Ketiga, Dewan Pers mengusut terjadinya pelanggaran kode etik jurnalistik yang dilakukan oleh sejumlah media yang memberitakan kondisi Papua belakangan ini.<sup>85</sup>

Di Tanah Papua, Koalisi Penegakan Hukum dan HAM Papua yang terdiri dari berbagai NGO/LSM, kelompok gerakan mahasiswa dan masyarakat, melakukan konferensi pers di Kantor ALDP, Selasa 21 November 2017. Dengan berbagai data dan informasi yang sudah dikumpulkan koalisi tersebut mengancam tindakan sepihak dan tidak berimbang dari media yang mempublikasikan kejadian di Kampung Banti dan Kimberly.

Menurut Koalisi penyanderaan seperti yang disampaikan oleh beberapa media tidaklah benar karena tidak ada tuntutan yang disampaikan oleh para penyandera. Selain itu beberapa pengakuan masyarakat di Kampung Banti dan Kimberly mengungkapkan bahwa mereka tidak berada di dalam situasi penyanderaan. Selain itu dari temuan koalisi bahwa Kapolres Mimika membantah bahwa situasi di Kampung Banti dan Kimberly bukan situasi penyanderaan.

Dengan situasi tersebut, Koalisi mendesak, pertama, agar Alat Negara tidak menyebarkan informasi yang tidak benar tanpa ada fakta dan bukti. Kedua, media atau pers agar melakukan kerja-kerja jurnalistik yang berprinsip pada kemerdekaan pers secara bertanggung jawab terutama melakukan verifikasi setiap informasi yang diterima. Ketiga, mendesak PT Freeport agar segera menyampaikan apa yang sebenarnya yang terjadi di Kampung Banti dan Kimberly.<sup>86</sup>

Dalam peristiwa konflik, seperti yang terjadi di Papua, media mengemban misi sebagai pembawa misi kebenaran, dengan menyajikan informasi yang benar, sesuai dengan fakta. Media betul-betul menjaga roh kebenaran itu, tanpa terlibat dalam pihak-pihak yang sedang berkonflik, menyajikan berita-berita yang belum terverifikasi kebenarannya akan memperpanjang konflik, dan mengembangkan anggapan-anggapan kepada pembaca yang keliru, bahkan bisa menyesatkan.

Media mesti memegang teguh komitmen tentang tugas utama menghadirkan kebenaran. Namun, komitmen media soal kebenaran itu kini tergerus dengan berita palsu atau berita bohong (*fake news*). Dan gejala, fenomena semacam itu tampak dalam pemberitaan konflik, misalnya, dalam konflik antara TPN OPM dengan Aparat Kepolisian dan Tentara Nasional Indonesia.

Fenomena *fake news* dalam jurnalisme itu juga menjadi perhatian gereja katolik, yang dinyatakan dalam peringatan Hari Komunikasi Sosial Sedunia pada Mei 2018, dalam pesannya dengan judul "Berita Palsu dan Jurnalisme Perdamaian". Paus Fransiskus mendukung komitmen media dan masyarakat untuk membendung

85 Ibid.

86 Konferensi pers ini dapat dilihat dan dinonton di <https://www.youtube.com/watch?v=JEUwS5yjm8>

penyebaran berita palsu dan mengangkat keluhuran martabat jurnalisisme dan tanggung jawab pribadi jurnalis untuk menyampaikan kebenaran.

Paus Fransiskus menyerukan tentang jurnalisisme perdamaian, jurnalisisme yang jujur dan menentang kepalsuan. “Saya ingin mengajak semua orang untuk memajukan jurnalisisme perdamaian. Jurnalisisme perdamaian tidak dimaksudkan sebagai jurnalisisme “pemanis rasa” yang menolak mengakui adanya masalah-masalah serius atau jurnalisisme yang bernada sentimentalisme. Sebaliknya, jurnalisisme perdamaian adalah suatu jurnalisisme yang jujur dan menentang kepalsuan, slogan-slogan retorik, dan topik berita yang sensasional.”

Menurut Paus Fransiskus jurnalisisme diciptakan oleh masyarakat untuk masyarakat, yang melayani semua orang, terutama mereka yang tidak bersuara. Pandangan Paus Fransiskus itu relevan saat melihat bagaimana media meliput peristiwa konflik di Tanah Papua. “Sebuah jurnalisisme yang tidak terpusat pada breaking news (berita sela), tetapi menelisik sebab-sebab yang mendasari konflik, guna memajukan pemahaman yang lebih mendalam dan memberi sumbangan bagi solusi dengan memulai suatu proses yang baik. Sebuah jurnalisisme yang berkomitmen untuk menunjukkan beragam alternatif berkenaan dengan meningkatnya keributan dan kekerasan verbal.”



## Bab 9

# Pembangunan Vs Pelanggaran HAM



Masyarakat yang tergabung dalam SOS menggelar aksi damai menuntut penuntasan kasus pelanggaran HAM di Tanah Papua. Foto: SKPKC Fransiskan Papua.

KUNJUNGAN PRESIDEN Joko Widodo ke Tanah Papua selama tahun 2015 terjadi dua kali, pada bulan Mei dan Desember 2015. Kunjungan Jokowi ke Papua sering mendapatkan apresiasi positif, kunjungannya selalu membawa berita kabar baik di dalam pembangunan infrastruktur. Namun, apresiasi negatif juga muncul di antara kunjungan-kunjungannya, yang kerap dianggap tak peduli dengan berbagai pelanggaran hak asasi manusia dan berbagai kasus kekerasan yang dialami orang-orang asli Papua.

Warga pasti merasa bangga dan bahagia kalau mendapat kunjungan dari pimpinannya. Apalagi ada 'sesuatu' yang dibawakan oleh pimpinan, seperti yang lazim

disebut 'kado' atau 'ole-ole'. Dengan pengamanan yang sangat super dan 'gila'<sup>87</sup>, Presiden mengunjungi Kota Jayapura dan Merauke. Pada kesempatan itu (kunjungan bulan Mei), Presiden membebaskan lima tahanan politik di Papua. Di Kabupaten Merauke, Presiden Joko Widodo diajak oleh Pemkab Merauke untuk melaksanakan panen raya di Distrik Kurik. Negara yang diwakili oleh Presiden Joko Widodo memberikan dan menanamkan 'kapsul waktu'. Boleh dikatakan seperti keranjang yang mengisi segala mimpi warga. Pada kesempatan itu di Distrik Kurik Merauke, Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa butuh lahan 1,2 juta Hektare untuk persawahan, dan Presiden menugaskan TNI untuk membuka lahan tersebut. Dengan bahasa lain, masyarakat harus merelakan lahannya sebesar 1,2 juta Hektare untuk negara.<sup>88</sup>

Selain itu ada beberapa proyek pembangunan infrastruktur yang ditinjau dan diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada saat kunjungan pada bulan Mei 2015 itu. Diantaranya, meninjau Pasar Hamadi di Kota Jayapura, peresmian Jembatan Holtekam di Kota Jayapura, peresmian Kampus IPDN di Buper Waena, peletakan batu pertama pembangunan fasilitas PON 2020, peresmian kabel optik.<sup>89</sup> Di Kabupaten Jayapura, Presiden Joko Widodo meninjau pasar Prahara Sentani. Di Provinsi Papua Barat, Presiden Joko Widodo ke Manokwari untuk meresmikan pembangunan industri Petrokimia dan peresmian pembangunan pembangkit listrik proyek tangguh BUMN.

Sesudah Presiden Joko Widodo dan Pejabatnya yang berkunjung ke Tanah Papua, melalui Menteri Koordinator Politik, Hukum dan HAM Luhut Binsar Pandjaitan, pada 29 Maret 2016 mengatakan, Pemerintah RI ingin menyelesaikan kasus pelanggaran HAM di Tanah Papua. Pemerintah menginginkan penyelesaian masalah HAM dengan bijak. Pemerintah juga tidak menghendaki agar persoalan HAM dibawa kemana-mana. Salah satu pernyataan yang juga mengejutkan adalah menyelesaikan masalah Papua melalui operasi militer. Ini berarti negara masih sangat kental dengan pola lama penyelesaian masalah di Tanah Papua.<sup>90</sup> Di tahun yang sama, tepatnya pada 15 April 2016 di Kota Jayapura, untuk merespon pernyataan itu, aparat keamanan di Tanah Papua menggelar diskusi dengan tema "Pendokumentasian Kasus Pelanggaran HAM Berat di Tanah Papua."<sup>91</sup> Mereka menghadirkan dan mengundang beberapa NGO/LSM dan

87 Dalam kunjungan presiden ini, sebanyak 6000 personil disiagakan yang terdiri dari 3.600 TNI, 2.400 dari kepolisian. Sebanyak 5 helikopter dipakai, dua buah kapal perang disiagakan dan 12 sniper ditempatkan di beberapa titik tertentu (<http://fransiskanpapua.org/2017/05/15/kunjungan-kedua-presiden-joko-widodo-ke-papua/>)

88 Op.cit. Tim SKPKC Fransiskan Papua, hal. 96. Bandingkan juga film "The Mahuze" oleh Watchdoc 2015 (<https://www.youtube.com/watch?v=MSVTZSa4oSg>)

89 Bdk. <https://www.antaraneews.com/berita/494141/presiden-jokowi-akan-resmikan-proyek-pembangunan-di-papua>

90 Kumpulan Kronik SKPKC Fransiskan Papua tahun 2016 tentang Penyelesaian Persoalan HAM Papua.

91 Sebanyak 13 kasus pelanggaran HAM Papua yang direkomendasikan untuk diselesaikan dalam kesempatan diskusi tersebut. Ketiga belas kasus tersebut adalah: Kasus Penyanderaan Mapenduma (1996), Biak Berdarah (1998), Penyerangan Mapolsek Abepura, Pembunuhan Theys, Pembobolan Gudang Senjata



Komnas HAM Perwakilan Papua. Diskusi ini membentuk sebuah tim yang disebut Tim Peduli Pelanggaran HAM di Papua. Dari beberapa rekomendasi yang dihasilkan, diputuskan untuk fokus menyelesaikan hanya tiga kasus pelanggaran HAM yakni Kasus Wasior 2001, Wamena Berdarah 2003 dan Paniai Berdarah (8 Desember 2014).<sup>92</sup> Bahkan tim ini berjanji akan menyelesaikan dalam kurun waktu 6 bulan semester kedua tahun 2016.

“Tim Peduli Pelanggaran HAM Papua merekomendasikan tiga kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Papua dan Papua Barat. Ketiga kasus itu adalah Kasus Wasior 2001, Wamena Berdarah 2003 dan Paniai, 8 Desember 2014. Tiga kasus tersebut data awalnya sudah lengkap dan Komnas HAM juga sudah membentuk tim Ad Hoc sehingga menjadi prioritas untuk ditindaklanjuti. Pihaknya siap bila nantinya ada anggota yang diduga terlibat dalam kasus pelanggaran HAM.”<sup>93</sup>

Di Jakarta, Kamis (28 April 2016), Jaksa Agung Bidang Pidana Khusus Arminsyah memastikan bahwa penanganan dugaan kasus pelanggaran HAM berat di Wasior dan Wamena tetap dilanjutkan. Menurut Arminsyah, sampai saat ini pihak penyidik masih membutuhkan keterangan ahli untuk membongkar perkara tersebut. Pernyataan Kapolda Papua Irjen Pol. Paulus Waterpauw dan pihak kejaksaan, diamini oleh Kapolri Jendral Pol. Badrodin Haiti. Menurut Jendral Badrodin, ada tiga kasus pelanggaran HAM yang menjadi perhatian serius pemerintah, dua di antaranya ditangani oleh Kejagung (kasus Wasior dan Wamena Berdarah) sedangkan kasus Penembakan di Paniai, 8 Desember 2014 masih dalam tahap penyidikan.<sup>94</sup> Di tahun 2017, dengan begitu gampang, melalui Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan HAM RI Wiranto, negara mengupayakan penyelesaian kasus pelanggaran HAM dengan musyawarah mufakat. Wiranto mengibaratkan penyelesaian kasus HAM dengan menggunakan salah satu tradisi di daerah Papua yakni bakar batu.<sup>95</sup> Apakah ketika terjadi penangkapan, penyiksaan dan penembakan dari Negara terhadap orang asli Papua ada musyawarah dan mufakat?

Publik, khususnya di Papua, mungkin memberikan apresiasi keinginan dan kehendak dari negara ini. Tetapi di kalangan pegiat HAM dan kelompok suara kritis di Tanah Papua pesimis dengan janji dan kehendak negara tersebut. Salah satu pejuang

---

Makodim Wamena, Kerusuhan Uncen 16 Maret, Penembakan Opinus Tabuni, Pembunuhan Yawan Wayeni, Penangkapan dan Penembakan Kelly Kwalik, Kongres Rakyat Papua III, Penembakan Mako Tabuni, Kerusuhan Tinju di Nabire dan Kasus Paniai 2014. Bandingkan juga <http://tabloidjubi.com/16/2016/04/19/dimana-logika-polda-papua-fasilitasi-dokumentasi-masalah-ham-papua/>

92 Bdk. <http://tabloidjubi.com/16/2016/04/19/dimana-logika-polda-papua-fasilitasi-dokumentasi-masalah-ham-papua/>

93 Pernyataan Kapolda Papua Irjen Pol. Paulus Waterpauw, Senin (25 April 2016). Bdk. Koran Jubi, 26 April 2016

94 Bdk. Koran Bintang Papua, 30 April 2016

95 Bdk. <https://news.detik.com/berita/d-3654332/soal-penyelesaian-kasus-ham-wiranto-merujuk-ke-adat-bakar-batu>

HAM Papua, Pastor Jhon Jonga Pr, pada 23 April 2016 di Wamena, berpendapat, heran dengan niat baik tersebut. Mereka adalah pelaku pelanggaran HAM di Papua. “Saya rasa heran dan lucu saja karena sebagian besar pelakunya adalah mereka (aparatus keamanan) sendiri, pelaku kekerasan dan pelanggaran HAM di Papua selama ini<sup>96</sup>”. Hal senada juga disampaikan oleh Direktur Elsham Papua Ferdinan Marisan pada 5 Mei 2016. Menurut Ferdinan, tidak ada proses pengendalian terhadap oknum TNI dan Polri yang melakukan pelanggaran HAM di Papua. Hal ini membuktikan bahwa negara melakukan pembiaran terhadap segala pelanggaran HAM di Papua.

Proses penyelesaian pelbagai kasus HAM di Tanah Papua sepertinya tidak menemukan titik terangnya. Berbagai pihak (kelompok/lembaga/instansi dan perorangan) terus menekan dan berbicara agar proses peradilan terhadap para pelaku dapat dilaksanakan. Sebuah teguran yang cukup keras dari salah satu anggota DPR Papua Laurens Kadepa pada 14 Juni 2016 bahwa pejabat di pusat dan Papua tidak membicarakan HAM Papua sebagai tameng untuk kepentingan politik dan jabatan tertentu<sup>97</sup>. Yang diharapkan adalah sungguh-sungguh memberikan sebuah keadilan yang bermartabat pihak korban.

Pembicaraan yang hangat untuk mendorong penyelesaian pelanggaran Kasus HAM di Tanah Papua diikuti dengan segala proses pembangunan yang deras di Tanah Papua. Masuknya investasi baik itu dunia pertambangan maupun perkebunan dan kehutanan serta pembukaan lokasi-lokasi terisolir, memberikan dampak yang cukup berarti bagi masyarakat asli Papua. Perampasan lahan yang sepihak oleh PT Nabire Baru (Yerisiam Gua, Kabupaten Nabire), persoalan tambang Nifasi Nabire, proyek menjadikan Merauke sebagai Lumbung Pangan Nasional, perpanjangan kontrak karya PT Freeport dan proyek pembangunan jalan-jalan di Pedalaman Papua, berdampak pada semakin goyah dan punahnya orang asli Papua di tanahnya.

Peristiwa penangkapan, penyiksaan, penembakan terus menjadi sebuah kebiasaan/budaya Negara sekaligus terus menumbuhkan rasa antipati dan ingatan akan penderitaan dalam diri orang asli Papua. pembiaran dan perlakuan Negara akan terus membangkitkan ketidakpercayaan orang asli Papua terhadap Negara.

---

96 Bdk. Koran Jubi, 25 April 2016

97 Bdk. Bintang Papua, 15 Juni 2016

## Bab 10

# Darurat Kesehatan

---

HAK UNTUK mendapatkan layanan kesehatan merupakan hak setiap warga. Hak ini menjadi sebuah kebutuhan yang mau tidak mau harus dipenuhi oleh pemberi atau penyedia layanan kesehatan. Beberapa kasus buruknya kesehatan di Tanah Papua pada tahun-tahun belakangan ini (2015-2017), memunculkan beberapa pertanyaan “Apakah yang sebenarnya terjadi? Mengapa bisa terjadi? Dimana para petugas medis? Dan masih banyak pertanyaan lagi yang dapat kita munculkan ketika membaca, melihat dan mengalami buruknya layanan kesehatan di Tanah Papua. Dengan melihat buruknya layanan kesehatan yang akhirnya menyebabkan banyak korban usia anak harus meninggal, kami dapat mengatakan “Papua Darurat Kesehatan”.

Beberapa kasus seperti Kejadian Luar Biasa di Wilayah Mbuah, Kabupaten Nduga yang menelan korban 96 manusia usia anak dan Balita,<sup>98</sup> kasus kematian di Kabupaten Lanny Jaya<sup>99</sup>, kematian di Distrik Tigi Barat (Kabupaten Deiyai)<sup>100</sup>, kematian di usia anak dan Balita di Distrik Saminage (Kabupaten Yahukimo)<sup>101</sup> dan kematian usia anak dan Balita di Wilayah Yigi (Kabupaten Nduga).<sup>102</sup> Segala peristiwa di atas bermula dari ketidaktahuan masyarakat dan minimnya layanan kesehatan yang diberikan oleh

---

98 Berdasarkan laporan dari Tim Pemda Kabupaten Nduga yang melakukan riset lapangan di Wilayah Mbuah, sejak Oktober – Desember 2015, dilanjutkan Januari 2016 ditemukan 96 anak usia Balita meninggal dunia. Selain itu, ratusan hewan piaran seperti ayam dan babi juga mati karena wabah penyakit di daerah itu.

99 Berdasarkan Laporan Koalisi untuk Kesehatan Lanny Jaya, sebanyak 20 warga meninggal, kebanyakan usia Balita. Meninggalnya ke-20 warga ini terhitung dari Januari – April 2017. Informasi tentang jumlah warga yang meninggal ini pun berbeda-beda. Di media [www.tabloidjubi.com](http://www.tabloidjubi.com) menyebutkan sebanyak 37 warga yang meninggal.

100 Berdasarkan Laporan SKPKC Fransiskan Papua tentang meninggalnya Balita di Distrik Tigi Barat, Kabupaten Deiyai, jumlah Balita yang meninggal adalah 42 orang, 1 usia anak dan 7 orang dewasa. Kejadian ini menimpah lima kampung di Distrik Tigi Barat, terjadi dari Mei sampai Juli 2017. Bandingkan juga <https://www.tabloidjubi.com/artikel-7755-kematian-lebih-30-balita-di-distrik-tigi-barat-akibat-7-jenis-penyakit.html>, <http://kesmas-id.com/40-bayi-meninggal-dunia-di-deiyai-papua-terserang-wabah-sarampa/>

101 Berdasarkan laporan dari Paroki Hepuba, Wamena, tercatat sekitar 48 warga yang meninggal di 8 kampung sejak Januari sampai Agustus 2017.

102 Berdasarkan laporan dari tim mahasiswa peduli kesehatan di Wilayah Yigi, Nduga, ditemukan sebanyak 35 Balita yang meninggal. Peristiwa ini terjadi pada Bulan Juli sampai September 2017. Bandingkan juga <https://suarapapua.com/2017/10/19/juli-hingga-oktober-2017-35-balita-dan-anak-meninggal-di-wilayah-yigi-nduga/>

penyedia layanan, dalam hal ini pihak Dinas Kesehatan setempat. Kematian yang terjadi pada generasi penerus Tanah Papua (khususnya di daerah Pedalaman Papua), memunculkan berbagai pertanyaan dan prasangka yang miring terhadap Negara.

Pihak Rumah Sakit Umum Daerah Wamena, Kabupaten Jayawijaya, menyampaikan informasi tentang peningkatan kematian ibu hamil dan bayi di RSUD Wamena selama kurun waktu 2015 dan 2016. Direktur RSUD Wamena dr. Felly Sahureka menyebutkan bahwa berdasarkan data yang dimilikinya, pada tahun 2015 sebanyak 1.888 ibu melakukan persalinan, 7 orang di antaranya meninggal. Pada tahun 2016, sebanyak 2009 melakukan persalinan, 6 orang meninggal dunia. Sedangkan untuk bayi yang lahir pada tahun 2016 adalah 2009 tetapi yang hidup sebanyak 293 bayi. Menurut dokter spesialis kandungan RSUD Wamena dr. Charles Ratulangi, kematian itu disebabkan pendarahan, infeksi kehamilan dan kekurangan gizi bagi ibu hamil.<sup>103</sup> Kepala Dinas Kesehatan Papua drg. Aloysius Giyai menjelaskan bahwa angka kematian di sembilan kabupaten di Papua masih tergolong tinggi. Sembilan kabupaten yang dimaksudkan adalah Kabupaten Deiyai, Dogiyai, Pegunungan Bintang, Yahukimo, Mamberamo Tengah, Nduga, Puncak, Puncak Jaya dan Waropen<sup>104</sup>. Angka kematian generasi penerus begitu tinggi di Papua. Siapa yang harus disalahkan?

Pada 31 Maret 2017, Pelapor Khusus PBB Bidang Kesehatan Dainius Puras berkesempatan mengunjungi Jayapura, Papua. Dainius Puras secara langsung mendengarkan informasi tentang fakta pelayanan kesehatan di Tanah Papua. Beberapa NGO/LSM dan pegiat kesehatan yang tergabung dalam sebuah koalisi menghadirkan para korban dan pelayan kesehatan untuk memberikan fakta dan kesaksian.<sup>105</sup> Bermula dari Kejadian Luar Biasa di Wilayah Mbua, Kabupaten Nduga, fakta layanan kesehatan yang buruk terus 'terbongkar'. Ketidakhadiran petugas kesehatan, stok obatan yang terbatas, beredarnya obatan kedaluwarsa, kematian pasien (khususnya usia Balita), pembiaran yang terjadi terhadap pasien, semuanya itu menjadi topik hangat yang dibahas pada kesempatan itu.

Pelapor Khusus PBB Dainius Puras berjanji akan menuliskan surat teguran kepada Pemerintah Indonesia. Semua permintaan para korban, pegiat kesehatan, NGO didengarkan. Dainius Puras prihatin dengan situasi kesehatan yang buruk di Tanah Papua, khususnya di daerah pedalaman Papua.

103 Bdk. <http://tabloidjubi.com/m/artikel-7104-tingkat-kematian-ibu-hamil-dan-bayi-di-rsud-wamena-meningkat.html>

104 Bdk. <https://regional.kompas.com/read/2016/09/07/16214001/angka.kematian.bayi.di.sembilan.kabupaten.di.papua.masih.tinggi>

105 Pada kesempatan itu, Pelapor Khusus PBB Bidang Kesehatan Dainius Puras mendengarkan kesaksian tentang layanan kesehatan dan perlakuan medis yang tidak layak diterima oleh pasien. Seperti Bapak David Tarkouw korban penembakan yang dirawat di Rumah Sakit Bayangkara. Bapak David Tarkouw dibiarkan hampir selama 1 bulan lebih.

Cerita pilu ini tidak berakhir. Cerita tentang persoalan di bidang kesehatan, hampir selalu sama di setiap tahunnya. Pada kesempatan ini, kami mengangkat beberapa fakta lapangan yang kami jumpai pada tahun 2017, di beberapa wilayah di Tanah Papua. Kiranya apa yang disampaikan ini memberikan gambaran kepada kita tentang persoalan kesehatan di Tanah Papua.

### **Kematian Anak-anak di Deiyai: Lanny Jaya dan Saminage, Musibah atau Kejadian Luar Biasa?**

Puluhan orang tua dengan sedih dan berbesar hati merelakan kepergiaan anak-anaknya. Anak-anak yang masih berusia balita sangat rawan diserang oleh berbagai penyakit.<sup>106</sup> Campak, Ispa, Diare, Disentri dan Kurang Gizi menjadi teman mereka yang membawa mereka untuk bertemu Sang Pencipta. Kejadian-kejadian ini terjadi di lima kampung di Distrik Tigi Barat, Kabupaten Deiyai, lima kampung di Kabupaten Lany Jaya, dan di Kampung Kwarja, Kabupaten Jayapura.

Berdasarkan UU Nomor 55 tahun 2008, Deiyai terbentuk menjadi sebuah kabupaten. Pemekaran ini secara sah terjadi pada pertengahan tahun 2009. Kalau dilihat dari Topografis, Kelima distrik/kecamatan yang ada di Kabupaten Deiyai berada melingkari Danau Tigi.<sup>107</sup> Di bidang kesehatan, tersebar Puskesmas dan Pustu serta tenaga kesehatan di lima distrik yakni Distrik Tigi, Kapiroya, Tigi Barat, Tigi Timur dan Distrik Bowobado.<sup>108</sup>

Delapan tahun kabupaten Deiyai berjalan, pada 2017, publik mendengarkan berita buruk. Beberapa kampung di Kabupaten Deiyai mengalami duka. Sebanyak 42 anak usia Balita di lima kampung di Distrik Tigi Barat, Deiyai, meninggal dunia karena sakit. Kasus kematian Balita di Kampung Ayatei, Digikotu, Piyakedimi, Yinudoba dan Kampung Epanai, Distrik Tigi Barat, Kabupaten Deiyai dianggap sebagai musibah.<sup>109</sup> Hal itu dinyatakan oleh salah satu anggota DPR Papua Laurens Kadepa, Senin (17/7), yang mengatakan kasus itu merupakan sebuah musibah karena kematian anak-anak itu disebabkan oleh berbagai jenis penyakit.

---

<sup>106</sup>Laporan SKPKC Fransiskan Papua tentang meninggalnya Balita di Distrik Tigi Barat, Kabupaten Deiyai, bdk. <http://fransiskanpapua.org/2017/11/14/papua-darurat-kesehatan/>

<sup>107</sup> Bdk. <https://deiyaikab.go.id/page/18/1klim.htm> dan [https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten\\_Deiyai](https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Deiyai)

<sup>108</sup>Berdasarkan data yang diupdate per-Maret 2016, jumlah Puskesmas ada 5 (masing-masing di setiap distrik), Balai Pengobatan berjumlah 3 (ada di Distrik Tigi Barat, Tigi Timur dan Bowobado), sedangkan Pustu berjumlah 4 (di Distrik Tigi, Tigi Barat (2 Pustu) dan Tigi Timur), bdk. <https://deiyaikab.bps.go.id/statictable/2016/03/31/18/jumlah-puskesmas-dan-balai-pengobatan-menurut-kecamatan-di-kabupaten-deiyai-tahun-2009-.html>

<sup>109</sup>Laporan SKPKC Fransiskan Papua tentang meninggalnya Balita di Distrik Tigi Barat, Kabupaten Deiyai, bdk. <http://fransiskanpapua.org/2017/11/14/papua-darurat-kesehatan/>

“Selain itu, saya sebut ini musibah bukan wabah, karena bayi dan balita itu meninggal bukan hanya dalam waktu sepekan atau dua pekan, tapi sejak Mei hingga Juli 2017. Sudah beberapa bulan terjadi tapi seakan-akan tidak ada upaya pencegahan.”<sup>110</sup>

Dokter Selvius Ukago yang merupakan ketua tim dari Dinkes untuk kasus Deiyai berdasarkan hasil temuan timnya menyimpulkan kematian 31 orang Balita (terhitung Mei, Juni dan Juli 2017) karena menderita 7 jenis penyakit yang berbeda. Ketujuh jenis penyakit itu diantaranya ISPA, diare, malaria, disentri, cacingan, pneumonia, bronkiale dan serampak/campak.<sup>111</sup> Sedangkan data yang dihimpun oleh SKPKC FP dari pihak Gereja Katolik setempat jumlah Balita yang meninggal berjumlah 42 anak (lihat tabel 1).

Tim kesehatan baru mulai beraksi ketika mendengarkan kabar kematian tersebut. Tim kesehatan yang terdiri dari Distrik Tigi Barat, Puskesmas, Satgas Kaki Telanjang dan Dinas Kesehatan Deiyai mulai bergerak melakukan penanganan terhadap peristiwa tersebut. Tim Kesehatan baru melakukan aksinya pada Juli 2017.

**Tabel 1. Nama-nama anak Usia Balita yang meninggal Mei-Juli 2017 di Distrik Tigi Barat, Kabupaten Deiyai**

No	Nama	Meninggal	Usia
1	Mabi Pigome	7 Mei	1 bulan
2	Yulita Pigome	7 Mei	1,1 tahun
3	Yose Goo	11 Mei	5 bulan
4	Nofita Douw	11 Mei	4 bulan
5	Theodorus Badi	13 Mei	5 bulan
6	Amakatedou Bobii	29 Mei	1,7 tahun
7	Jonas Bobii	30 Mei	1,3 tahun
8	Yonas Pigome	2 Juni	3,3 tahun
9	Yulmina Pigay	3 Juni	1,3 tahun
10	Depian Badi	7 Juni	6 bulan
11	Badiwene Badi	9 Juni	2 bulan
12	Maria Giyai	10 Juni	6 bulan
13	Pigomeumau Pigome	10 Juni	6 bulan
14	Otopina Giyai	10 Juni	8 bulan
15	Yosias Goo	10 Juni	1,10 tahun

<sup>110</sup> Bdk. <https://www.tabloidjubi.com/artikel-7863-kasus-deiyai-bukan-wabah-tapi-musibah.html>

<sup>111</sup> Bdk. <https://www.tabloidjubi.com/artikel-7755-kematian-lebih-30-balita-di-distrik-tigi-barat-akibat-7-jenis-penyakit.html>

No	Nama	Meninggal	Usia
16	Martina Bobii	10 Juni	1 bulan
17	Antasia Pigome	11 Juni	8 bulan
18	Meliana Goumau Goo	11 Juni	8 bulan
19	Yuliana Badi	16 Juni	11 bulan
20	Wenedega Bobii	17 Juni	7 bulan
21	Lina Goo	20 Juni	2,2 tahun
22	John Pekei	20 Juni	6 bulan
23	Agustina Pigome	20 Juni	1,7 tahun
24	Selina Bobii	21 Juni	2,1 tahun
25	Melince Pigome	24 Juni	1 bulan
26	Periska Agapa	25 Juni	2,2 tahun
27	Mariance Bobii	25 Juni	1,11 tahun
28	Pince Ukago	1 Juli	1,3 tahun
29	Yanuarius Goo	2 Juli	1,6 tahun
30	Yunias Pakage	2 Juli	1 bulan
31	Akupince Badi	4 Juli	1,1 tahun
32	Yohan Very Pekei	4 Juli	1,9 tahun
33	Mariana You	8 Juli	8 bulan
34	Marselina Badi	8 Juli	8 bulan
35	Yulita Agapa	9 Juli	2,2 tahun
36	Pekeimaga Pekei	9 Juli	1,2 tahun
37	Yuliana Badi	10 Juli	3,2 tahun
38	Sela Badi	10 Juli	2 bulan
39	Yupiana Badi	10 Juli	10 bulan
40	Yohanes Pigome	10 Juli	9 bulan
41	Yupinia Badi	11 Juli	1,7 tahun
42	Dominikus Pigome	20 Juli	7 bulan

## Keseharian Pelayanan di Daerah Terkena Musibah

Pada akhir 2016 ada kejadian serupa di Kampung Wagomani dan Deimago, dimana belasan orang meninggal dunia karena penyakit. . Sekitar 15 orang meninggal. Menurut keterangan dari salah satu petugas Gereja Katolik setempat Melkias Giay, jumlah yang meninggal sekitar 15 orang, sebagian besar bayi.<sup>112</sup> Namun kejadian ini memang tidak diberitakan ke publik oleh media.

<sup>112</sup> Hasil wawancara Albertus Vebrianto (tim investigasi SKPKC FP) dengan salah satu petugas Gereja Katolik di Deiyai Melkias Giay

Ada empat Puskesmas di Tigi Barat, yang terletak di Tenedagi, Ayatei, Gakokebo dan Wagomani. Menurut pengakuan masyarakat dan pengamatan yang dilakukan di Puskesmas tersebut hanya terdapat petugas kesehatan, tidak ada dokter. Selain Puskesmas ada juga dibangun Pustu di beberapa kampung, namun tidak ada petugas kesehatan di sana.

“Di kampung-kampung ada Pustu, tapi hanya gedung, tidak ada prasarana medis dan obat-obatan. Hanya klinik yang dikelola Gereja yang menyediakan layanan. Obat-obatan dan tenaga disediakan dari Gereja. Bangunan Pustu di kampung-kampung itu jadi kandang kambing dan babi.”<sup>113</sup>

Melkias Giay masih menceritakan bahwa petugas-petugas kesehatan di Pustu dipindahtugaskan oleh Bupati Dance Takimai. Pada tahun 2016 lalu, secara serentak petugas-petugas kesehatan ini dipindahkan ke Satuan Polisi Pamong Praja. Ternyata bukan hanya petugas kesehatan tetapi beberapa guru juga dipindahkan menjadi pegawai di bagian kesejahteraan DPRD Kabupaten Deiyai. Beni Ukago yang sudah bertahun-tahun menjadi guru dipindahkan ke bagian logistik Badan Penanganan Bencana Daerah<sup>114</sup>.

Kekurangan tenaga dan pelayanan kesehatan ini telah berdampak negatif bagi masyarakat yang ingin berobat. Masyarakat lebih memilih berobat ke RSUD di Madi daripada di RSUD Waghete. Walaupun jaraknya cukup jauh dan persoalan moda transportasi.

### **Keterlambatan Bantuan Medis, Persoalan Wabah, dan Kontestasi Politik**

Tim Medis dari Dinas Kesehatan (Dinkes) baik Kabupaten, Provinsi maupun Pusat baru mengetahui peristiwa kematian ini pada Juli 2017, tujuh bulan sesudah peristiwa terjadi pada Januari 2017. Penilaian yang disampaikan oleh pihak Gereja Katolik terhadap pelayanan tenaga medis kiranya menjadi gambaran bagaimana pelayanan kesehatan bukan saja di Deiyai tetapi di pedalaman Papua yang lainnya.

“Pemerintah Deiyai sudah bangun Pustu di beberapa kampung, tetapi pelayanan dari para medis dan Dinas Kesehatan tidak ada selama ini, kami hanya melihat gedung saja, tidak ada prasarana medis dan obat-obatan, hanya yang ada di kampung-kampung adalah rumah Pustu tanpa pelayanan medis. Rumah itu, menjadi kandang dan kotoran kambing dan babi.”

Seandainya pelayanan kesehatan selama ini berjalan dengan baik, pasti tidak ada Balita yang meninggal. Musibah di Tigi Barat ini mengundang banyak perhatian dari

<sup>113</sup> Hasil wawancara Albertus Vebrianto (tim investigasi SKPKC FP) dengan salah satu petugas Gereja Katolik di Deiyai Melkias Giay

<sup>114</sup> Hasil wawancara Albertus Vebrianto (tim investigasi SKPKC FP) dengan Beni Ugako



berbagai kalangan, baik dari pihak medis maupun dari beberapa tokoh masyarakat. Mereka begitu gemar melakukan kunjungan ke kampung-kampung pasca kejadian tersebut. Para kader atau tokoh publik atau politik ini menerangkan ke keluarga korban seolah-olah mengetahui persoalan yang terjadi. Jarang sekali dari mereka menyingung perkara mangkirnya petugas kesehatan dari tempat tugas, tidak ada vaksinasi dan imunisasi yang diberikan.

Bupati Dance Takimai begitu mudah menerangkan bahwa kejadian ini merupakan sebuah musibah. Penjelasan ini seolah 'menghasut' pemahaman masyarakat dan publik bahwa kejadian ini di luar kendali manusia. Sebenarnya tidaklah demikian. Para Balita itu dapat diselamatkan ketika mendapatkan perawatan dan imunisasi yang tepat. Di lain sisi, pandangan tersebut mengkambinghitamkan masyarakat. Pola laku masyarakat yang tidak benar dan tidak sehat yang menyebabkan musibah tersebut. Kita boleh berargumen, seandainya tuduhan demikian, berarti masyarakat di Tigi Barat sudah lama menjadi punah.

### Kematian di Lanny Jaya

*“Saya punya Bapak sakit selama satu minggu. Bapak rasa batuk-batuk, sakit kepala dan semua badannya sakit baru dia meninggal. Saya ke Tiom untuk beli obat, tapi obat itu tidak bisa sembuhkan saya punya bapak.”<sup>115</sup>*

Billir Wanimbo bersaksi terhadap kematian ayahnya, Tiber Wanimbo, yang meninggal dunia pada Kamis, 20 April 2017 lalu karena sakit. Billir menceritakan usahanya menyembuhkan sakit yang diderita oleh ayahnya, namun tak berhasil karena kesulitan mendapatkan akses kesehatan yang layak. Obat yang ditebusnya tak mampu mengobati sakit yang diderita sang ayah.

Tiber Wanimbo adalah satu kisah dalam peristiwa kematian karena suatu penyakit di daerah Lanny Jaya pada April 2017 lalu. Beberapa media cetak dan online sempat melaporkan masyarakat yang meninggal dunia dalam peristiwa tersebut sebanyak 37 orang,<sup>116</sup> sedangkan dari penelusuran investigasi SKPKC Fransiskan Papua jumlah korban yang meninggal dunia berjumlah 19 orang.<sup>117</sup>

115 Hasil wawancara dengan Billir Wanimbo oleh tim koalisi (Frengki Making)

116 Bdk. <http://www.tabloid-wani.com/2017/04/37-warga-meninggal-di-lanny-jaya-diduga-karena-langkahnya-air-bersih.html> & <http://www.harianpapua.com/miris-37-orang-meninggal-di-lanny-jaya-karena-diare/>, Koran Cenderawasih Pos, Jumat 28 April 2017

117 Bdk. Laporan Koalisi, masyarakat yang meninggal yang berasal dari 4 Kampung dengan total berjumlah 19 orang. Sedangkan di Kampung Indawa tidak ada korban jiwa yang meninggal. Nama-nama yang meninggal di Kampung Eyune: Aiman Wanimbo (24 thn), Nus Wanimbo (23 thn), Pendina Wanimbo (37 thn), Tulem Wanimbo (41 thn), Temegi Wanimbo (47 thn). Di Kampung Uragabur: Mar Wanimbo (38 thn), Mes Wenda, Pandina Wanimbo, Merry Wanimbo (35 thn), Enos Kogoya (43 thn). Di Kampung Tinggira: Tiber Wanimbo (33 thn), Digen Wanimbo (41 thn), Bato Wenda (39 thn), Sisa Wenda (37 thn), Pite Wanimbo (13 thn), Etemeliakwe Komba (38 thn), Tayampam Wanimbo (39 thn), Umbinus Wanimbo (36 thn), Jubiter Wanimbo (41 thn).

Kepala Kampung Eyuni Yarak Wenda mengatakan bahwa masyarakat di kampungnya sudah mengalami kesakitan sejak Januari 2017. Di dalam sebuah keluarga kalau ada lima orang, biasanya dua atau tiga orang yang mengalami sakit. Menurut pengakuannya, derita sakit ini mulai dari Kampung Indawa/Umuwak lalu masuk ke Kampung Eyuni, Uragabur, Tinggira dan Nambume. Sejak wabah penyakit mendera di wilayah itu, sudah lima warga di kampung Eyuni yang meninggal dunia. Di antara mereka mengalami sakit mencret (diare).

Derita lainnya yang dialami oleh Kakak beradik Etis Wenda (7 thn) dan Etia Wenda (4 thn). Etis Wenda mengalami sakit yang agak berbeda dengan masyarakat lainnya. Etis Wenda sudah tiga minggu bersahabat dengan sakitnya. Etis Wenda sudah mendapatkan pertolongan dari Mantri Jesman Wanimbo yang berasal dari kampung itu. Adiknya Etias Wenda (4 thn) sudah sakit dua minggu. Badannya terlihat kurus dan setelah beberapa hari mengalami sakit, Etias tidak dapat mendengar lagi hingga saat ini.

Keterlambatan penanganan kasus seperti di Kabupaten Deiyai tampaknya terjadi juga di Kabupaten Lanny Jaya. Petugas kesehatan melakukan tindakan setelah korban kematian itu terungkap ke publik. Pada April 2017 terlihat para petugas kesehatan bersiap membangun posko kesehatan.

“Hari Kamis tanggal 20 April 2017, tenaga kesehatan sudah datang berkunjung ke kampung-kampung untuk obat masyarakat yang sakit. Tapi perintah Kepala Distrik Awina, hari Senin dibangun Posko kesehatan di Puskesmas Distrik Awina di Indawa. Jaraknya sekitar 1-4 Km dari kampung-kampung. Ada beberapa masyarakat yang sakit dan tidak bisa berjalan jauh ke Puskesmas. Padahal jalan masuk ke kampung-kampung sudah dibangun dan semua jenis kendaraan bisa ke lokasi. Kami kecewa karena pelayanan medis kepada masyarakat tidak optimal.”<sup>118</sup>

Mendengar pernyataan Kepala Kampung Yarak Wenda itu berarti kampung-kampung yang terkena musibah bisa dijangkau oleh petugas medis. Kekecewaan yang tergambar dari pernyataan tersebut sudah terjadi bertahun-tahun, dalam waktu yang cukup lama. Dari data yang diperoleh oleh tim investigasi sejak Januari 2017 musibah kematian sudah terjadi di empat kampung tersebut. Hal ini menegaskan bahwa peristiwa itu bukan terjadi pada saat berita kematian di Lanny Jaya itu terungkap di beberapa media.

---

<sup>118</sup> Pernyataan Kepala Kampung Eyuni, Yarak Wenda ketika diwawancari tim investigasi koalisi kesehatan untuk Lanny Jaya (Frengki Making).

## Sumber Air menjadi penyebabnya?

Kepada [tabloidjubi.com](http://tabloidjubi.com), Sekretaris Daerah Lanny Jaya Christian Sohilait mengatakan bahwa masyarakat terserang diare karena sumber air yang mereka konsumsi. Masyarakat meminum air tadah hujan yang ditampung. Masyarakat mengkonsumsi air yang tidak dimasak dan tercampur dengan kotoran binatang dan manusia. Pihak Pemda Lanny Jaya juga telah mengirim tim medis untuk membantu meringankan penderitaan masyarakat.

Pernyataan Sekda Lanny Jaya Sohilait ini tidak serta merta menggambarkan semua penyakit yang diderita oleh masyarakat di tiga kampung itu. Bagaimana dengan korban Etias Wenda yang tidak bisa lagi menggunakan indra pendengarannya? Bagaimana dengan Welina Wanimbo yang (saat itu) sudah dua minggu menggunakan tongkat untuk berjalan?

Pengakuan Bapak Yutin Wanimbo dari Kampung Eyune bahwa air yang mereka minum selama ini adalah salah satu sumber air yang mengalir dari pegunungan, bukan sumber air dari proses tadah hujan. Sudah bertahun-tahun dan selama ini pola hidup masyarakat belum berubah. Air yang disediakan oleh alam tidak menyebabkan pelbagai jenis gejala penyakit yang sempat diberitakan. “Untuk minum kami timba air dengan jerigen. Air itu kami ambil di kali, jaraknya sekitar 20 meter dari honai (rumah). Air itu keluar dari mata air pegunungan.”

### c. Kampung Kwarja: Potret Kesehatan di Kabupaten Tertua Provinsi Papua

Kampung Kwarja merupakan salah satu kampung yang secara administrasinya berada di Kabupaten Jayapura. Sekilas informasi, Kabupaten Jayapura adalah kabupaten tertua di Provinsi Papua. Secara sah ditetapkan sebagai sebuah kabupaten atau daerah otonom pada tahun 1969 berdasarkan UU No. 12 tahun 1969.<sup>119</sup> Berdasarkan tahun berdirinya berarti sudah sekitar 48 tahun proses berjalannya Pemerintahan Kabupaten Jayapura. Dari sekian banyak kampung yang ada, Kampung Kwarja juga berada di dalamnya. Berdasarkan informasi yang diperoleh SKPKC Fransiskan Papua, Kampung Kwarja salah satu kampung masyarakat asli yang didiami oleh Suku Elsheng. Pada awalnya beberapa tokoh masyarakat di Kwarja sempat dikejar dan dicap sebagai pasukan OPM. Kampung Kwarja sendiri terdiri dari Kampung Tua, Kampung Induk (Kwarja) dan Kampung Baru.<sup>120</sup> Informasi tentang Kampung Kwarja sangat minim diperoleh baik itu di media internet maupun media cetak.

<sup>119</sup> Bdk. <http://www.kemendagri.go.id/pages/profil-daerah/kabupaten/id/91/name/papua/detail/9103/jayapura>

<sup>120</sup> Hasil riset SKPKC Fransiskan Papua

Sekarang dan saat ini Kampung Kwarja sudah resmi menjadi salah satu kampung di wilayah administrasi Distrik Yapsi dan Kabupaten Jayapura. Itu berarti masyarakat Suku Elsheng berhak mendapatkan perhatian dan pelayanan publik dari pemerintahan di Kabupaten Jayapura. Kampung Tua terletak sekitar 25 Km dari Kampung Induk Kwarja. Di Kampung Tua, kehidupan masyarakat kebanyakan bergantung pada alam atau hutan. Berburu hewan merupakan salah satu keseharian hidupnya untuk mendapatkan asupan makanan. Selain itu, untuk memenuhi kebutuhan makanan sehari-hari, masyarakat di Suku Elsheng itu memanfaatkan hasil berkebun seperti jenis umbian (petatas, keladi), tepung sagu dan buah-buahan yang ada. Kampung Kwarja adalah kampung yang wilayahnya sangat luas dibandingkan dengan kampung-kampung lainnya di wilayah administrasi Distrik Yapsi.

Akhir tahun 2015, Pemerintah Provinsi Papua melalui Dinas Sosial membuka keterisolasian dengan membangun sebuah kampung baru. Kampung baru ini sekarang lebih dikenal dengan sebutan Kampung Baru atau Jembatan Dua.<sup>121</sup> Berjalannya waktu, walaupun sudah direlokasi, pelayanan dasar kesehatan masih sangat jauh dari harapan.



Kondisi Puskesmas pembantu (Pustu) di Kampung Kwarja, kabupaten Jayapura. Foto: Arsip SKPKC Fransiskan Papua

121 Hasil wawancara dengan Kepala Kampung Kwarca Soleman Mapo, 29 Juli 2015.

## **Petugas Medis Hanya di Daerah Transmigrasi**

Sudah hampir belasan tahunan tidak ada pelayanan kesehatan di Kampung Kwarja. Di Kampung Kwarja terlihat sebuah bangunan Pustu yang dihiasi dengan tingginya rumput dan tidak ada petugas kesehatan yang menetap di sana.<sup>122</sup> Pusat Layanan Kesehatan ini sudah dibangun sejak tahun 2005. Masyarakat Kwarja kadang berobat ke Puskesmas Satuan Pemukiman (SP) V atau ke Puskesmas SP I. Masyarakat harus menempuh sekitar 5 km ke Puskesmas SP V (Kampung Bumi Sahaja) atau sekitar 15 km ke Puskesmas SP I (Kampung Takwa Bangun) untuk berobat. Kedua wilayah ini merupakan pemukiman masyarakat transmigrasi. Baru sekitar dua tahun terakhir (2016-2017), akses jalan ke Kampung Baru dibuka.

Pertengahan tahun 2015, dalam pertemuan dengan SKPKC Fransiskan Papua masyarakat di Kampung Kwarja mengharapkan pembangunan jalan sampai ke Kampung Induk (Kwarja). Alasannya, sumber kehidupan perekonomian (hasil kebun dan pertanian) ada di Kampung Induk. Dalam perjalanan waktu (akhir tahun 2016 – 2017), pemerintah hanya membukanya sebatas di Kampung Baru/Jembatan Dua.

Di Kampung Baru/Jembatan Dua ini belum ada bangunan Pustu seperti di Kampung Induk (Kwarja). Petugas kesehatan sampai saat ini tidak ada. Berdasarkan pengakuan Kepala Distrik Yapsi Kornelis, sebenarnya ada dua petugas kesehatan yang ditempatkan di Kampung Kwarja. Karena pertimbangan jaraknya jauh dan petugas medisnya adalah perempuan – dengan keputusan sepihak dan seolah-olah bertindak sebagai Pihak Dinkes Kabupaten Jayapura – Kepala Distrik menempatkan kedua petugas itu di Puskesmas SP I.

“Kalau ada masyarakat yang sakit, kadang saya atau masyarakat lain yang antar ke Puskesmas SP V atau SP I. Saya sering jemput petugas di Puskesmas SP V. Kalau mereka buat alasan, saya mengamuk (marah) di sana baru mereka datang melayani. Tapi sekarang mereka sudah terbiasa dan ketika kami butuh, mereka kami jemput untuk layani pasien di sini.”<sup>123</sup>

Pola kehidupan masyarakat dan keterbatasan pengetahuan kesehatan menjadikan masyarakat berpasrah pada keadaan yang dialaminya. Masyarakat menjadi tidak mengerti mengapa ketiadaan petugas kesehatan hingga saat ini.

“Posyandu bangunan sudah ada tetapi istilahnya tenaga kerja medis sampai sekarang ini tidak ada. Kendalanya dimana kita juga tidak mengerti, mungkin tidak ada yang dikhususkan kerja di kampung ini. Selain itu kalau melakukan rapat di kampung induk Kwarja di sana susah untuk berkumpul karena pengaruh jalan yang

---

<sup>122</sup> Berdasarkan Laporan Profil Distrik Yapsi tahun 2015, dikatakan bahwa di Kampung Kwarca ada sebuah Posyandu.

<sup>123</sup> Hasil wawancara dengan Sekretaris Kampung Kwarca Matius Glom, 28 Juli 2015

sulit. Di kampung lama juga sudah ada Pustu tetapi sampai sekarang tidak ada tenaga medis yang bekerja. Kalau ada yang sakit parah, contohnya seperti sakit malaria. Malaria tropika atau tersiana +1 kita masih bisa bekerja. Kalau sudah lebih dari itu berarti kita sudah tidak bisa bekerja lagi.”<sup>124</sup>

Tidak berjalannya pelayanan kesehatan masyarakat di kampung-kampung masyarakat asli Papua seperti di Kwarja dan lainnya, memberikan gambaran kepada kita bahwa pelayanan kesehatan di Tanah Papua masih sangat buruk. Kampung Kwarja, beberapa kampung di Kabupaten Deiyai dan Kabupaten Lanny Jaya, menjadi potret suram dan gelapnya kesehatan di Tanah Papua. Merujuk pada Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 741/MENKES/PER/VII/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Di Kabupaten/Kota, menghimbau agar 14 item layanan dasar dilakukan.<sup>125</sup>

Masyarakat yang berusia Balita di Lanny Jaya dan Deiyai tidak mendapatkan salah satu layanan yang sudah diatur di dalam perundangan tersebut. Petugas kesehatan di daerah pedalaman Papua masih lalai dengan tugas layanan medisnya. Pemerintah dengan anggarannya ‘berfoya-foya’ membangun fasilitas layanan kesehatan tanpa disertai pelayanan yang maksimal. Kurangnya kontrol sosial dari Dinas Kesehatan (provinsi dan kabupaten) berdampak pada mangkirnya petugas di lapangan. Situasi ini tetap mengorbankan masyarakat.

Berbagai usaha harus dilakukan oleh Pemerintah (Dinas Kesehatan). Mengontrol serius setiap petugas yang ditempatkan di daerah-daerah dan memberikan layanan minimal dalam penanganan persoalan kesehatan di masyarakat. Pemerintah dan petugasnya harus menanamkan sikap empati dan rela berkorban seperti janji yang mereka ucapkan. Situasi dan kondisi masyarakat yang parah bukan dibiarkan dan dijadikan situasi ‘ciptakan Timsus’ (berujung pada kucuran dana atau uang). Di beberapa kejadian, biasanya ada persoalan dulu baru pemerintah dan petugasnya turun dan sibuk mendatangkan obat-obatan. Sibuk berkunjung dan memberikan penguatan kepada pasien atau masyarakat yang menjadi korban.

---

124 Wawancara dengan Kepala Badan Musyawarah Kampung Kwarca Imanuel Kause, pada tanggal 14 Juli 2017. Selain malaria, beberapa jenis penyakit yang dialami masyarakat di Kampung Kwarja adalah paru-paru basah, gejala batuk keras dan berlendir, kaki gajah, tunarungu (tidak mendegar), pembengkakan pembuluh darah sekitar wajah, asam lambung, sesak nafas.

125 Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 741/MENKES/PER/VII/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Di Kabupaten/Kota, ada 14 item yang harus dijalankan oleh pemerintah di Kabupaten/Kota seperti cakupan pelayanan anak Balita, imunisasi, pelayanan gizi buruk dan lainnya. Sedangkan merujuk pada UU Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Pasal 15 menjelaskan bagaimana Pelayanan Publik itu dilakukan.



#### **d. Saminge: Buruknya Pelayanan di Daerah Otonom Baru**

Kabupaten Yahukimo merupakan sebuah Daerah Otonom Baru (DOB) yang dimekarkan dari Kabupaten Jayawijaya pada tahun 2002 (15 tahun silam). Keputusan pemekaran DOB Yahukimo berdasarkan UU No. 26 tahun 2002 dan diresmikan pada 11 Desember 2003.<sup>126</sup> Dari empat puluh lima Distrik yang ada, salah satunya adalah Distrik Saminge. Berkunjung ke Distrik Saminge dari Ibukota Kabupaten Jayawijaya, Wamena, harus melalui jalur udara. Tidak ada jalur darat dan air. Transportasi dengan jasa penerbangan tidak setiap hari ada. Masyarakat di Saminge yang hendak ke daerah lainnya belum tentu semuanya menggunakan jasa pesawat, kecuali PNS dan yang memiliki uang. Masyarakat biasa bisa ke daerah lain dengan berjalan kaki. Perjalanan kaki ditempuh selama berjam-jam, bahkan berminggu-minggu. Kalau dari Ibukota Kabupaten Yahukimo, Dekai, lebih jauh ketimbang dari Wamena.

Pada Selasa, 27 September 2017, seorang kader kesehatan Habel Lokon memberikan laporan tentang kematian warga di Distrik Saminge ke Pater Jhon Jonga, Pr. Berdasarkan data yang diterima terdapat 48 warga meninggal. Kematian ini terjadi di 8 kampung dari bulan Januari – Agustus 2017.<sup>127</sup> Pada Selasa, 17 Oktober 2017, laporan keduanya menyusul terkait kematian warga di Distrik Saminge. Berdasarkan laporan kedua jumlah warga yang meninggal adalah 16 warga sejak September – Oktober 2017. Warga yang meninggal mengalami sakit, seperti kaki bengkak, kulit badan terkelupas, dan rambut rontok.<sup>128</sup>

Kalau kita melihat beberapa tahun sebelumnya, peristiwa kematian ini pernah terjadi. Pada April 2013 silam terungkap sekitar 61 warga di Distrik Saminge meninggal dunia.<sup>129</sup> Pada kesempatan tersebut juga pihak Dinas Kesehatan sempat menurunkan tim untuk menangani kasus tersebut. Salah satu persoalan yang sempat terungkap pada saat itu adalah banyak petugas kesehatan lebih memilih untuk tinggal di Ibukota Dekai ketimbang ke tempat tugasnya di Distrik Saminge.

Persoalan di tahun 2013 tersebut terulang kembali pada 2017. Laporan awal oleh seorang kader kesehatan bahwa sebanyak 48 warga meninggal karen sakit. Kalau ditambahkan dengan data kedua yang dihimpun pada September – Oktober 2017 sebanyak 16 warga berarti sudah 64 warga yang meninggal selama 2017. Berdasarkan laporan yang dihimpun oleh Yayasan Teratai Hati Papua (YTHP) yang turun bekerja sama dengan ikatan dokter dari Rumah Sakit Dian Harapan Jayapura

---

<sup>126</sup> Bdk. [https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten\\_Yahukimo](https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Yahukimo)

<sup>127</sup> Bdk. Laporan Kondisi Kesehatan Masyarakat Distrik Saminge oleh Umat Katolik Paroki Hepuba, Stasi Saminge, Oktober 2017 yang tidak dipublikasikan

<sup>128</sup> Ibid.

<sup>129</sup> Bdk. [http://www.bbc.com/indonesia/berita\\_indonesia/2013/04/130410\\_kematian\\_beruntun\\_yahukimo\\_papua](http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2013/04/130410_kematian_beruntun_yahukimo_papua)

ditemukan penyakit dominan yang diderita oleh masyarakat di Kampung Netahua, Helenga, Haleroma, Pona, Hugi Lokon dan Kampung Muke, adalah infeksi saluran pernapasan, nyeri otot, cacing ascaris, batuk kronis, sakit lambung, katarak, mencret, lenting-lenting pada kulit, luka infeksi, susah makan, gatal-gatal dan TB.<sup>130</sup> Menurut penuturan dr. Gany, semua jenis penyakit ini tidak ada yang misterius atau wabah. Namun kalau dibiarkan dalam waktu lama dan tidak terobati akan mengakibatkan kematian.

Jenis penderitaan lainnya adalah warga mengalami kaki bengkak, rambut rontok dan kulit kelupas. Kemungkinan dapat dikatakan sebagai jenis penyakit selulitis dan menjadi cepat drop karena kekurangan asupan gizi. Ditemukan di lapangan di Pustu bahwa banyak obat-obatan yang beredar telah kedaluarsa.<sup>131</sup> Mungkinkah situasi ini dapat ditolong? Mungkinkah berubah?

Para medis (dokter dan perawat) dari Rumah Sakit Dian Harapan Jayapura yang melakukan pelayanan medis di enam kampung di Distrik Saminge selama 6 hari (23-27 Oktober 2017), menemukan beberapa kendala dan tantangan dalam pelayanan mereka. Di dalam laporan mereka menyebutkan bahwa kendala pertama adalah tidak adanya petugas kesehatan di sana. Padahal di Kampung Helenga terdapat sebuah Puskesmas dan satu buah Pustu di Kampung Haleroma.<sup>132</sup> Kendala lainnya adalah kondisi atau topografi dari Distrik Saminge yang berat. Hal lain yang terungkap adalah sanitas, termasuk mengakses air bersih, tidak adanya pendukung kebutuhan gizi yang baik bagi masyarakat. Masyarakat mengandalkan hasil kebun mereka untuk kebutuhan pangan setiap hari.

Distrik Saminge menjadi kisah buruk kondisi kesehatan di pedalaman Papua. Selain Saminge, masih banyak distrik di daerah lain di Tanah Papua yang mengalami kondisi buruk di bidang kesehatan masyarakat. Wilayah lain yang telah terpotret buruknya situasi kesehatan adalah Korowai dan Distrik Yigi, kabupaten Nduga, tentu masih ada daerah lainnya. Semuanya membutuhkan kerja keras dan kesadaran yang tinggi untuk menyelesaikan beragam persoalan buruknya situasi kesehatan tersebut.

---

<sup>130</sup> Op.cit., Laporan Kondisi Kesehatan Masyarakat Distrik Saminge oleh Umat Katolik Paroki Hepuba, Stasi Saminge. Oktober 2017

<sup>131</sup> Ibid.

<sup>132</sup> Bdk. Laporan tim medis Rumah Skait Dian Harapan Jayapura yang melakukan kunjungan dan pelayanan medis di enam kampung di Distrik Saminge



#### e. Orang Dengan HIV AIDS (ODHA)

Persoalan HIV AIDS di Tanah Papua sangat mengkhawatirkan. Hampir setiap tahun pemerintah daerah di kabupaten/kota maupun provinsi, dalam hal ini dinas kesehatan, selalu mengeluarkan data dan informasi tentang HIV AIDS. Di tahun 2016, per Maret 2016, pihak Dinas Kesehatan Provinsi Papua mengeluarkan data Orang Dengan HIV AIDS (ODHA) sebanyak 25.233 orang. Dari 25.233 orang ini, penderita AIDS sebanyak 15.871 dan HIV sebanyak 9.362 orang. Dari total ini sekitar 1.836 orang yang sudah meninggal dunia.<sup>133</sup>

Kasus HIV/AIDS di Tanah Papua sulit dikendalikan, jumlah kasusnya semakin meningkat pada 2017. Dinas Kesehatan Provinsi Papua merilis data jumlah kasus HIV/AIDS hingga 31 Desember 2017 mencapai 32.263 kasus, terdiri dari 11.828 kasus HIV dan 20.435 kasus AIDS. Berdasarkan jenis kelamin, kasus HIV pada laki-laki berjumlah 5.203 dan 10.345 untuk kasus AIDS. Sementara pada perempuan, jumlah kasus HIV sebanyak 6.563 dan AIDS sebanyak 10.055. Lalu ada 62 kasus HIV dan 35 kasus AIDS tidak diketahui identitas berdasarkan jenis kelaminnya.

Dari 32.263 kasus HIV dan AIDS di Provinsi Papua pada 2017, jumlah ODHA yang meninggal dunia jumlahnya signifikan yaitu 1900 orang. Penduduk yang banyak terkena HIV/AIDS dan jumlahnya tinggi berada di Kabupaten Nabire yang jumlahnya mencapai 5923 kasus, yaitu 2207 kasus HIV dan 3716 kasus AIDS. Berikutnya Kota Jayapura yang jumlahnya mencapai 5362 kasus HIV/AIDS; 1301 kasus HIV dan 4061 kasus AIDS. Selanjutnya daerah yang tak kalah tinggi kasusnya adalah Kabupaten Mimika dengan 5294 kasus; 2801 HIV dan 2493 AIDS, dan jumlah yang hampir sama terjadi di wilayah Kabupaten Jayawijaya yang jumlahnya sebanyak 5293 kasus; 1484 HIV dan 3809 AIDS.

Sementara itu kasus HIV/AIDS daerah lain terpantau terus merangkak cukup signifikan, seperti yang terjadi pada Kabupaten Biak, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Merauke. Ketiga wilayah tersebut jumlah kasus yang muncul di atas 2000-an. Di wilayah Kabupaten Biak terdapat 2038 kasus, Merauke dengan 2070 kasus, dan Kabupaten Jayapura berjumlah 2756.

Di Persaudaraan OFM Papua ada sebuah unit karya yang khusus melayani ODHA. Unit ini juga merupakan bagian dari SKPKC Fransiskan Papua. Unit ini terletak di Kota Jayapura, Waena yang biasa disebut Rumah Surya Kasih Waena.<sup>134</sup>

<sup>133</sup> Bdk. <http://www.satuharapan.com/read-detail/read/penderita-hivaidspada-anak-di-papua-tinggi>

<sup>134</sup> Rumah Surya Kasih yang terletak di Kompleks Rumah Sakit Dian Harapan, Waena, Kota Jayapura, merupakan salah satu dari sekian banyak rumah bagi mereka yang disebut ODHA (Orang Dengan HIV AIDS). Awal mula berdirinya rumah bernaungnya ODHA dirintis oleh Bruder Agustinus Adil, OFM. Rencana dan niat untuk mendirikan rumah kasih ini ketika Br. Agus Adil, OFM berjumpa dengan Ibu Yuli (salah satu ODHA) pada tahun 2004. Rumah Surya Kasih ini melayani para ODHA yang direkomendasikan

Rumah Surya Kasih Waena sudah melayani ODHA selama 10 tahun sejak tahun 2007. Pada usianya yang ke-10 Rumah Surya Kasih Waena telah melayani sebanyak 412 ODHA. Dari 412 ODHA, 200-an sudah meninggal dunia. Dari 412 ODHA sebanyak 7 ODHA; 200-an sudah meninggal dunia, di antaranya berusia anak-anak sebanyak 7 orang.<sup>135</sup> Sejak Januari – September 2017, Rumah Surya Kasih Waena melayani 33 ODHA. Cukup mengagetkan dan menjadi sebuah pertanyaan ketika Br. Agus Adil, OFM menceritakan bahwa kebanyakan yang ODHA yang dilayani adalah warga dari daerah Pegunungan Tengah Papua. Berarti HIV AIDS sudah lama dan mungkin juga subur tumbuh di daerah pedalaman Papua.

“Yang kami layani di sini adalah mereka yang kebanyakan dari daerah Pedalaman Papua. Daerah-daerah di wilayah Pegunungan Tengah Papua. Itu berarti di wilayah pedalaman sudah sangat memprihatinkan. Kebanyakan dari perilaku heteroseksual.”<sup>136</sup>

**Tabel 2. Orang Dengan HIV AIDS tahun 2017 (Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Provinsi Papua per-31 Desember 2017)**

Kelompok umur			
Umur	HIV	AIDS	Jumlah
<1	12	37	49
1-14	218	525	743
15-19	1.339	2.200	3.539
20-24	2.789	4.705	7.494
25-49	6.837	11.911	18.748
>50	343	793	1.136
Tdk diketahui	290	264	554
<b>Total</b>	<b>11.828</b>	<b>20.435</b>	<b>32.263</b>

Per-Kabupaten/Kota				
Kabupaten/Kota	HIV	AIDS	Jumlah	Mati
Asmat	0	41	41	6
Biak	541	1497	2038	143
Boven Digoel	79	55	134	16
Deiyai	33	30	63	12
Dogiyai	0	35	35	0
Intan Jaya	4	9	13	0
Jayapura	1220	1536	2756	233

dari Rumah Sakit Dian Harapan Waena

<sup>135</sup> Wawancara dengan Pengurus Rumah Surya Kasih Br. Agus Adil, OFM, 26 September 2017

<sup>136</sup> Wawancara dengan Br. Augustinus Adil, OFM, Selasa 26 September 2017

Per-Kabupaten/Kota				
Jayawijaya	1484	3809	5293	400
Keerom	134	68	202	31
Kep. Yapen	157	438	595	109
Kota Jayapura	1301	4061	5362	181
Lani Jaya	139	198	337	18
Mamberamo Raya	0	16	16	6
Mamberamo Tengah	30	13	43	4
Mappi	30	134	164	31
Merauke	1039	1031	2070	124
Mimika	2801	2493	5294	170
Nabire	2207	3716	5923	316
Nduga	0	1	1	0
Paniai	101	95	196	12
Pegunungan Bintang	84	219	303	11
Puncak	34	9	43	1
Puncak Jaya	44	367	411	52
Sarmi	0	4	4	0
Supiori	14	67	81	2
Tolikara	314	423	737	7
Waropen	20	21	41	7
Yahukimo	18	4	22	4
Yalimo	0	45	45	4
<b>Total</b>	<b>11.828</b>	<b>20.435</b>	<b>32.263</b>	<b>1.900</b>

Kewarganegaraan			
Kebangsaan	HIV	AIDS	Jumlah
Indonesia	11.753	20.405	32.158
Asing	64	21	85
Tidak diketahui	11	9	20
<b>Total</b>	<b>11.828</b>	<b>20.435</b>	<b>32.263</b>

Faktor Resiko			
Faktor Resiko	HIV	AIDS	Jumlah
Heteroseks	11.498	<b>19.804</b>	<b>31.302</b>
Homoseksual	57	41	98
Biseksual	10	20	30
Tranfusi	9	41	50

<b>Faktor Resiko</b>			
<b>Faktor Resiko</b>	<b>HIV</b>	<b>AIDS</b>	<b>Jumlah</b>
Ibu ke anak	155	408	563
IDU	9	10	19
Hemofilia	0	0	0
Tidak	90	111	201
<b>Total</b>	<b>11.828</b>	<b>20.435</b>	<b>32.263</b>

## **Bab 11**

# **Pendidikan: Persoalan Klasik yang Tak terselesaikan**

---

PERSOALAN PENDIDIKAN di Tanah Papua sejalan dengan persoalan kesehatan. Cerita klasik yang sama tentang kekurangan tenaga, mangkirnya petugas dan lemahnya fungsi kontrol terus memberikan dampak buruk bagi perkembangan pendidikan di Tanah Papua. Di awal tahun 2015, warga Kampung Tambat, Kabupaten Merauke mengeluh bahwa proses belajar mengajar di sekolah dasarnya tidak berjalan. Hal yang sama juga terjadi di SMP Negeri Kiwirok, Kabupaten Pegunungan Bintang. Aktivitas belajar mengajar tidak berjalan karena para guru tidak ada di tempat.<sup>137</sup> Di bulan November (4 November 2015), para guru di Kabupaten Dogiyai melakukan aksi demo serentak.<sup>138</sup> Mereka menuntut agar tunjangan kinerjanya sama seperti para petugas medis. Hal ini berdampak pada lumpuhnya pendidikan. Proses pendidikan di sekolah-sekolah di Kabupaten Dogiyai tidak berjalan. Persoalan tunjangan ini juga terjadi di SD Kampung Demoi, Distrik Yokari, Kabupaten Jayapura. Di Kabupaten Merauke, seorang guru Paud Debora Simanjuntak tidak mendapatkan honorinya selama 6 bulan.

Selain persoalan karena guru tidak berada di tempat, proses atau aktivitas belajar mengajar di sekolah harus berhenti karena tuntutan dari masyarakat sendiri. Proses pendidikan di SMKN 1 Sentani, Kabupaten Jayapura berhenti dan terancam tidak mengikuti ujian akhir nasional karena masyarakat pemilik hak ulayat melakukan pemalangan di sekolah tersebut pada 15 April 2015. Persoalan pemalangan oleh masyarakat pemilik ulayat ini hampir terjadi di beberapa daerah di Tanah Papua. Persoalan lainnya yang cukup memprihatinkan adalah datang dari internal lembaga sekolah tersebut. Selasa, 26 Januari 2016, para guru SMA Negeri 1 Sorong mogok mengajar sebagai aksi protes mereka terhadap kepala sekolah dan bendahara sekolah yang tidak transparan dalam mengelola keuangan sekolah.<sup>139</sup>

---

<sup>137</sup> Op.cit., Buku Memoria Passionis tahun 2015 oleh SKPKC Fransiskan Papua, Hal. 11

<sup>138</sup> Ibid.,

<sup>139</sup> Op.cit., Catatan Kronik tahun 2016 oleh SKPKC Fransiskan Papua, Hal. 99, Bdk. Koran Bintang Papua, 26 Januari 2016.

Persoalan di dunia pendidikan terus dicarikan solusinya. Studi banding, peningkatan kompetensi tenaga pendidikan (guru dan SKPD Dinkes Pendidikan) terus dilakukan. Walaupun demikian, terkesan dunia pendidikan juga menjadi lahan bisnis untuk sekelompok orang. Sebut saja di Kampung Kwarja, Distrik Yapsi, Kabupaten Jayapura. Berdasarkan hasil penelitian SKPKC Fransiskan Papua, tidak ditemukan sebuah bangunan sekolah, tidak ada tenaga guru di sana. Di dalam laporan Distrik Yapsi tertuang bahwa di Kampung Kwarja ada sebuah bangunan sekolah dasar dan terdapat tenaga empat orang guru (dua tenaga honor dan dua tenaga PNS).<sup>140</sup> Situasi seperti ini memang sangat memalukan dan sudah terjadi sekian lama di Kampung Kwarja.

Cerita tentang pendidikan lainnya terjadi di Distrik Pronggoli, Kabupaten Yahukimo. Berdasarkan temuan dari SKP se-Papua ketika berkunjung ke Pronggoli, salah satu sekolah tingkat dasar (SD) sudah 18 tahun tidak berjalan (1999-2017). Alasannya seperti biasa ketiadaan tenaga guru. Walaupun demikian, wajah pendidikan di Distrik Pronggoli semakin rusak karena setiap tahun dilaksanakan ujian akhir dari Dinas Pendidikan yang diwakili oleh seorang guru. Anak-anak usia 12-15 tahun dikumpulkan, diberikan ujian dan berhak mendapatkan ijazah tingkat SD. Praktek ini masih terus berjalan hingga saat ini. Pemerintah daerah Yahukimo, khususnya Dinas Pendidikan Yahukimo sepertinya dengan sengaja membiarkan praktek tersebut.

Apakah pola atau sistem pendidikan, khususnya di Tanah Papua bagi orang Asli Papua harus berubah? Pastor Aventinus Jenaru, OFM dalam penelitiannya terkait persepsi dan partisipasi masyarakat dalam pendidikan dengan studi kasus di Suku Kamoro, Desa Hiripau, Kabupaten Mimika,<sup>141</sup> menemukan bahwa masyarakat di Desa Hiripau merasa bahwa pendidikan itu memang sangat penting. Namun masih ada beberapa faktor yang cukup berperan sehingga pendidikan itu tidak berjalan dengan baik dan melemahkan partisipasi masyarakat. Faktor kebudayaan masyarakat setempat, kehidupan sosial, keluarga, kurikulum dan *stakeholder*.

Dari beragam faktor tersebut, ada sejumlah jalan keluar untuk memperbaiki kondisi pendidikan itu, seperti ditawarkan dalam penelitian itu, adalah pertama, pelatihan dan pengembangan belajar-mengajar untuk guru-guru. Kedua, menerapkan sekolah keterampilan kepada anak-anak, supaya anak-anak bisa mengembangkan kemampuan dan talentanya. Ketiga, diusulkan dengan mengembangkan sekolah alam.

---

140 Bdk. Laporan Penelitian SKPKC Fransiskan Papua tahun 2017 dan Profil Distrik Yapsi, Kabupaten Jayapura.

141 Bdk. Persepsi dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pendidikan; Studi Partisipasi Masyarakat Suku Kamoro di Desa Hiripau, Kabupaten Mimika, Papua dalam Pendidikan, 2015; Aventinus Jenaru

## **Bab 12**

# **Hancurnya Bumi, 'Mama dan Rahim' Papua**

---



Tanah adat milik marga Wonijai di Merauke, tampak gundul, karena hutan telah ditebang perusahaan perkebunan sawit. Foto: Chris Paino/Mongabay Indonesia

PEMIMPIN GEREJA Katolik Roma, Paus Fransiskus, melalui Ensiklik “Laudato si” menyerukan kepada segala bangsa dan segenap umat manusia agar menjaga bumi atau alam semesta sebagai “rumah kita bersama”. Seruan Paus ini merupakan respon atas keadaan bumi kita yang menjerit kesakitan lantaran berbagai kerusakan yang ditimpahkan anak-anak manusia. ‘Rahim Papua’ adalah salah satu bagian dari ‘ibu semesta’ yang menjerit kesakitan karena kehancuran dan ancaman serupa untuk masa yang akan datang.



Di Papua, semua suku memberi nama kepada bumi atau tanah ini dengan sebutan terhormat dalam bingkai kekeluargaan yakni “Mama”. Dengan menyebut bumi atau tanah ini sebagai “mama”, kita diajak untuk melihat aspek terdalam dari hakikat “mama” atau “perempuan” yakni “rahim”. Seperti seorang perempuan yang mengandung, menumbuhkan kehidupan dan melahirkan anak, demikian pun bumi ini; ia mengandung, menumbuhkan dan melahirkan berbagai jenis kehidupan. Seperti seorang “mama” yang memberikan air susu kepada anak bayinya, demikian pun bumi ini selalu memberikan air susu, asupan nutrisi kepada segenap kehidupan di Tanah Papua.

Lalu bagaimanakah jadinya bila “rahim” ini dirusak dan dikapitalisasi demi memenuhi kekuasaan dan kepentingan ekonomi kelompok tertentu? Tentu akan ada dampaknya baik terhadap bumi itu sendiri maupun terhadap aneka kehidupan (termasuk manusia) yang menggantungkan hidupnya kepada kemurahan bumi atau alam semesta. Kondisi inilah yang sekarang tengah melanda “rahim Papua”. Rahim Papua dengan keanekaragaman hayatinya yang elok dan mempesona telah direnggut, dicabik dan dieksploitasi demi tujuan sesaat, nafsu serakah dari kelompok tertentu.

Kondisi bumi ‘rahim’ Papua semakin memburuk karena pembangunan di Tanah Papua yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo hanya menitikberatkan pada pembangunan ekonomi dan infrastruktur. Begitu juga dengan Gubernur Papua Lukas Enembe yang membuka lebar-lebar pintu untuk semua investor. Seolah-olah dengan melakukan itu semua perkara selesai. Kenyataannya tidaklah demikian.

Rahim Papua yang elok dan mempesona dengan keanekaragaman hayati menjadi rebutan banyak orang dari berbagai belahan dunia. Para investor dengan kepentingan ekonomi kapitalisnya memandang “rahim Papua” sebagai lahan bisnis yang sangat menjanjikan dan menggiurkan serta memberikan keuntungan yang sebesar-besarnya bagi mereka. Mereka tidak memikirkan dan mempedulikan keselamatan bumi ini (*salus mundi*) dan keselamatan manusia (*salus humanum*) orang asli Papua (OAP), yang tak bisa dipisahkan dari bumi dan alamnya.

Oleh karena itu, dalam pembahasan ini, kami akan menyajikan berbagai fenomena dan fakta kerusakan dan kehancuran bumi (hutan) Papua yang dilakukan oleh para investor dan perusahaan-perusahaan nasional dan berskala besar.

## **Kelapa Sawit Merusak Rahim Papua**

Organisasi lingkungan internasional Greenpeace mencatat hutan Papua yang dirusak berkisar 300 ribu hektare per tahun. Kerusakan itu mencakup wilayah Provinsi Papua dan Papua Barat. Sejumlah perusahaan yang bergerak dalam proyek



perkebunan sawit raksasa dituding sebagai 'dalang' rusaknya hutan di Tanah Papua. Hal itu diketahui ketika pameran gambar kerusakan lingkungan digelar oleh Greenpeace Papua dan Port Numbay Green dalam festival budaya Teluk Humboldt Port Numbay ke IV pada awal Agustus 2012 di Pantai Hamadi, Kota Jayapura.<sup>142</sup>

Salah satu permasalahan yang mendapat perhatian luas adalah hadirnya mega proyek Merauke Integrated Food and Energi Estate (MIFEE) di Kabupaten Merauke sejak 2010 silam. Proyek ini mengambil porsi terbesar kerusakan hutan Papua karena pada tahap pertama hutan yang dibuka untuk lahan itu seluas 228.022 hektare. Proyek ini terbukti merusak ribuan hektar hutan dan menyengsarakan masyarakat asli pemilik lahan. Data Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah dan Perizinan (BKPMDD) Pemerintah Kabupaten Merauke menyebutkan, sekitar 32 perusahaan telah mendapat izin prinsip untuk mengeroyok beberapa sektor unggulan dalam proyek ini.<sup>143</sup>

Di sini sektor Hutan Tanaman Industri (HTI) mendapat porsi lahan terbesar, yakni 973.057,56 hektare. Perkebunan kelapa sawit sebagai sektor unggulan kedua menyerap lahan seluas 316.347 hektare. Untuk perkebunan tebu seluas 156.812 hektare, perkebunan jagung 97.000 hektare, areal tanaman pangan 69.000 hektare, pengolahan kayu serpih 2.818 hektare dan areal pembangunan dermaga 1.200 hektare. Sesuai ijin yang sudah dikeluarkan, total lahan yang akan digunakan sebesar 1.616.234,56 hektare dalam mega proyek MIFEE. Beberapa perusahaan besar yang terlibat dalam proyek ini antara lain; Wilmar, Sinar Mas Grup, Bakrie Sumatera Plantation, Medco, Bangun Cipta Sarana dan Artha Graha. Wilmar mendapat alokasi areal seluas 200.000 hektare. Padahal dalam Cetak Biru Road Map Swasembada Gula Nasional 2010-2014, Wilmar hanya membutuhkan areal seluas 10.000 hektare dengan kebutuhan tambahan areal 10.000 hektare dan kapasitas pabrik 8000 ton per hari.

Mega proyek ini ternyata tidak hanya membalak hutan. Sekretaris Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Kampung Kaiburse Distrik Malind, Paulus Samkakai mengaku, masyarakat adat di kampungnya sebagai cakupan area mega proyek ini pun ditekan Pemerintah agar mengizinkan masuknya investor. Terlebih saat mega proyek ini mulai berjalan. Padahal mega proyek MIFEE di Merauke selain terbukti mendatangkan dampak buruk atas lingkungan, juga membuat masyarakat asli merana. Ini terjadi lantaran hutan sebagai sumber penyedia kehidupan mereka telah dibabat demi kepentingan investasi skala besar.<sup>144</sup> Di Kampung Bupul, Distrik Elikobel, masyarakat adat dari Marga Wonijai harus kehilangan tanah adatnya karena

---

<sup>142</sup> Bdk. <http://sawitwatch.or.id/> "Menuju Keadilan Ekologi Bersama Masyarakat Adat/Lokal, Pekebun Sawit, dan Buruh Sawit", diakses pada 14 September 2017.

<sup>143</sup> Ibid.

<sup>144</sup> Ibid.

tergiur dengan janji manis perusahaan PT Agrinusa Persada Mulia. Lahan sekitar 900-an hektare beralih ke tangan perusahaan dengan pembayaran kompensasi yang tidak wajar. Perusahaan membayar dengan harga yang sangat murah Rp 300.000 per hektare.<sup>145</sup> Total yang diberikan kepada masyarakat adalah 600-an juta rupiah. Simon Wonijai salah satu pemilik tanah ulayat menceritakan bahwa berbagai cara digunakan oleh perusahaan untuk menciptakan perpecahan di masyarakat. Orang tua atau kepala suku dibujuk dan selanjutnya ditekan oleh perusahaan untuk mempengaruhi warganya agar melepaskan tanah ke perusahaan.

Cerita yang sama tidak hanya bagi masyarakat Merauke. Masyarakat asli di Kabupaten Keerom pun mengalami nasib yang sama sejak daerahnya dijadikan wilayah transmigrasi plus areal perkebunan kelapa sawit di tahun 1982. Pada Maret 2012 lalu, masyarakat adat di daerah ini terpaksa memalang pabrik kelapa sawit milik PTPN 2 yang beroperasi di Arso, ibukota Kabupaten Keerom. Pemalangan dipicu penggunaan lahan sawit oleh perusahaan yang melebihi total lahan sesuai kesepakatan awal dan pihak PTPN 2 juga belum melunasi pembayaran tanah yang digarap.<sup>146</sup>

Masyarakat Asli Keerom melalui Ketua Dewan Adat Keerom, Servo Tuamis menjelaskan, lahan kelapa sawit di Arso yang sementara digarap perusahaan kelapa sawit PTPN 2 luasnya mencapai 50.000 hektare lebih. Padahal sesuai kesepakatan sebelumnya, tanah yang dilepas pemerintah atas persetujuan masyarakat tak seluas itu. Menurut Bapak Servo, tuntutan masyarakat mengacu pada kesepakatan tanggal 19 Oktober 1982 silam, saat Keerom masih menjadi salah satu distrik dari Kabupaten Jayapura. Dalam kesepakatan itu, Bas Youwe selaku penjabat Bupati Jayapura meminta 5000 hektare areal hutan masyarakat untuk dikelola menjadi lahan kebun sawit Arso.<sup>147</sup>

Namun kenyataannya di lapangan berbeda. Perusahaan sawit justru mengelola 50.000 hektare lebih. "Ini tidak dibayar sehingga jadi masalah sampai saat ini," tutur Servo kesal. Untuk menangani masalah sawit Arso, Pemda Provinsi Papua ikut turun tangan. Kepala Bagian Pertanahan Provinsi Papua, Petrus Korwa menuturkan, pihaknya sudah berupaya mengundang perusahaan dan perwakilan masyarakat guna membicarakan masalah ini. Tapi tak satu pun pihak yang diundang hadir. Kini 30 tahun sudah berlalu, dimana PTPN 2 telah berjaya dengan memabat hutan, memperluas lahan dan mengelola perkebunan Sawit di Arso Kabupaten Keerom.<sup>148</sup>

---

145 Bdk. <https://awasmiffee.potager.org/?p=1585&lang=id>

146 Ibid.

147 Ibid.

148 Ibid.

## Sawit Meluas

Perkebunan sawit berskala raksasa sejauh ini sudah terbukti mendatangkan masalah lingkungan dan malapetaka bagi masyarakat pemilik lahan dari aspek sosial. Di wilayah Sumatera dan Kalimantan, misalnya, keberadaan perkebunan sawit dalam jumlah besar justru berdampak penghancuran ribuan hektare hutan primer di kedua wilayah itu. Akibatnya, masyarakat lokal sebagai pemilik lahan yang tadinya bisa hidup tenang hanya dengan bergantung dari hasil hutan, berubah pola hidupnya menjadi buruh perkebunan sawit dengan upah rendah.<sup>149</sup>

Setelah hutan Sumatera dan Kalimantan dijarah habis-habisan, yang tersisa saat ini hanyalah hutan Papua. Sebagai pemilik hutan tropis yang relatif masih utuh bersama keindahannya, hutan Papua mulai terancam karena dincar banyak pihak. Dalam hal ini tidak hanya perusahaan pemegang HPH yang tertarik mengeksploitasi kayu. Perusahaan-perusahaan perkebunan sawit nasional, swasta, hingga perusahaan sawit asing (Malaysia dan Korea) mulai melirik Tanah Papua sebagai daerah baru ekspansi lahan sawit.<sup>150</sup>

Bayangkan, tak sampai sepuluh tahun, sudah hadir ribuan hektare kebun sawit baru di sejumlah wilayah. Misalnya untuk wilayah Provinsi Papua, PT. Tandan Sawita Papua, anak perusahaan PT. Rajawali Grup, telah hadir dengan memabat hutan di Kabupaten Keerom seluas 18.337 hektare. Para investor dan kapitalis memabat hutan di Kampung Yetti, Kabupaten Keerom untuk dijadikan lahan sawit. Di wilayah Lereh, Kabupaten Jayapura, PT. Sinar Mas Grup (SMG) pada 2010 ikut memabat 5000 hektare lebih area hutan untuk menambah luas areal ribuan hektare kebun sawit lamanya.<sup>151</sup> Ironisnya, jumlah lahan sawit baru di kedua wilayah tersebut belum terhitung dengan pembukaan ribuan hektare kebun sawit baru oleh PTP II Riau di wilayah Garusa Distrik Unurum Guay, Kabupaten Jayapura.

Pada wilayah Provinsi Papua Barat, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah berkoalisi dengan para tokoh masyarakat lokal untuk mengizinkan beberapa perusahaan perkebunan sawit memabat ribuan hektare hutan masyarakat adat sebagai lahan sawit. Sebut saja PT. Henrison Iriana Grup yang leluasa memabat 21.500 hektare hutan di Distrik Klamono Kabupaten Sorong guna dijadikan lahan sawit.

Di Distrik Sidey Manokwari, PT. Medco telah berekspansi dengan resmi mendapat hak konsesi lahan sawit seluas 45.000 hektare, sekitar 1500 hektare di antaranya telah dibabat untuk lahan perkebunan kelapa sawit. Kemudian di Distrik Moswaren,

---

<sup>149</sup> Ibid.

<sup>150</sup> Ibid.

<sup>151</sup> Ibid.

Kabupaten Sorong Selatan, kebun sawit yang direncanakan oleh PT. Rajawali Grup berkisar 23.000 hektare, dengan status tanah sedang dalam proses pelepasan oleh masyarakat adat. Sejumlah lahan sawit baru tersebut belum termasuk calon wilayah konsesi baru yang sedang diproses perusahaan untuk mendapat ijin perluasan.

Perkembangan terbaru ialah masuknya perusahaan perkebunan kelapa sawit PT Nabire Baru di Kabupaten Nabire, Provinsi Papua. Perusahaan ini mulai beroperasi sejak tahun 2011 hingga 2016. Pada September 2016 Greenpeace International mempublikasikan laporan kejahatan perusahaan-perusahaan sawit di Indonesia. PT Nabire Baru, salah satu perusahaan sawit yang beroperasi di hutan adat yang didiami oleh Suku Yerisiam. Greenpeace mencatat pelanggaran PT Nabire Baru, yaitu pertama Deforestasi; pembukaan lahan hutan primer. Pada 2011 dan 2013 beberapa ribu hektar hutan yang dibuka adalah sebagian hutan primer dan gambut. Pada pertengahan 2016, melalui citra satelit Landsat terlihat sekitar 70 persen dari konsesi PT Nabire Baru dibuka dan dibagi dalam blok perkebunan. Kedua, Gambut; pengembangan hutan gambut. Dalam “New Planting Assessment” perusahaan pada 2011 tidak terdapat area gambut yang dibangun perkebunan, namun faktanya membuka lahan gambut untuk area perkebunan sawit. Ketiga, Eksploitasi; terkait pengambilalihan tanah adat tanpa persetujuan dasar informasi di awal tanpa paksaan (FPIC). Perusahaan bekerjasama dengan “pihak netral yang independen”, termasuk politisi lokal, pemerintah daerah, kepolisian daerah dan satuan militer. Hal ini bertentangan dengan prinsip dan kriteria RSPO.<sup>152</sup>

Pada 12 Maret 2017, *tabloidjubi.com* memberitakan bahwa PT Nabire Baru dan PT Sariwana Adhi Perkasa terus memperluas areal pembukaan hutan. Pembabatan hutan ini seperti ‘seorang pencuri’ karena tanpa sepengetahuan pemilik hak ulayat dari suku Yerisiam. “Kami tidak tahu sama sekali. Penambahan tersebut di luar areal yang sudah disepakati bersama. Kami sudah sampaikan bahwa tidak ada penebangan-penebangan hutan lagi untuk dijadikan kebun sawit. Karena masalah dusun belum selesai, tapi dua perusahaan sawit itu terus lakukan pembukaan areal baru.”<sup>153</sup>

Pelanggaran prinsip dan kriteria RSPO yang dilakukan PT Nabire Baru ini diadakan oleh Yayasan Pusaka kepada Sekretariat RSPO di Malaysia, melalui surat pengaduan tertanggal 19 April 2016. Pengaduan ini berdasarkan laporan masyarakat Yerisiam dan temuan-temuan di lapangan, bahwa PT Nabire Baru melanggar prinsip dan kriteria RSPO untuk produksi sawit berkelanjutan, melanggar peraturan dan undang-undang yang berlaku, dan hukum-hukum adat suku Yerisiam Gua – pemilik tanah ulayat.<sup>154</sup>

<sup>152</sup> Bdk. SKPKC Fransiskan Papua, “Papua di Ambang Kehancuran; Beragam Peristiwa dan Fakta Hak Asasi Manusia di Papua 2016”, hal. 65.

<sup>153</sup> Pernyataan Kepala Suku Yerisiam Gua Daniel Yarawobi, Bdk. <http://tabloidjubi.com/m/artikel-4492-ptnabire-baru-dan-ptsariwana-adhi-perkasa-terus-buka-lahan-baru.html>

<sup>154</sup> Ibid.

## 'Rahim Papua' Dijadikan 'Proyek' Pangan Nasional

Papua dinobatkan sebagai salah satu lumbung pangan nasional masa depan. Keinginan tersebut dilontarkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat panen raya padi di Kampung Wanningap Miraf, Distrik Tanah Miring, Kab. Merauke, Papua pada 10 Mei 2015 lalu. Kabupaten paling timur Indonesia ini memiliki lahan datar yang berpotensi untuk pertanian seluas 4,6 juta hektare, termasuk 1,2 juta ha untuk lahan penanaman padi.<sup>155</sup>

Jokowi beralasan, berdasarkan hitungan di atas kertas dengan total lahan 4,6 juta ha, jika dalam setahun mengalami tiga kali panen, maka akan ada 60 juta ton padi yang bisa dihasilkan. Jika bisa dioptimalkan, maka produksi beras nasional akan melimpah dalam jangka waktu 3 tahun ke depan. "Kalau ini berhasil, bukan hanya menjadi lumbung pangan Indonesia. Ketergantungan dunia kepada pangan akan ada di Merauke," katanya. Bahkan Jokowi berniat menjadikan Merauke sebagai pusat pertanian pangan berbasis teknologi modern pertama di Indonesia. Dengan demikian, menurut Jokowi, tepat jika kawasan Merauke ditetapkan juga sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) pangan untuk produksi pertanian. "Dengan demikian, kita tak perlu impor beras kalau pasokan beras kita bertambah besar. Justru kita akan menjadi eksportir beras ke sejumlah negara," katanya.

Namun untuk mengembangkan lahan pertanian berbasis modern perlu dukungan investor. Selain itu juga butuh dukungan masyarakat selaku pemilik lahan, termasuk soal skema bagi hasil dengan investor. Apalagi Presiden melibatkan tenaga TNI untuk membuka lahan; suatu kenyataan yang mudah 'membuat masyarakat gelisah'. Dalam kerjasama mengelola kawasan pertanian, menurut Jokowi, pembagian tugasnya harus jelas. "Pemerintah akan memasok benih, pupuk serta membangun infrastruktur irigasi, jalan, jembatan dan pelabuhan selain juga sarana pendidikan pertanian di kawasan tersebut. Sebaliknya, swasta akan memproduksi beras dengan pola kerjasama inti dan plasma, serta menggaji para petani."

Sementara itu, Menteri Pertanian, Amran Sulaiman mengatakan akan mendukung program menjadikan Papua sebagai lumbung pangan nasional. Untuk itu, di Merauke akan dibangun lahan sawah sebesar 1,2 juta ha selama 3 tahun oleh swasta dan BUMN. Selain itu, di Merauke juga akan dibangun pertanian modern dengan *high technology* yaitu pertanian dengan penggunaan mekanisasi penuh dan menuju pertanian organik. "Sejalan dengan itu, kami berusaha melangkah lebih cepat untuk daulat benih. Karena benih itu penting untuk menaikkan produksi padi".

---

<sup>155</sup> Bdk. <http://m.wv2.tabloidsinartani.com/content/read/bumi-papua-lumbung-pangan-nasional/>, diakses pada 14 September 2017.

Hal senada disampaikan oleh Staf Ahli Gubernur Bidang Kesejahteraan Sosial dan Suber Daya Manusia Annie Rumbiak, di Jayapura, Rabu 12 April 2017. Dalam keterangannya Annie mengatakan Pemerintah menetapkan Provinsi Papua sebagai lumbung pangan nasional guna memenuhi kebutuhan Indonesia akan energi dan pangan ke depan yang meningkat secara signifikan.<sup>156</sup> “Adanya peningkatan ini merujuk pada data Bank Indonesia yang menunjukkan adanya tren pertumbuhan positif kontribusi sektor pertanian, perkebunan dan perikanan terhadap perekonomian di Papua.”

Dengan total luasan wilayah daratan Papua kurang lebih 35 juta hektare di mana sekitar 85 persennya masih tertutup hutan, sehingga kawasan ini berpotensi tinggi untuk menjadi tumpuan pembangunan ekonomi nasional ke depan. “Diharapkan 1,2 juta hektare di Kabupaten Merauke dapat dioptimalisasikan untuk memenuhi kebutuhan pangan setidaknya 30 persen total kebutuhan Indonesia dan mencukupi konsumsi beras bagi wilayah timur.”

Annie Rumbiak menjelaskan hasil produksi dari kawasan ini juga berpotensi untuk menembus pasar internasional, salah satunya pasar terdekat yakni Papua Nugini. Tidak hanya itu potensi lain yang menguntungkan untuk ke depan juga akan menambah atau membuka peluang bagi Papua untuk keluar dari kekurangan pangan dan mahalnya kebutuhan pokok. “Pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam satu dekade terakhir berhasil terjaga pada kisaran rata-rata 4,5 persen hingga 6,5 persen.”

Annie menambahkan dengan kombinasi pertumbuhan ekonomi yang positif dan populasi penduduk terbesar keempat di dunia, kebutuhan Indonesia terhadap energi dan pangan ke depan akan meningkat secara signifikan.

## **Protes dan Penolakan Masyarakat Pemilik Hak Ulayat**

Derasnya arus investasi di Tanah Papua yang mengambil alih tanah masyarakat secara sepihak membakar semangat para pemilik tanah untuk berteriak dan melakukan aksi protesnya. Di Kabupaten Mimika, dimulai pada akhir Tahun 2014, tepatnya 17 Desember 2014, Uskup Keuskupan Timika Mgr. John Philip Saklil, Pr mengeluarkan surat tegurannya kepada Gubernur Provinsi Papua untuk membatalkan izin perkebunan sawit di Timika.<sup>157</sup>

---

<sup>156</sup> Bdk. <http://papuanews.id/2017/04/13/pemerintah-tetapkan-papua-sebagai-lumbung-pangan-nasional/>, diakses pada 14 September 2017.

<sup>157</sup> Surat Teguran Pembatalan Izin Sawit oleh Uskup Keuskupan Timika Mgr. John Philip Saklil, Pr tertanggal 17 Desember 2014. Surat teguran ini difasilitasi oleh SKP Keuskupan Timika yang diserahkan kepada Gubernur Provinsi Papua.

Pembukaan lahan besar-besaran yang dilakukan pada tahun 2008 di Hulu Sungai Kamoro menyebabkan ekosistem terganggu dan pada Juli 2014, kampung masyarakat asli Kamoro seperti Iwaka, Miyoko, Aikawapuka, Timuka dan Kekwa diserang banjir bandang karena meluapnya Sungai Kamoro. Hal ini tidak pernah terjadi sebelum ada pembukaan lahan perkebunan sawit. Di tahun 2017, sepanjang Maret dan April, Front Aksi Masyarakat Adat Independen Timika yang terdiri dari dua Suku Kamoro dan Amungme, aktif melakukan aksi protes terhadap perampasan yang dilakukan oleh PT Freeport. Aksi ini bukan hanya terkait perampasan tanah melainkan juga memprotes perpanjangan kontrak karya PT Freeport.<sup>158</sup>

Pada 5 Juni 2015 masyarakat pemilik ulayat melakukan aksi protes di areal PT Bio Inti Agrindo, Merauke, terkait dengan perampasan tanah mereka. Aksi protes ini mendapat perlawanan dari pihak aparat keamanan (Kopassus) yang menjaga perusahaan tersebut.<sup>159</sup> Di Kabupaten Nabire, pada 19 Januari 2015, Kepala Suku Besar Yerisiam mengirimkan surat kepada Bina Mitra Polres Nabire untuk menarik anggota PAM Brimob yang bertugas di PT Nabire Baru. Surat dibuat karena kehadiran anggota PAM Brimob yang menjaga Perusahaan Nabire Baru telah melakukan teror dan penganiayaan terhadap masyarakat adat setempat.<sup>160</sup> Aksi protes ini terus dilakukan pada tahun 2016 melalui jalur hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura.

Aksi protes masyarakat adat Yerisiam Gua Nabire di PTUN Jayapura dibantu oleh Solidaritas Korban Kelapa Sawit Yerisiam Gua Nabire. Sepanjang persidangan yang dilakukan dari Januari hingga April 2016 di PTUN Jayapura, Solidaritas bersama masyarakat adat Yerisiam Gua mengadakan aksi diam dan damai di luar Gedung PTUN untuk mendukung proses persidangan. Walaupun akhirnya pada 5 April 2016, Hakim PTUN Jayapura memutuskan bahwa PT Nabire Baru yang memenangkan perkara persidangan tersebut. Masyarakat Adat Yerisiam melakukan protes karena lahan mereka dialihfungsikan oleh PT Nabire Baru untuk penanaman kelapa sawit. Hal ini tidak disampaikan dan bermusyawarah dengan masyarakat pemilik ulayat.<sup>161</sup>

---

<sup>158</sup> Bdk. Catatan Akhir tahun 2017: Laporan Bersama (Walhi Papua, JERAT Papua, Pusaka, KP KC Sinode GKI, SKPKC FP, SKP KAME) tentang Perampasan Tanah, Kekerasan dan Deforestasi di Papua.

<sup>159</sup> Laporan SKP KAME yang tidak dipublikasikan.

<sup>160</sup> Bdk. Laporan Kronologis Kehadiran Perusahaan Kelapa Sawit PT Nabire Baru di Yerisiam (<http://fransiskanpapua.org/2017/04/29/laporan-kronologis-kasus-kelapa-sawit-di-nabire/>). Selain aksi masyarakat di Yerisiam, Nabire, masyarakat Nabire juga melakukan perjuangan melalui jalur hukum untuk menggugat dan menuntut agar Gubernur Provinsi Papua Lukas Enembe dapat mencabut SK Gubernur No.142 tahun 2008 tentang izin operasi perkebunan PT Nabire Baru. Sejak Desember 2015 – Mei 2016, masyarakat adat Yerisiam dibantu oleh Solidaritas Korban Kelapa Sawit Yerisiam Gua Nabire. Solidaritas ini terdiri dari Forum Independen Mahasiswa, Gempar Papua, SKPKC FP, KP KC Sinode GKI, LBH Papua, JERAT Papua.

<sup>161</sup> Laporan Kronologis Kehadiran Perusahaan Kelapa Sawit PT Nabire Baru di Yerisiam. Lihat, <http://fransiskanpapua.org/2017/05/15/tipu-daya-pt-nabire-baru-caplok-tanah-adat-yerisiam/>



Di tahun 2016, masyarakat adat Kampung Muting, Distrik Muting, Merauke melakukan aksi protesnya melalui siaran persnya. Siaran pers ini difasilitasi oleh SKP KAME dengan berbagai koalisi masyarakat sipil yang lainnya. Siaran pers yang dikeluarkan pada 22 Juli 2016 ini menuntut kepada petinggi militer (TNI dan Polri) untuk menghentikan bisnis mereka yang bekerja dengan perusahaan dan mendesak Bupati dan Menteri Pertanian untuk melakukan audit sosial terhadap kehadiran perusahaan kelapa sawit PT Agriprima Cipta Persada.<sup>162</sup> Di Kampung Sanegi, Distrik Malind, Merauke, masyarakat terus berhadapan dan menanyakan ke perusahaan PT SIS. Kepala Kampung Sanegi Ernes Kaize pernah ke perusahaan untuk menanyakan data luasan hutan yang dibabat oleh perusahaan. Hal ini dilakukan karena masyarakat adat pemilik ulayat tidak dilibatkan dalam musyawarah.<sup>163</sup>

Pada tahun 2017, aksi protes masyarakat di beberapa wilayah di Tanah Papua terus dilakukan. Pada 22 Maret 2017, Masyarakat Adat Moi dari tiga distrik; Distrik Klaso, Saengkeduk dan Distrik Persiapan Seleko, melakukan aksi pemalangan di perempatan jalan masuk ibukota Distrik Klaso. Masyarakat memilih waktu ini karena bertepatan dengan adanya pertemuan antara Pemda Kabupaten Sorong dan perusahaan sawit PT Mega Mustika Plantation<sup>164</sup>. Masyarakat membentangkan spanduk di jalan yang berisikan tuntutan dan penolakan rencana pembukaan lahan untuk perusahaan sawit di tanah adatnya. Perusahaan sawit PT Mega Mustika Plantation mendapat izin dari Pemda Kabupaten sorong melalui surat keputusan Bupati Sorong No. 66.1/127/2014 tentang izin usaha perkebunan kelapa sawit di lahan seluas 9.835 Ha.

Kemudian pada 8 Juni 2017, sebanyak 60 orang masyarakat adat Yimnawai Gir, sub suku Marab, Abrab dan Manem di Arso, Kabupaten Keerom melakukan aksi protesnya di lokasi PT PN II Arso. Aksi ini dilanjutkan ke Kantor DPRD dan Bupati Keerom. Masyarakat melakukan pemalangan kantor Bupati Keerom. Masyarakat menuntut agar pemerintah dan PT PN II mengembalikan tanah adat seluas 50.000 hektare yang dirampas untuk bisnis perkebunan kelapa sawit.<sup>165</sup>

---

162 Bdk. <https://awasmifee.potager.org/?p=1440&lang=id> dan Laporan SKP KAME yang tidak dipublikasikan

163 Bdk. <https://awasmifee.potager.org/?p=1383&lang=id> dan Laporan SKP KAME yang tidak dipublikasikan

164 Bdk. <https://awasmifee.potager.org/?p=1516&lang=id>

165 Bdk. Catatan Akhir tahun 2017: Laporan Bersama (Walhi Papua, JERAT Papua, Pusaka, KP KC Sinode GKI, SKPKC FP, SKP KAME) tentang Perampasan Tanah, Kekerasan dan Deforestasi di Papua, <http://pusaka.or.id/2017/06/demonstrasi-masyarakat-adat-yimnawai-gir-bupati-tidak-serius-menyelesaikan-hak-masyarakat/>, <https://suarapapua.com/2017/06/09/masyarakat-palang-kantor-bupati-keerom/>



## Bab 13

# Dunia Memantau Pelanggaran HAM Papua

---

BANYAKNYA PELANGGARAN HAM di Tanah Papua yang tidak diselesaikan hingga saat ini berdampak pada derasnya dukungan dan desakan dunia internasional terhadap negara Indonesia. Papua dan persoalan HAM-nya tidak hanya menjadi perhatian dan advokasi lokal dan nasional melainkan sudah menjadi bagian advokasi dunia internasional.

Dalam Forum Universal Periodic Review (UPR) PBB yang terjadi pada Mei 2017 di Jenewa, Swiss, sejumlah negara mempertanyakan niat baik dari Pemerintahan Indonesia untuk menangani derasnya pelanggaran HAM di Tanah Papua. Ada lima negara yang mempertanyakan dan menilai terkait kinerja Pemerintahan Indonesia. Kelima negara tersebut adalah Jerman, Kanada, Inggris, Belanda dan Prancis.<sup>166</sup>

Ketidakpercayaan dari Papua terhadap niat Pemerintah Indonesia membakar semangat perjuangan Papua untuk terus mendapatkan pengakuan dan dukungan dari dunia internasional. Salah satu usaha yang dilakukan adalah mencari dukungan ke sesama rumpun bangsa ke negara-negara Melanesia. Pada Januari 2013, salah satu organisasi politik di Papua, West Papua National Coalition for Liberation (WPNCCL) mendaftarkan diri ke Sekretariat Melanesian Spearhead Group (MSG) di Vanuatu. Untuk pertama kalinya, WPNCCL hadir di dalam forum resmi MSG dan didaftarkan sebagai pengamat. Hal ini mendapat dukungan positif dari negara-negara MSG.<sup>167</sup>

Perjuangan itu semakin kuat ketika beberapa organisasi politik di Papua menyatukan dirinya di dalam sebuah wadah The United Liberation Movement for West Papua (ULMWP). Persatuan ini disebut sebagai Deklarasi Saralana, 6 Desember 2014<sup>168</sup>. Sejak saat itu perjuangan Papua terhadap aspirasi politiknya dan penegakan HAM di tanah Papua semakin kuat. Di tingkat Negara-Negara Pasifik dan PBB isu Papua terus dibahas.

---

<sup>166</sup> Bdk. <http://www.viva.co.id/indepth/fokus/317484-dunia-kembali-sorot-pelanggaran-ham-di-papua>

<sup>167</sup> Markus Haluk, "ULMWP: Sebuah Profil, Persatuan dan Rekonsiliasi Bangsa Melanesia di Papua Barat", 2015. Hal. 37

<sup>168</sup> Ibid., hal. 66

Pada 26 Juni 2015, bertepatan Konferensi Tingkat Tinggi ke-20 di Honiara, Salomon Islands, para pimpinan MSG menerima ULMWP sebagai pengamat.<sup>169</sup> Perhatian dari negara-negara Melanesia semakin kuat terhadap isu Papua. Pada 14 Agustus 2015, Pacific Islands Forum Secretariat's Special Sub-Committee menegaskan bahwa masalah Papua Barat menjadi salah satu dari 5 isu utama yang dibahas dalam pertemuan para pemimpin PIF di Port Moresby pada 7-11 September 2015.<sup>170</sup>

Kelima negara tersebut memberikan beberapa rekomendasi yang diberikan kepada Wakil Menteri Luar Negeri Indonesia AM Fachir. Beberapa rekomendasi yang disampaikan adalah: mendesak Pemerintah Indonesia melaksanakan dialog perwakilan Papua, mendesak Pemerintah Indonesia untuk melanjutkan reformasi sektor keamanan (TNI, Polisi dan Intelijen), mendesak Pemerintah Indonesia untuk melindungi para pembela HAM dan rakyat Papua dari tindak kekerasan serta rekomendasi yang terakhir, mendesak Pemerintah Indonesia untuk melibatkan partisipasi rakyat dalam pembangunan di Papua.

Setahun kemudian, pada sidang Dewan HAM PBB, Senin, 19 September 2016, Pemerintah Salomon dan Nauru mengangkat persoalan HAM Papua.<sup>171</sup> Pemerintahan Salomon yang diwakili oleh Barret Salato menegaskan kepada Pemerintahan Indonesia agar bekerja sama dengan PBB sehingga mengizinkan Pelapor Khusus PBB di Bidang Kebebasan Berekspresi berkunjung ke Tanah Papua. Pemerintahan Salomon menilai perlindungan HAM untuk masyarakat di tanah Papua sangatlah penting sehingga perlu sebuah tindakan kolektif bersama untuk mengutuk segala pelanggaran HAM di Tanah Papua. Pada Kamis, 22 September 2016, Presiden Republik Nauru, Baron Divavesi Baqa di hadapan 193 negara anggota Majelis Umum PBB di New York mengangkat keprihatinannya terhadap situasi HAM di Tanah Papua.<sup>172</sup> Pemerintah Nauru mengharapkan agar segera dilaksanakannya sebuah dialog yang terbuka dan konstruktif dengan negara Indonesia terkait persoalan HAM di Tanah Papua. Kedua negara ini merupakan bagian dari Pacific Islands Forum (PIF).

Selain dibahas dalam sidang PBB, persoalan Papua dibawa dan didiskusikan pada pertemuan ke-14 ACP EU Parliamentary Joint Assembly di Port Vila, Vanuatu pada 20 Juli 2017.<sup>173</sup> Ruang ini beranggotakan 97 negara-negara gabungan Afrika, Carribean dan Pasifik. Dari ke-97 negara, tujuh negara dari Pasifik membawa isu pelanggaran HAM di Papua dalam forum tersebut. Pertemuan ini juga menghadirkan Sekretaris

---

169 Markus Haluk, "Papua Di Ambang Kepunahan: Seri Pendidikan Politik ULMWP II", 2015. Hal. 41

170 Ibid., Hal. 42

171 Bdk. <http://tabloidjubi.com/artikel-277-solomon-dan-nauru-tekan-pemerintah-indonesia-di-dua-badan-pbb.html>

172 Ibid.

173 Bdk. <http://www.satuharapan.com/read-detail/read/7-negara-bawa-isu-papua-ke-parlemen-afrika-pasifik-dan-ue>

ULMWP Oktovianus Mote.

Cerita dukungan lainnya juga berasal dari Gereja di luar negeri. Perwakilan Kelompok Kristen Quaker (Perkumpulan Agama Sahabat) menemui sejumlah anggota parlemen di Selandia Baru. Kelompok ini mengumpulkan dukungan dalam bentuk petisi publik yang mendesak Pemerintah Selandia Baru untuk mengambil sikap dan tindakan terkait situasi HAM di Papua. Petisi yang digalang ini lebih menyoroti pelanggaran hak kebebasan berekspresi dan berkumpul.<sup>174</sup> Petisi dukungan tersebut diserahkan pada Kamis, 23 Maret 2017.

Dukungan Gereja di Selandia Baru juga datang dari Gereja-gereja Protestan yang tergabung dalam Pacific Conferences of Churches (PCC) yang dilaksanakan pada 1 – 3 Agustus 2017, membahas isu pelanggaran HAM di Tanah Papua. Melalui Sekretaris Jendral PCC Francois Pihaatae, menyerukan agar Indonesia menghentikan pembunuhan terhadap orang asli Papua.

“Menyerukan kepada Indonesia untuk menghentikan pembunuhan (orang Papua). Itulah satu-satunya prioritas pertama bagi kami untuk meminta militer dan kepolisian Indonesia atau apa pun yang mereka gunakan untuk membunuh. Mereka (orang Papua) bukan binatang, mereka adalah manusia seperti mereka, orang Indonesia”.<sup>175</sup>

Selain dukungan dan desakan tentang persoalan HAM di Papua dari negara dan Gereja, dukungan dan desakan itupun datang dari NGO atau koalisi internasional untuk Papua yang tergabung dalam International Coalition for Papua (ICP). Koalisi ini terdiri dari beberapa NGO tingkat internasional, nasional, dan Papua. Koalisi yang terdiri dari beberapa NGO seperti Fransiskan Internasional, Tapol Inggris, Vivat International juga melakukan desakan ke negara Indonesia di sidang ke-32 Dewan HAM PBB pada Rabu, 22 Juni 2017 di Genewa, Swiss. Staf Fransiskan Internasional Budi Tjahjono mendesak Pemerintahan Indonesia untuk melakukan penyelidikan secara imparial atas kasus penangkapan sewenang-wenang yang terjadi di Papua.

“Kami ingin menarik perhatian Dewan terhadap situasi hak asasi manusia di Papua Barat. Sebagai salah satu daerah yang paling terpencil di dunia, Papua tetap menjadi salah satu daerah konflik terakhir di Indonesia. Aktivistik lokal terus melaporkan kasus penangkapan sewenang-wenang oleh aparat keamanan Indonesia terhadap orang asli Papua yang berpartisipasi dalam pertemuan damai untuk mengekspresikan pendapat politik mereka.”<sup>176</sup>

174 Bdk. <http://www.satuharapan.com/read-detail/read/kelompok-kristen-quaker-ajukan-petisi-pelanggaran-ham-papua>

175 Bdk. <http://www.satuharapan.com/read-detail/read/gereja-gereja-pasifik-bawa-papua-ke-komite-dekolonisasi-pbb> dan <http://tabloidjubi.com/artikel-8830-gereja-pasifik-nyatakan-dukungan-penentuan-nasib-sendiri-bangsa-west-papua.html>

176 Pernyataan Perwakilan Fransiskan Internasional pada sidang ke-32 Dewan HAM PBB, Rabu (22 Juni 2017)

Ketika hendak memasuki penghujung tahun 2017, negara Indonesia semakin sibuk menghadapi petisi referendum yang 'diberitakan' bahwa telah diserahkan oleh perwakilan ULMWP Benny Wenda ke Komite Dekolonialisasi PBB pada September 2017. Pemerintah Indonesia melarang petisi tersebut dan mengancam akan menangkap dan memenjarakan mereka yang menandatangani. Dokumen atau petisi tersebut dikabarkan ditandatangani sekitar 1,8 juta penduduk di Tanah Papua. Sedangkan menurut Jubir ULMWP Benny Wenda, sebanyak 57 orang ditangkap dan 54 orang disiksa oleh TNI selama kampanye petisi itu berlangsung<sup>177</sup>. Sementara itu tersiar kabar di media bahwa Kepala Komite Dekolonisasi PBB Rafael Ramirez menolak laporan petisi tersebut<sup>178</sup>. Terlepas dari benar atau tidaknya berita dan tanggapan berbagai kalangan, negara Indonesia terus 'direpotkan' dengan persoalan Papua yang terus diangkat dan dibahas di dunia internasional.

---

Budi Tjajono. Bdk. <https://indonesia.ucanews.com/2016/06/24/lsm-internasional-desak-pbb-selesaikan-pelanggaran-ham-papua/>  
177 Bdk. <http://kabar24.bisnis.com/read/20170929/19/694243/referendum-tuntut-papua-barat-merdeka-dipresentasikan-di-pbb>  
178 Bdk. <https://internasional.kompas.com/read/2017/09/29/15405451/pbb-bantah-terima-petisi-referendum-papua-barat>

## **Bab 14**

# **Dialog dan Upaya Mencari Solusi**

---

GAGASAN TENTANG dialog itu sendiri sebenarnya sudah ada dan hadir di setiap tradisi kehidupan manusia, khususnya di dalam tradisi atau adat istiadat orang Papua. Segala permasalahan yang dihadapi selalu dibicarakan di rumah adat (para-para adat). Dan setiap suku di Tanah Papua memiliki sebutan, tradisi dan cara untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapinya.

Gagasan dialog tersebut dibumikan lagi oleh Pater Neles Keadabi Tebay, Pr pada tahun 2000-an. Beberapa alasan mendasar yang dijadikan oleh Pater Neles dalam membumikan dialog sebagai jalan untuk mencari persoalan di Papua adalah [1] kekerasan tidak berhasil menyelesaikan konflik Papua, [2] Implementasi UU Otsus yang gagal, [3] Pemerintah Indonesia tidak konsisten menerapkan UU Otsus Papua, [4] Orang Papua semakin tidak mempercayai pemerintah dan [5] Dukungan internasional terhadap Pemerintah Indonesia semakin menurun.<sup>179</sup>

Tawaran dialog yang disertai dengan kerangka acuan dialog, prinsip, tujuan, tahapan, peserta, fasilitator dialog sepertinya membawa angin segar untuk mencari solusi menghentikan segala kekerasan demi perdamaian di Tanah Papua. Namun sejak dikumandangkannya dialog dari tahun 2009 dan dideklarasikan pada 5-7 Juli 2011 dalam Konferensi Perdamaian Papua, tawaran untuk berdialog sampai saat ini masih menuai pro dan kontra. Di satu sisi Pemerintah Indonesia masih beranggapan bahwa dialog adalah media untuk melepaskan diri dari NKRI, di sisi lain masyarakat Papua masih ragu dengan tawaran dialog tersebut.

Diskusi tentang Dialog Papua Jakarta kembali menguat pada Agustus 2017. Pada 15 Agustus 2017, Presiden RI Joko Widodo mengundang 14 orang – yang disebut sebagai perwakilan rakyat Papua – untuk bertemu dan membicarakan permasalahan di Tanah Papua. Pada kesempatan itu, selain diskusi dan desakan untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM yang baru terjadi seperti penembakan di Kampung Oneibo, Kabupaten Deiyai. Presiden RI Joko Widodo juga membicarakan agenda dialog dengan Papua. Berawal dari penyampaian berbagai persoalan dan apa yang telah dilakukan oleh Negara di Tanah Papua, maka perwakilan pada saat itu juga menyarankan kepada

---

<sup>179</sup> Neles Tebay, "Dialog Jakarta-Papua: Sebuah Perspektif Papua", SKP Jayapura: 2009, hal. 1-11



Presiden Joko Widodo melaksanakan dialog sektoral.

“Kami menyarankan untuk diadakan dialog sektoral di semua bidang, semisal SDM, Kesehatan, Pendidikan dan sektor lain, ini harus duduk bersama dan mencari solusi, baik pusat, provinsi, kabupaten maupun tokoh adat, agama semua terlibat sehingga semua merasa memiliki tanggungjawab.”<sup>180</sup>

Setelah persetujuan dan penunjukan Presiden Joko Widodo terhadap Pater Neles Tebay untuk mengadakan dialog sektoral, banyak pihak mulai memberikan komentarnya terhadap rencana tersebut. Jelas bahwa ada yang menolak dan ada juga yang menerima gagasan dialog sektoral tersebut.

Dosen Antropologi Ucen Jayapura Ibrahim Peyon menjelaskan dalam sebuah opininya “Dialog Jakarta-Papua Agenda Menghancurkan ULMWP dan Dukungan Internasional”<sup>181</sup>, bahwa gagasan dialog yang sedang didorong oleh Pater Neles (JDP), sepertinya mengarah ke Pepera jilid kedua. Menurut Ibrahim, apa yang dibicarakan di dalam Dialog tersebut tidak satupun membahas pelurusan sejarah politik Papua. Ketua KNPB Viktor Yeimo di dalam ulasannya “Cara Menyikapi Dialog Sektoral.”<sup>182</sup> menjelaskan bahwa dialog sektoral adalah bahan politik pecitraan dari Jakarta. Menurut Viktor, media yang cocok untuk menyelesaikan konflik dan menciptakan perdamaian di Tanah Papua adalah Referendum. Sedangkan Ketua Sinode Gereja KINGMI di Tanah Papua Pdt. Benny Giay menjelaskan dialog antara Jakarta dengan Papua dianggap tidak akan efektif tanpa mengikutsertakan ULMWP.<sup>183</sup> Selain itu dialog itu juga tidak akan berhasil tanpa mengagendakan penyelesaian pelanggaran HAM dan menghentikan kekerasan di Tanah Papua.

Koordinator Jaringan Damai Papua Pater Neles Tebay, Pr dalam siaran persnya pada 7 September 2017, menjelaskan bahwa presiden perlu menunjuk tim dialog tersebut seperti, siapa yang ikut di dalam dialog tersebut dan siapa yang nantinya memuat dan mengirimkan undangan kepada peserta dialog sektoral.<sup>184</sup> Dialog sektoral merupakan suatu forum atau pertemuan yang dihadiri oleh pihak-pihak terkait dan berkompeten untuk membahas suatu sektor atau bidang tertentu, misalnya dialog sektor untuk pendidikan, kesehatan, kehutanan, perkebunan, pertambangan, perikanan dan lain sebagainya.

180 Pernyataan Pater Dr. Neles Tebay, Pr, di dalam siaran persnya di Kompleks Kampus STFT Fajar Timur, 22 Agustus 2017, Bdk. <https://www.beritalima.com/2017/08/22/pater-nesles-dialog-sektoral-perlu-dilakukan-untuk-masalah-papua/>

181 Bdk. <http://suarapapua.com/2017/08/30/dialog-jakarta-papua-agenda-menghancurkan-ulmwp-dan-dukungan-internasional/>

182 Bdk. <https://papuapost.wordpress.com/tag/dialog-sektoral/>

183 Bdk. <http://jdp-dialog.org/berita/headline/1075-benny-giayulmwp-representasi-papua-berdialog-dengan-jokowi>

184 Op.cit. <https://www.beritalima.com/2017/08/22/pater-nesles-dialog-sektoral-perlu-dilakukan-untuk-masalah-papua/>



**FREEDOM**  
&  
**DITENTUKAN**  
**DI RUMAH RUMAH**  
**SOLUSI DEPAN**  
**DAN MASA DEPAN**



### Bagian III

# Rekomendasi dan Resolusi

# Bab 15

## Penutup

---

### A. Kesimpulan

Situasi Hak Asasi Manusia di Tanah Papua sepanjang tahun 2015-2017 dapat kami gambarkan melalui beragam peristiwa, kebijakan dan dinamika sosial yang berkembang dalam masyarakat. Dari kisah-kisah yang diuraikan di atas, aspek sipil politik masih menjadi aspek yang kuat sepanjang dua hingga tiga tahun terakhir. Baik itu terkait secara langsung dengan aparat keamanan, pemilihan kepala daerah, kebijakan-kebijakan ambigu maupun aspirasi Papua Merdeka. Sementara aspek ekonomi, sosial dan budaya, secara khusus bidang kesehatan juga menjadi topik hangat pada tahun 2016 hingga akhir tahun 2017. Persoalan lainnya yang juga menonjol adalah perusakan lingkungan hidup dan kemacetan roda pemerintahan daerah.

Beberapa catatan berikut ini merupakan catatan refleksi dan rekomendasi yang ditawarkan oleh SKP Se-Papua sebagai sebuah solusi untuk persoalan-persoalan tersebut.

### A. Pendekatan Keamanan

Bila ditinjau dari peristiwa yang berkaitan secara langsung dengan “alat negara”, ada beberapa peristiwa penembakan dan penganiayaan masyarakat sipil. Tercatat beberapa kasus pada tahun 2015. Dua kasus terjadi di Kabupaten Mimika yaitu kasus penembakan Koperapoka dan kasus penembakan Gorong-gorong Mimika, penembakan di Kampung Wanapompi, Kabupaten Kepulauan Yapen pada 1 Desember 2015, Kabupaten Dogiyai pada 26 Juni 2015. Kasus penganiayaan di Kampung Arafat (Kampung Baru Biak) pada 5 Juni 2015 oleh TNI AU. Lalu pada saat bersamaan, 5 Juni 2015, di kota Merauke aparat keamanan melakukan intimidasi penembakan kepada seorang warga bersama masyarakat lain yang sedang melakukan protes di areal PT Bio Inti Agrindo.

Pada tahun 2016, kembali terjadi beberapa kasus penembakan. Masing-masing adalah kasus penembakan di Kabupaten Intan Jaya pada 7 Maret 2016, Kabupaten

Boven Digoel pada 1 Desember 2016, Kabupaten Merauke pada 14 September 2016, dan di Kabupaten Kepulauan Yapen pada 1 Desember 2016.

Sementara itu tahun 2017 tercatat juga beberapa penyiksaan dan penembakan. Penembakan terhadap David Tarkouw pada 11 Januari 2017 di Kampung Beraf, Kabupaten Jayapura oleh Satuan Polres Jayapura, penembakan warga sipil di Kabupaten Deiyai pada 1 Agustus 2017 dan kasus penembakan Paumako di Kabupaten Mimika pada 9 Agustus 2017.

Sebenarnya kasus yang terkait dengan kekerasan bersenjata sepanjang dua tahun terakhir, cukuplah banyak seperti penangkapan, pemukulan, penyiksaan, penganiayaan, teror, termasuk kejadian “baku-tembak” antara TNI/Polri dengan kelompok lain atau kelompok bersenjata tidak resmi. Menurut Laporan Setara Institute, sepanjang tahun 2016 tercatat 68 peristiwa dan 107 bentuk tindakan Negara melalui aparat keamanan TNI/Polri. Sedangkan para korban sepanjang tahun 2016, tercatat sebanyak 2.214 orang termasuk 489 korban dari pihak aktivis. Ini merupakan angka yang sangat tinggi dan tentu bertolak belakang dengan apa yang diharapkan oleh Presiden Republik Indonesia yang sedang berkuasa, Jokowi. Bahwa pendekatan keamanan di Papua harus diubah. Tidak lagi menggunakan pendekatan militeristik-represif melainkan pendekatan kesejahteraan.<sup>186</sup>

## B. Rekomendasi

Kepada instansi-instansi penentu kebijakan, ingin kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

- Para pemangku kebijakan (Pemda) mengetahui persoalan keamanan di Papua. Akan tetapi terkesan tidak mau tahu dengan persoalan tersebut. Malah seringkali mengambil sikap diam atau dengan sengaja membiarkan persoalan tertentu berlarut-larut, tidak terselesaikan. Walaupun keamanan adalah tugas instansi keamanan, tidak berarti bahwa pemerintahan sipil seperti Gubernur, Bupati/Walikota dan DPRD, MRP tidak boleh turun tangan. Warga masyarakat di daerah adalah tanggungjawab pemerintah setempat. Dan instansi lain adalah turut serta membantu, menjamin keberlangsungan hidup di daerah pemerintahan sipil. Maka sudah selayaknya pemerintah bertindak dengan tegas atas nama warga masyarakat di daerah.<sup>187</sup>

<sup>186</sup><https://nasional.kompas.com/read/2017/02/20/17353741/setara.institute.pada.2016.terjadi.107.pelanggaran.ham.di.papua.oleh.aparat>. Diakses 18 Maret 2018.

<sup>187</sup> Bdk. Pasal 22, UU No.32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Dalam pasal tersebut tertera secara jelas tugas dan tanggung jawab dari Pemerintahan Daerah terhadap warganya.

- Instansi-instansi sipil (Gubernur, Bupati/Walikota, DPRD dan MRP), demi perlindungan warga sipil, perlulah dengan berani menggunakan kewenangannya karena sudah diatur di dalam perundang-undangan yang berlaku.<sup>188</sup> Misalnya karena perkembangan situasi, perlu menambah perangkat atau peraturan khusus untuk suatu daerah. Seperti isi peraturan tentang penarikan keamanan keluar dari wilayah tertentu karena melakukan beberapa kejahatan berulang kali. Upaya institusi keamanan untuk terus membenahi diri, mesti mendapat dukungan dari berbagai pihak. Karena itu institusi harus secara terbuka membuka diri, memperoleh masukan-masukan, termasuk kritikan dari berbagai pihak.
- Sampai sekarang institusi keamanan masih melekat dengan kesan kebal terhadap hukum. Artinya sulit sekali untuk memproses seorang aparat keamanan apabila terduga ataupun terlibat dalam sebuah kasus. Maka demi reformasi dan perbaikan institusi, tidak perlu dihalang-halangi, malah harus mendukung agar proses hukum dapat berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- Institusi keamanan perlu membantu aparaturnya untuk memperoleh cara pandang yang benar terhadap orang Papua. Tidaklah perlu memberikan label khusus dan kemudian menggeneralisir orang asli Papua sebagai penjahat yang menentang negara. Sadar atau tidak, label-label khusus seperti ini turut menentukan perlakuan aparat keamanan di lapangan. Karena jika ada orang asli Papua yang dengan kritis menyampaikan sesuatu yang terkesan berbeda, hampir pasti langsung dicap sebagai penentang atau penjahat. Dengan cara pandang terhadap orang Papua yang cenderung negatif, bisa dipastikan bahwa kejahatan keamanan di Papua akan menjadi lebih tinggi. Karenanya perlu mengubah bukan saja pendekatan seperti yang disampaikan oleh Presiden Jokowi, tetapi juga perlu mengubah cara pandang terhadap orang Papua.

## 1. Gerakan Politik Papua

Tidak bisa disangkal bahwa gerakan politik Papua Merdeka cukup kuat dalam kurun waktu 3 tahun belakangan ini (2015-2017). Baik itu gerakan di lokal Papua dan Papua Barat, di kota-kota studi maupun di tingkat internasional. Menarik bahwa gerakan Papua Merdeka, telah menjadi berita yang cukup terbuka bagi masyarakat secara luas. Bahwa selain dimuat pada surat kabar lokal Papua dan Papua Barat tetapi juga menjadi topik diskusi di media sosial secara luas. Gerakan Papua semakin kuat dan kokoh ketika bersatu dalam wadah ULMWP.

Perkembangan gerakan Papua Merdeka tidak bisa dipandang sebelah mata lagi. Masalah Papua telah bergema di dunia internasional dan masuk dalam ruang resmi

---

<sup>188</sup> Idem., UU No.32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

rapat PBB. Tentu saja era baru ini membuat Pemerintah Indonesia terkesan panik dan mulai berpikir untuk mengambil langkah. Kepanikan ini benar-benar menjadi nyata pada tahun 2016 setelah beberapa kepala negara di Pasifik mengedepankan persoalan Papua di sidang PBB. Karenanya pemerintah Indonesia dalam pertemuan bilateral dengan Australia di Bali pada Oktober 2016, Menteri Pertahanan Rymizard Ryacudu berbicara keras, memberikan pesan bernada peringatan kepada Australia dan negara-negara Pasifik lain agar tidak mencampuri urusan dalam negeri negara lain (*CNN Indonesia*, 27 Oktober 2016). Upaya yang sama juga dilakukan oleh Duta Besar Indonesia untuk New Zealand, Tantowi Yahya. Tantowi meminta perhatian dari dalam negeri dan secara khusus perhatian dari pejabat atau petinggi-petinggi Indonesia agar segera melakukan lobby-lobby di Pasifik guna menekan laju dukungan Gerakan Papua Merdeka yang cukup mengganggu saat ini.

Menguatnya gerakan politik Papua dikarenakan kebijakan negara yang dipraktekan oleh aparat keamanan di lapangan. Oleh karena itu, kami mengusulkan agar:

- Hentikan kebijakan penyelesaian persoalan Papua yang bernuansa "Politik Menguasai". Bahwa jika benar-benar ingin membantu perkembangan dan kemajuan orang asli Papua, maka ciptakan ruang yang cukup agar orang Papua memiliki jaminan untuk terus tumbuh dan berkembang. Artinya hindari kemungkinan untuk menyingkirkan atau menguasai kepemilikan atau merampas hak hidup orang asli Papua. Contohnya adalah Mega Proyek MIFEE. Banyak lahan masyarakat asli dicaplok dan dikuasai oleh investor atas nama kebijakan pembangunan. Karenanya banyak orang Papua melihat negara dengan mata sebelah, tidak membantu tetapi justru meniadakan hak hidup mereka.
- Kebijakan lainnya adalah kebijakan keamanan Negara. Dengan pendekatan militeristik-represif justru akan menambah beban tanggungan negara baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Sampai sekarang Negara dituntut untuk menyelesaikan pelanggaran HAM di Papua yang jumlahnya tidak sedikit. Dan inilah yang dalam sidang PBB diprotes oleh dunia internasional secara khusus oleh negara-negara Pasifik. Maka negara harus berani mengubah kebijakan keamanan di Papua. Institusi keamanan harus memberikan sanksi tegas, seberat-beratnya bagi aparat yang membuat kesalahan, entah atas nama pribadi atau atas nama institusi.
- Negara harus berani dan terbuka menyelesaikan persoalan-persoalan HAM di Papua. Kurangi pertimbangan politik jahat, yang cenderung menghilangkan azas keadilan dan kebenaran. Negara harus mengedepankan pertimbangan nilai-nilai kemanusiaan.



## 2. Roda Pemerintahan Daerah Macet

Sejak tahun 1999, banyak wilayah di Papua dimekarkan oleh Pemerintah Pusat menjadi daerah otonom baru. Maksudnya untuk dapat menyelesaikan persoalan-persoalan di daerah secara lebih efektif. Ada sekian banyak tugas atau urusan pemerintah daerah. Dan ada tugas atau urusan pemerintah yang bersifat wajib untuk diselenggarakan yaitu Pelayanan Dasar. Dua pelayanan dasar utama adalah tentang pendidikan dan kesehatan, sebagaimana disebutkan dalam UU No. 32 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, Bab III, pasal 12 No.1.

Jika melihat pada fenomena meninggalnya puluhan balita di Deiyai, kematian beberapa orang secara beruntun di Lani Jaya, Saminage (Yahukimo), Yigi (Nduga), patutlah kita bertanya, mengapa demikian. Jawaban yang cukup jelas adalah bahwa layanan dasar kesehatan macet, sebagaimana yang disampaikan oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua, Aloysius Giyai (*antarapaua.com*, 1/8/2017). Fenomena macetnya layanan dasar kesehatan seperti ini terjadi di hampir semua kabupaten-kabupaten pemekaran baru. Mengapa demikian? Banyaklah kisah di kabupaten-kabupaten baru. Kisah lazim yang terjadi adalah pusat-pusat layanan dasar masyarakat, tidaklah berjalan. Karena persoalan fasilitas, sumber daya manusia, medan yang berat, persoalan insentif yang tidak lancar, dan lain sebagainya. Sebenarnya apa yang sedang terjadi dan dimana pemerintah yang diharapkan? Hampir pasti yang bisa kita katakan adalah bahwa ternyata pemerintah absen, tidak hadir.

Penyelesaian persoalan layanan publik ini memerlukan kerja sama dan niat baik dari semua warga, khususnya dari pemberi layanan (pemerintah). Maka kami mengusulkan:

- Kepada semua pimpinan daerah, agar lebih selektif dalam memilih atau mengangkat seorang pejabat, apalagi menjabat sebagai kepala dinas. Ini sangat penting karena berkaitan dengan kepentingan banyak orang, apalagi dalam bidang pelayanan dasar seperti kesehatan. Contoh kasus kematian bayi di Kabupaten Deiyai mengisyaratkan banyak hal termasuk SDM dan profesionalitas para pejabat dalam mengelola instansinya.
- Apapun yang sedang terjadi, harus segera dicari jalan keluar penyelesaiannya. Untuk itu kepada Kementerian Dalam Negeri, Instansi-instansi yang macet, Instansi Keuangan, agar segera duduk bersama guna mengevaluasi kinerja pemerintah, sebab-musabab kemacetan seperti yang nyata dalam pelayanan dasar pada bidang kesehatan.
- Terkait dengan persoalan-persoalan di tingkat daerah yang berkepanjangan atau ada hal tertentu yang mengakibatkan pemerintahan tidak berjalan dengan baik,

sebaiknya instansi kementerian terkait secara cepat mengambil tindakan. Misalnya persetujuan antara eksekutif dan legislatif di Kabupaten Mimika. Terkesan bahwa ada pihak berwenang dengan sengaja membiarkan persetujuan berlarut-larut. Pemiaraan ini, tentu saja merugikan warga masyarakat selaku penerima manfaat. Persetujuan di Kabupaten Mimika itu berlangsung hampir 3 tahun lebih, dari 5 tahun masa tugas legislatif di Mimika.

- Pemerintah daerah (bupati, walikota, gubernur dan SKPD terkait) menyediakan satu hari khusus untuk menerima dan mendengarkan segala keluhan warganya.

### 3. Hak Hidup Terancam

Setuju bahwa pembangunan di Papua harus digalakkan. Karenanya pemerintah perlu mendapat dukungan dari banyak pihak agar pembangunan tersebut dapat terjadi. Selain upaya-upaya pembangunan infrastruktur yang cukup marak di era Jokowi, pembangunan bidang pertambangan, kehutanan dan pertanian mendapat perhatian luar biasa di Papua dan Papua Barat. Dan untuk kebijakan pembangunan di Tanah Papua yang luar biasa ini, sampai hari ini masih saja mendapat protes penolakan. Baik protes dari masyarakat pemilik hak ulayat maupun dari lembaga masyarakat di berbagai tingkat. Sebut saja masyarakat di Yerisiam Gua Nabire yang berjuang melawan PT Nabire Baru, masyarakat di Kampung Anggai, Distrik Jair (Boven Digoel) melawan kehadiran PT. Manunggal Sukses Mandiri dan Trimega Karya Utama, masyarakat di wilayah adat Bupul dan Muting (Distrik Elikobel dan Ulilin, Merauke) melawan perusahaan PT. Intranusa Jaya Sejati (IJS) yang beroperasi di sana, masyarakat adat di Kampung Nifasi (Nabire) yang melawan perusahaan tambang PT Kristalin Eka Lestari, masyarakat adat di Kampung Puragi (Distrik Metamani, Kabupaten Sorong Selatan, Provinsi Papua Barat) yang melawan perusahaan perkebunan kelapa sawit PT. Permata Putera Mandiri dan masih banyak di wilayah lainnya di Papua.

Protes-protes ini terjadi karena tanah adat yang merupakan aset kehidupan masyarakat setempat, dicaplok dan menjadi rusak. Kemarahan dan protes-protes masyarakat sangatlah wajar. Wajar karena hampir 90 persen kehidupan masyarakat asli Papua, masih bergantung pada hutan dan lingkungan sekitar. Karena di dalam hutan, mereka menemukan bermacam-macam hal yang mereka butuhkan. Bagi masyarakat asli Papua, hutan dan lingkungan merupakan sebuah “super market” tempat orang memperoleh kebutuhan ekonomis. Hutan dan lingkungan bagi masyarakat Papua, juga merupakan sarana spiritual yang menjamin keseimbangan sebagai seorang manusia yang utuh. Karenanya hutan dan lingkungan menjadi sangat bermakna dan bernilai tinggi. Hutan digambarkan juga sebagai seorang mama.

Bahwa apa yang terjadi, oleh sebagian pihak dinilai sebagai sesuatu yang biasa saja. Atau jika berbicara tentang pembangunan, ada pihak yang mengatakan bahwa pembangunan, perkembangan, termasuk protes-protes dari masyarakat sekitar adalah sesuatu yang biasa terjadi. Akan tetapi bila dilihat secara saksama, protes-protes terkait dengan persoalan tanah adat dan hutan merupakan persoalan serius dan mendesak. Dan jika pola pembangunan masih sama saja, apalagi dengan cara kerja investor yang eksploratif dan rakus seperti sekarang, maka hampir pasti masyarakat asli akan punah dari muka bumi Papua. Untuk itu perlu pemerintah dan semua pihak yang berhendak baik, bersama-sama mencari jalan agar pembangunan di Tanah Papua dapat terus berjalan, dan hak hidup masyarakat asli Papua tetap terjaga. Oleh karena itu kami mengusulkan:

- Guna mendorong pembangunan yang sekarang sedang berlangsung, maka pemerintah sebaiknya menggunakan pendekatan kultur. Buatlah penelitian-penelitian yang benar agar sungguh-sungguh memperoleh alternatif-alternatif pola pembangunan di Papua, termasuk kearifan lokal sebagai alternatif pola yang mesti dikembangkan.
- Pemerintah daerah tidak secepatnya mengeluarkan izin usaha bagi setiap perusahaan yang beroperasi di Tanah Papua.
- Masyarakat adat harus bersatu untuk terus secara kritis melakukan perlawanan terhadap setiap perusahaan yang merusak alam Papua.
- Ada sebuah kebijakan yang sungguh-sungguh melindungi hak-hak masyarakat adat. Pemerintah daerah dapat mensahkan beberapa peraturan kampung atau adat dari masyarakat tentang kehidupannya. Usulan kebijakan ini bukan yang dilakukan dari atas melainkan apa yang telah disepakati dan diputuskan oleh masyarakat itu sendiri.

## Lampiran Tabel

### Kasus-Kasus Hak Asasi Manusia di Tanah Papua Periode 2015 – 2017

No	Waktu Kejadian	Tempat Kejadian	Pelaku	Korban	Kronologis kejadian	Bentuk advokasi	Sumber
<b>TAHUN 2015</b>							
1	20/3/15	Yahukimo, Kompleks Sekretariat KNPB Yahukimo	Polres Yahukimo dan Brimob	Elkhus Kobak (17), Putih Bahabol (20), Era Kobak, Warga Obangma Segenil (58) Titus Giban (39), Simson Giban (32), Inter Senegill (16)	<p>Pada Jumat 20 Maret 2015 kepolisian dari Polres Yahukimo bersama Brimob dari Polda Papua kembali melakukan penangkapan dan penembakan terhadap rakyat sipil dan anggota KNPB. Pukul 16.30 WIT 3 aktivis KNPB ditangkap: Elkhus Kobak (17), Putih Bahabol (20), Era Kobak (20), dan 4 warga sipil yang berada di sekitar sekretariat KNPB tertembak:</p> <p>Obangma Segenil (58) meninggal dunia, Titus Giban (39) tertembak di rusuk dan tembus perut, Simson Giban (32), Inter Senegill (16) kena tembakan di tangan kiri dan tangan kanan.</p>		Laporan KNPB
2	20/5/15	Mnukwar, Depan Kampus Unipa	Pihak kepolisian dan Brimob	Anggota KNPB Mnukwar	<p>Rabu, 20 Mei 2015 WPNCL, NRPFB, PNWP bersama rakyat West Papua melakukan aksi turun jalan. Aksi damai dimediasi oleh Komite Nasional Papua Barat (KNPB) dengan agenda mendukung ULMWP sebagai lembaga legislasi rakyat West Papua di MSG dan menuntut wartawan asing masuk di Tanah Papua. Titik aksi di Amban pohon beringin depan Kampus UNIPA tepat pukul 09.00 masa aksi sudah berorasi. Pihak kepolisian dan Brimob lengkap dengan senjata dan dengan sejumlah kendaraan yang dilengkapi dengan alat organik melakukan penghadangan. Masa aksi dibubarkan dengan kekerasan, tembakan gas air mata. Massa tidak melakukan perlawanan.</p> <p>Massa dijemur di bawah terik panas matahari, dipukul, ditendang, sehingga sebagian massa aksi kritis. Massa aksi yang ditahan di Mako Brimob sekitar 75 orang. Dari 75 massa aksi yang ditahan, yang menjalani proses pemeriksaan khusus oleh pihak kepolisian adalah: Alexander Nekenem (Ketua KNPB Mnukwar), Yoram Magai (Sekjen 1 KNPB Mnukwar), Oten Gombo (Anggota KNPB), Nopinus Umaoba (Anggota KNPB).</p>		Laporan KNPB

No	Waktu Kejadian	Tempat Kejadian	Pelaku	Korban	Kronologis kejadian	Bentuk advokasi	Sumber
3	28/5/15	Kota Jayapura, Kompleks Jalan Kampus Uncen Atas	Pihak Polresta Jayapura	Anggota KNPB: Sam Lokon (23), Ori Lintamon (21), Abetnego Tenoye (19), Asa Alua (26), Yosep Degey (22), Jufri Pahabol (23), Aptor Silak (22), Jhon Dow (26), Kelopas Boma (21), Sonny Dogopia (26), Beny Yatipai (22), Epi Siep (23), Nopen Asso (23).	Jayapura, 28 Mei 2015, aparat Polresta Jayapura kembali melakukan penangkapan brutal dan membubarkan massa dengan mengeluarkan tembakan. Akibatnya 13 orang terluka dan puluhan lainnya ditangkap. Sejumlah aktivis KNPB ditangkap dan mengalami kekerasan dan siksaan polisi.		Laporan KNPB
4	5/7/15	Arafat, Kampung Baru Biak	Anggota TNI AU	Amsal Marandof, Ida Marandof	Pada Rabu, 5 Juni 2015 sekitar jam 14:20 WIT, Amsal Marandof pergi ke makam adiknya dengan tujuan untuk membuat rumpuk sekitar halaman kuburan Almarhum adiknya di sebelah kiri jalan arah kampung baru Papan Kuning. Saat itu Amsal bawa sebuah parang untuk membersihkan halaman di sekitar makam tersebut. Ketika Amsal tiba ditempat tujuan ia melihat 2 anggota TNI AU yang kira-kira jaraknya 200 meter dari posisi korban, yang sedang melakukan aktifitas di sekitar lahan yang masih bersengketa antara pihak keluarga korban dan TNI AU. Oleh karena itu korban berjalan mendatangi mereka dan bertanya kepada anggota TNI AU apa yang sedang dilakukan di lahan tersebut.		Laporan KPKC Sinode GKI Papua
					Ketika korban mendekati kelompok anggota TNI AU, salah satu anggota TNI AU tersebut panik dan berjalan mundur dan terjatuh. Hal ini mengakibatkan kemarahan pada anggota TNI AU tersebut maka yang bersangkutan melampiaskan emosinya dengan melakukan tendangan ke muka korban hingga robek dan bagian atas alis sebelah kanan berdarah.		

No	Waktu Kejadian	Tempat Kejadian	Pelaku	Korban	Kronologis kejadian	Bentuk advokasi	Sumber
					<p>Ketika kakak perempuan Amsal atas nama Ida Marandof mendapat informasi tentang kejadian tersebut, dia langsung pergi ke tempat kejadian untuk menghalangi penyiksaan terhadap adiknya. Namun, Ida turut dipukul oleh salah satu Anggota TNI AU di bagian hulu hati, maka terjatuh pingsan dan dilarikan ke rumah sakit pangkalan TNI AU di Jl. Singamangaraja Biak kota.</p> <p>Amsal Marandof ditangkap oleh anggota TNI AU, kemudian dilarikan ke Polres Biak untuk diamankan. Di rumah sakit Ida Marandof mendapatkan perawatan dengan oksigen. Setelah Ida Marandof sadar kembali, salah satu anggota TNI AU menginterogasinya di ruang rumah sakit, tetapi Ida menolak menjawab pertanyaan.</p> <p>Kemudian Anggota TNI AU tersebut memberikan ongkos taksi sebesar seratus ribu rupiah kepada Ida Marandof sambil berkata "Masalah ini cukup sampai di sini yaaaa". Sesudah korban meninggalkan rumah sakit ia masih merasakan sakit di bagian perutnya.</p>		
					<p>Sekitar jam 15:15 WIT warga masyarakat marah dan melakukan pemalangan jalan di lokasi kejadian tepatnya di papan kuning depan makam adik korban dengan menebang pohon dan memecahkan botol di tengah jalan raya yang mengakibatkan macet total oleh kendaraan yang ingin menggunakan jalan tersebut. Sekitar jam 17:00 WIT pemalangan dibuka kembali.</p>		
5	5/7/15	Kota Merauke	Kopassus	Inisial LO	<p>Di Areal PT. BIO INTI AGRINDO Blok 1, seorang warga inisial LO turut dalam protes kepada pihak perusahaan. Saat itu, Kopassus yang bermarga Kalalu menodongkan senjata jenis M-16 tepat di kepalanya. Namun karena tetap mendapat protes darinya, senjata tersebut diarahkan sejangkal di atas kepalanya dan terjadi letusan. Diprediksi bahwa anggota Kopassus tersebut menghabiskan satu isi magasin untuk menakuti warga dan dirinya. Setelah penembakan tersebut, selongsong peluru dikumpulkan kembali oleh oknum tersebut. Hanya satu buah selongsong peluru yang berhasil ditemukan warga sebagai barang bukti.</p>		Laporan SKP KAME

No	Waktu Kejadian	Tempat Kejadian	Pelaku	Korban	Kronologis kejadian	Bentuk advokasi	Sumber
6	25/7/15	Jln. Kampung Ugapuga, Kamuu Timur, Kabupaten Dogiyai	Brimob	Yoteni Agapa, Melianus Mote	<p>Pada 25 Juni 2015, Yoteni Agapa (19 tahun), Melianus Mote dan empat temannya sedang bersiap melakukan pemalangan jalan di dekat Kampung Ugapuga, Kamu Timur, Kabupaten Dogiyai. Alasan mereka hendak mengumpulkan uang atau sumbangan sebagai kompensasi anjing mereka yang telah dibunuh pada hari yang sama dengan kendaraan yang lewat. Sekitar pukul 22.00, beberapa anggota Brimob berpakaian preman mendekati blok jalan. Para anggota Brimob ini menggunakan mobil Avanza Toyota hitam. Salah satu petugas polisi langsung menembaki Yoteni Agapa, memukulnya sebanyak dua kali di dada. Saat teman-temannya mencoba melarikan diri. Petugas melepaskan beberapa tembakan. Tembakan itu mengenai Yoteni Agapa di tangan kanan dan temannya Melianus Mote (21 tahun) di pergelangan tangan kanan. Sementara yang lain berhasil melarikan diri ke hutan. Salah satu teman Yoteni Agapa menyaksikan hal itu. Dia menceritakan bahwa petugas (Brimob) mengepung Yoteni Agapa dan mulai menendang dan memukulnya dengan senapan. Seorang petugas menikam Yoteni Agapa dengan bayonet ke dalam luka peluru, untuk memanipulasi trek penembakan.</p>		
7	27/8/15	Pantai Base G Jayapura	Orang tak dikenal	Anggota KNPB Jayapura	<p>Pada Kamis, 27 Agustus 2015, pukul 23.00 WPB terjadi penculikan terhadap 3 Anggota KNPB yang tinggal di Pantai Base G, Jayapura: 1. Wilhemus Awom (26), 2. Soleman Yom (27) dan Yavet Awom (19). Ketiganya pergi membeli rokok di kios depan rumah yang berjarak 100 meter dari rumah. Dalam perjalanan mereka dihampiri Mobil Avanza silver abu-abu kemudian seseorang dari dalam mobil memanggil Wilhemus Awom lalu mengajaknya bicara. Mereka mengatakan mengenal Wilhemus Awom sedangkan Wilhemus Awom sendiri tidak mengenal orang yang berada dalam mobil lalu mereka menyuruh Wilhemus Awom dan 2 orang temannya naik secara paksa ke dalam mobil. Mereka bertiga dituduh mencuri motor dan harus segera dibawa untuk interogasi ke Polsek Dok 8.</p>		



No	Waktu Kejadian	Tempat Kejadian	Pelaku	Korban	Kronologis kejadian	Bentuk advokasi	Sumber
8	28/8/15	Bekas Gedung Gereja Kop-erapoka, Jln. Bhayangkara, Mimika	<ul style="list-style-type: none"> <li>Serka Makher Rehata,</li> <li>Sertu Ashar Prada Gregorius Bete</li> <li>Pratu Imanuel Imbiri. Keempatnya dari Kesatuan Kodim 1710</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Martinus Imaputa (laki-laki, 17 thn, pelajar)</li> <li>Moses Erempu (Laki-laki, 24 thn)</li> <li>Martinus Afukafi (Laki-laki, 24 thn)</li> <li>Immanuel Herman Mairimau (Laki-laki, 23 thn)</li> <li>Yulianus Okoware (Laki-laki, 23 thn)</li> <li>Thomas Apoka (Laki-laki, 24 thn)</li> </ul>	<p>Mereka tidak dibawa ke Kantor Polsek tetapi ke Abeputra lanjut Koya – Skow – Arso dan berakhir di Sentani Timur. Dalam perjalanan mereka disiksa dengan sangkur dan dipukul dengan popor senjata SSI dan Pistol Revolver yang mereka bawa sampai muka mereka babak belur berlumuran darah. Sampai di Sentani Timur Wilhemus Awom dan Soleman Yom disuruh turun dari mobil lalu diperintahkan lari ke hutan, lalu mereka ditembak tetapi tidak terkena karena mereka berlari sambil menghindari melompat ke alang-alang hingga jatuh ke dusun sagu pinggir danau Sentani tertidur hingga pagi. Keesokan paginya ada masyarakat yang tinggal dipinggir danau Sentani menolong dan menganatarakan ke Sentani dan pulang ke dok 9.</p> <p>Penganiayaan yang dialami para korban: Wilhemus Awom: Pemukulan di muka dan di badan, Penikaman di bahu kanan, telinga dipotong hampir putus, Soleman Yom: Pemukulan di muka dan Badan, penikaman di leher dan Yavet Awom: dipukul dan ditikam di mulut.</p> <p>Dalam acara "tifa duduk" (acara syukur sambil menabuh tifa dan beryanyi) pada 28 Agustus 2015, dini hari, terjadi peristiwa tragis: 6 orang warga sipil ditembak oleh TNI. 2 orang meninggal dunia; Imanuel Herman Mairimau dan Yulianus Okoware, 4 orang terluka. Motif penembakan oleh anggota TNI adalah balas dendam. Karena Dua anggota TNI dari Kodim 1710 atas nama Serka Makher dan Pratu Imanuel Imbiri, dipukul oleh masyarakat yang sedang berpesta di Ji. Bhayangkara, Koperapoka Timika, di depan Gereja St. Fransiskus Asisi. Mereka dipukul karena memasuki batas larangan masuk areal pesta dengan sepeda motor, dan ketika ditegur Pratu Imanuel Imbiri mengeluarkan sangkur dan menantang massa.</p> <p>Pihak Gereja Katolik Timika (SKP Timika) bersurat kepada TNI dan Polda Papua untuk bertanggung jawab. Proses hukum dan keputusan hukum adalah keempat anggota tersebut dipecat, membayar denda dan hukuman kurungan penjara (3 dan 12 tahun)</p>		Laporan SKP Keuskupan Timika.

No	Waktu Kejadian	Tempat Kejadian	Pelaku	Korban	Kronologis kejadian	Bentuk advokasi	Sumber
9	4/9/15	Depan Mall Wamena, Jayawijaya	Enam Orang Aparat Polres Jayawijaya	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rony Kogoya (32),</li> <li>Yefri Kogoya (28)</li> <li>Esmon Murib.</li> </ul>	<p>Aparat Kepolisian Republik Indonesia bertindak brutal terhadap rakyat sipil Papua, di Wamena, Papua. Aparat dari satuan Polres Jayawijaya, pada Jumat, 4 September 2015 pukul 17:00 waktu setempat, melakukan penganiayaan dan penangkapan terhadap tiga orang rakyat sipil; Rony Kogoya (32), Yefri Kogoya (28) dan Esmon Murib.</p> <p>Kejadian bermula, ketika ketiga korban sedang duduk santai di teras depan Wamena Mall. Tanpa sebab dan alasan apapun, mereka tiba-tiba didatangi oleh enam anggota kepolisian resort Jayawijaya bersenjata lengkap yang langsung mengeluarkan rentetan tembakan ke udara, dan kemudian membekuk dan menganiaya ketiga korban.</p> <p>Ketiga korban dipukuli dengan popor senjata. Menurut salah satu korban bahwa mereka bingung dan sempat bertanya alasan penganiayaan yang dilakukan oleh Polisi terhadapnya. Jawaban Polisi adalah mereka adalah bagian dari kelompok pengacau keamanan.</p>		
10	28/9/15			<ul style="list-style-type: none"> <li>Bagau (18 thn)</li> <li>Efrando Sabarofek (17 thn)</li> </ul>			
11	Okt' 2015-Jan' 2016	Wilayah Mbua, Dal, Mbulimu Yalima, Distrik Mbua, Kabupaten Nduga		<p>Kematian 54 orang (Balita: 43 orang, )</p>	<p>Berdasarkan laporan dari Solidaritas Korban Jiwa Wilayah Mbua (SKJWM) sepanjang Oktober 2015 sampai Januari 2016 ditemukan 54 orang meninggal dunia karena mengalami kesakitan. Dari ke-54 orang tersebut, sebanyak 43 Balita meninggal. Selain itu juga ditemukan banyak obat yang sudah kedaluwarsa yang beredar di Puskesmas Mbua. Sementara itu data dari tahun 2015 – 2017, dari hasil investigasi, Tim menemukan sekitar 129 orang yang meninggal dari berbagai usia. Sebanyak 129 orang ini tersebar di Kampung Otalama, Dingglimo, Opmo, Yerusalem, Arugia, Labrik, Uburu dan Berabel.</p>	<p>Tim Dinkes Provinsi telah menerjunkan tim ke wilayah itu, namun sampai saat ini belum menyampaikan virus penyebab Kejadian Luar Biasa di Mbua. Masyarakat di Mbua masih menunggu hasil pemeriksaan virus tersebut.</p>	<p>Laporan Solidaritas Korban Jiwa Wilayah Mbua</p>

No	Waktu Kejadian	Tempat Kejadian	Pelaku	Korban	Kronologis kejadian	Bentuk advokasi	Sumber
12	1/12/15	Desa Wanapompi, Distrik Angkaisera, Kab. Kepulauan Yapen.	Tim Polres Kep. Yapen di bawah pimpinan Kabagops Polres Yapen AKP Yunus Ratu dan Kasat Intelkam AKP Imam Komari. Pelaku menembakan menggunakan Truk Dalmas Polres Kep. Yapen dan 2 unit mobil sejenis Avanza. Pelaku dengan kekuatan 20-an personel dan persenjataan lengkap.	Herman Manitori (Laki-laki, 33 thn), Yonas Manitori (Laki-laki, 38 thn), Darius Anderibi (Laki-laki, 45 thn), Yulianus Robaha (Laki-laki, 50 thn), Agus Manitori (Laki-laki, 23 thn), Yance Manitori (Laki-laki, 26 thn), Paulinus Wororowai (Laki-laki, 26 thn), Antoni Runaweri (Laki-laki, 43 thn), Sakarias Torobi (Laki-laki, 35 thn), Alius Karimati (Laki-laki, 54 thn)	Erik Manitori dan anak buahnya sudah ada di lokasi pengibaran Bendera Bintang Kejora (BBK), sekitar pukul 03.00 WIT. Sekitar pukul 06.00 WIT, BBK dikibarkan di halaman rumah Erik Manitori di Kampung Wanampompi Distrik Angkaisera, Kabupaten Kep. Yapen. Lalu dilanjutkan dengan ibadah/doa bersama.  Setelah berdoa bersama, beberapa masyarakat yang mengikuti ibadah-berdoa, membubarkan diri. Sementara Erik Manitori dan anak buahnya masih ada di lokasi sambil berbincang-bincang. Tidak lama kemudian, kurang-lebih pukul 06.45 WIT, datanglah sebuah Truk Dalmas Polres Kep. Yapen bersama 2 unit mobil sejenis Avanza dipimpin oleh Kabagops Polres Kep. Yapen AKP Yunus Ratu dan Kasat Intelkam AKP Imam Komari.		

No	Waktu Kejadian	Tempat Kejadian	Pelaku	Korban	Kronologis kejadian	Bentuk advokasi	Sumber
				<p>Daud Luther Ayomi (Laki-laki, 53 thn), Pilemon Ayomi (Laki-laki, 49 thn). Korban yang meninggal: Herman Manitori, Yonas Manitori, Darius Anderibi dan Yulianus Robaha.</p>	<p>Tanpa basah-basih, rombongan Polres Kep. Yapen melakukan penembakan ke arah Kampung Wanampompi. Beberapa masyarakat yang masih ada di kampung (para orang tua-lanjut usia), panik, berlari mencari tempat berlindung. Warga yang masih ada di kampung hanya bisa bersembunyi di rumah dan tidak bisa berlari ke tempat lain karena posisi Kampung Wanampompi terletak di lembah di pinggir pantai.</p> <p>Melihat kejadian seperti itu, maka Erik Manitori sebagai yang bertanggungjawab atas kegiatan pengibarisan BBK, berusaha berbicara-berdialog dengan rombongan Polres Kep. Yapen. Karenanya Erik berjalan menuju ke arah rombongan Polres Kep. Yapen. Akan tetapi kemudian dia ditembak lalu terjatuh. Melihat bahwa Erik telah jatuh, Yonas Manitori (kakak kandung Erik Manitori), bergegas lari mendekati Erik, namun Yonas pun ditembak dan meninggal di tempat. Lalu anak buah Erik yang ada di sekitar tiang bendera, berusaha juga untuk menyelamatkan Erik yang sedang terduduk dan tidak bisa bergerak lagi. Akan tetapi mereka juga ditembak. Kepada yang masih hidup, Erik perintahkan agar segera mundur- masuk hutan. Akan tetapi Erik Manitori dan Yulianus yang ditembak pada lutut kiri-kanan, sudah tidak bisa berlari sehingga ditangkap oleh Tim- Rombongan Polres Kep. Yapen.</p> <p>Setelah ditangkap, Erik dan Yulianus kemudian dinaikan ke Truk Dalimas Polres Kep. Yapen menuju ke Mabes Polres Kep. Yapen, yang kemudian kedua tahanan (Erik Manitori dan Yulianus Robaha) dinyatakan telah meninggal dunia. Kedua jenazah lalu diserahkan ke RSUD Kep. Yapen. Sementara korban yang lain, tetap bersembunyi sambil berusaha sendiri mengatasi luka-luka terkena tembakan.</p> <p>Korban penembakan dalam peristiwa ini, berjumlah 12 orang; 4 orang meninggal dunia dan 8 orang luka-luka.</p>		

No	Waktu Kejadian	Tempat Kejadian	Pelaku	Korban	Kronologis kejadian	Bentuk advokasi	Sumber
13	1/12/15	Di Taman Bunga Oyehe, Kabupaten Nabire	Aparat gabungan TNI Polri	Mikhael Zonggenau Zeth Giay, Pius Gobai, Yosep Giay Hendrikus Yeimo, Naftali Gobai, Yanuaris Pekei, Anton Kadepa, Martinus Youw, Marthinus Adii, Peni Kayame, Sely Ogetai, Derika Keiya, Samuel Kotouki, Agus Auwe, Yus Degei, Angkian Douw, Yulibert Pigome, Neles Waine, Mesak Wakey, Bernard Belau, Habel Douw, Lince Waine, Willem Ikomou, Mina Hanebora, Nelius Pigai, Melkias Douw	<p>Pada setiap 1 Desember selalu diadakan ibadah syukuran tanpa pengibaran Bendera Bintang Kejora. Sama pula dengan tahun ini, dengan mengajukan Surat Pemberitahuan Kepolres, namun Kapolres Nabire menolak ibadah 1 Desember 2015 diadakan di Taman Bunga Bangsa Papua Oyehe. Sehingga ibadah tidak dilaksanakan, tetapi banyak masyarakat yang tidak mengetahuinya sehingga mereka hadir di lokasi ibadah.</p> <p>Dan pintu masuk lokasi ibadah ditutup oleh TNI dan POLRI sehingga masyarakat tidak bisa masuk ke lokasi ibadah. Namun Masyarakat yang datang bertambah banyak di luar pagar sehingga TNI dan POLRI membubarkan mereka keluar dari lokasi dengan cara memukul dengan menggunakan senjata. Mereka yang tidak bubar ditangkap, dibawa ke Mapolres Nabire.</p> <p>Tanpa koordinasi dengan Zet Giay, ketua panitia, yang bermaksud datang ke lokasi untuk menjelaskan kepada masyarakat bahwa ibadah tidak dilaksanakan namun, pada 10:30 waktu lokal Polisi, Brimob dan TNI mulai menindak tegas dan menangkap Zet Giay, Mikhael Zonggenau, Mirna Hanebora, serta 29 orang asli Papua di tangkap. Diatas trek Mikhael Zonggenaw di Pukul dengan menggunakan senjata.</p>		Laporan KPKC Sinode GKI Papua
<b>TAHUN 2016</b>							
1	Feb'	Distrik Jair, Kab. Boven Digoe	Perusahaan-perusahaan baru	Masyarakat Distrik Jair, Kab. Boven Digoel	<p>Sekarang ada banyak penduduk baru yang datang ke Distrik Jair untuk bekerja di perusahaan atau sebagai pedagang (wiraswasta). Masyarakat Jair selama ini tidak pernah tahu tentang rencana masuknya perusahaan-perusahaan baru yang akan dan sudah mulai beroperasi di wilayah Distrik Jair. Yang terdengar hanya tentang Karya Utama. Kedua perusahaan ini beroperasi di wilayah Kampung Anggai. Tidak ada informasi jelas tentang kedua perusahaan ini, karena masuk tanpa memberitakan pihak distrik. Kini kedua perusahaan itu sedang melakukan pembersihan lahan untuk penanaman kelapa sawit. Luas areal dan uang ganti rugi belum diketahui.</p>		Laporan SKP KAME

No	Waktu Kejadian	Tempat Kejadian	Pelaku	Korban	Kronologis kejadian	Bentuk advokasi	Sumber
2	5/4/16	Timika	Aparat Kepolisian	Steven Itlay	<p>Sementara PT. Duta Visa Global dan Wahana Agri Karya, kedua perusahaan ini sedang dalam proses negosiasi dengan pemilik dusun di wilayah kali/sungai Kao. Kedua perusahaan ini berencana membuka lahan di Sepanjang Sungai Digul dan Kao ke arah utara dekat kota Tanah Merah. Belum ada informasi pasti tentang pembayaran ganti rugi yang dilakukan perusahaan kepada masyarakat pemilik tanah adat. Marga-marga pemilik tanah adat di wilayah Kali Kao belum sepenuhnya bersepakat untuk menyerahkan tanah di wilayah ini.</p> <p>Salinan dokumen perjanjian pelepasan tanah adat tidak dimiliki oleh pihak marga-marga pemilik tanah adat. Hingga saat ini marga-marga masih mempertanyakan perusahaan yang tidak memberikan dan mensosialisasikan dokumen seperti AMDAL.</p> <p>Pada 5 April 2016, Ketua KNPB wilayah Timika, Steven Itlay mengalami sakit akibat tidak mendapatkan udara segar dan sinar matahari karena dimasukkan ke dalam ruangan isolasi. Steven mengalami nutrisi buruk karena kurang makan di penjara.</p> <p>Setiap hari ia menerima makan dua kali sehari, makan siang dan malam, yaitu nasi dan mie instan. Steven juga tidur di lantai. Sejak dipindahkan dari Mako Brimob, sudah 24 hari ia tidur tanpa alas di lantai. Keluarga mau antar alat tidur tapi dibatasi oleh polisi, begitu juga keluarga tak bisa membesuk dan antar makanan.</p> <p>Pada hal tujuan utama dipindahkan dari Mako Brimob adalah agar sedikit bebas, namun justru tambah dipersulit lagi di Tahanan Polres. Ia sama sekali tidak mendapatkan akses kesehatan selama di penjara Mako Brimob Kotaraja dan Polres Mimika.</p>		Laporan KNPB
3	Mei 2016	Klamono – Kepulauan Sawit	HIP	Sebanyak 6 marga pemilik hak ulayat	<p>Pada Mei 2016 sebanyak 30 marga – karyawan pemilik hak ulayat melakukan pemalangan terhadap perusahaan terkait pembagian hasil yang tidak sesuai dengan kesepakatan. Alasannya perusahaan melakukan PHK karena karyawan melakukan pemalangan. Lalu manager perusahaan dipukul oleh karyawan karena tidak membayarkan pesangon. Pelaku pemukulan ditahan di Polres Aimas.</p>		Laporan SKP Manokwari Sorong

No	Waktu Kejadian	Tempat Kejadian	Pelaku	Korban	Kronologis kejadian	Bentuk advokasi	Sumber
4	2/5/16	Abepura, Kota Jayapura	Aparat Kepolisian Jayapura	Zeth Gobai	Pada 2 Mei 2016, Zeth Gobai, anggota KNPB Numbay (Jayapura), melakukan demonstrasi damai untuk memperingati hari aneksasi Papua Barat ke dalam Indonesia. Massa yang berkumpul di lingkungan Abepura dihadang oleh aparat gabungan. Mereka ditangkap dan disiksa aparat kepolisian, dan dibawa ke Lapangan Mako Brimob Polda Papua. Empat aktivis dimasukkan ke mobil barakuda. Sepanjang perjalanan para aktivis itu disiksa, dipukul dengan rotan (karet mati), ditendang dengan sepatu lasar, dipukul dengan senjata laras panjang, hingga kepala salah satu aktivis itu terluka dan banyak keluar darah, hingga sebelah kiri mata aktivis itu pandangnya kabur sampai saat ini. Sekitar pukul 19.27 para aktivis itu dilepaskan dari Mako Brimob Polda Papua		Laporan KNPB
5	16/7/16	Kampung Muting, Kab. Merauke	Aparat Koramil TNI AD dan PT. Agriprima Cipta Persada (ACP)	Agustinus Dayo Mahuze	Pada 16 Juli 2016 aparat Koramil TNI AD di Muting mencari dan mendatangi rumah Agustinus Dayo Mahuze, Ketua Marga Mahuze Besar di Kampung Muting, Kabupaten Merauke. Kedatangan mereka untuk mengundang Agustinus Dayo Mahuze bertemu dengan pimpinan perusahaan kelapa sawit PT. Agriprima Cipta Persada (ACP) di lokasi perkebunan dan menyerahkan Surat Ketua Primer Koperasi Kartika Setya Jaya, Kodim 1707/Merauke, Nomor. 8/16/VII/2016, tanggal 11 Juli 2016, tentang Pemberitahuan Izin Pelaksanaan Pekerjaan Borongan Pembukaan Lahan Sawit GRTT PT. ACP. Kepentingan bisnis perusahaan PT. ACP dengan melibatkan aparat TNI maupun Polri dalam kegiatan perolehan hak atas lahan dan pembukaan lahan di Muting sudah seringkali terjadi dan diikuti dengan intimidasi dan ancaman kekerasan sehingga menimbulkan keresahan dan ketegangan antara masyarakat dengan perusahaan, pemerintah, aparat TNI dan Polri.		Laporan SKP KAME



No	Waktu Kejadian	Tempat Kejadian	Pelaku	Korban	Kronologis kejadian	Bentuk advokasi	Sumber
6	14/9/16	Kampung Wanam Wogikel, Distrik Ilwayab, Kab. Merauke	Oknum Polisi Air dan Udara (Polairud/Polair)	Melky Balagaize (19 thn)	Rabu malam (14/9) Melky Balagaize dan teman-temannya jalan melewati perumahan warga masyarakat Wogikel. Mereka hendak pulang ke rumah dari klub karaoke. Melky sempat memotong kabel listrik, tetapi tidak putus. Lalu seorang anggota Polairud/Polair bernama Briptu Diram, yang saat itu dalam keadaan mabuk, melihat perbuatannya dan mengikuti rombongan pemuda itu. Dia menegur Melky yang jalan dengan membawa parang. Melky menjawab bahwa parang itu bukan miliknya, tetapi milik seorang teman yang hendak dia kembalikan. Tanpa menghiraukannya, Diram masuk melewati pintu belakang pos langsung mengarahkan senjata jenis AK laras panjang ke arah Melky yang masuk dari pintu depan. Dia langsung menembak Melky 1 kali dan kena bagian pantat sebelah kiri. Melky berlari. Namun Yayan, teman Dirham kemudian datang dan ikut mengejar Melky serta melakukan pemukulan ke bagian muka dekat kening mata kanan dengan popor senjata AK laras panjang. Saat dipukul korban sempat melawan, kemudian lari menyelamatkan diri. Saat itulah korban jatuh lalu tak sadarkan diri. Melky lalu dilarikan ke Puskesmas Wogikel-Wanam Distrik Ilwayab. Sempat dirawat selama satu malam di Puskesmas itu oleh Dokter Cimi Rosadi. Pada tanggal 15/9 dokter merujuknya ke RSUD Merauke karena peralatan puskesmas tidak memadai. Korban lalu diantar ke RSUD Merauke dengan kapal perintis Valentine dan tiba pada tanggal 16/9 pukul 15.00 WIT. Sebelumnya (16/9) Kapolres Merauke, Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Taufiq Irfan Awaludding mengatakan kepada Jubi bahwa korban sedang di bawah pengaruh Miras dan membuat keributan dengan membawa senjata tajam berupa parang sambil mengejar warga setempat.		
7	21/9/16	Distrik Elikobel, Kab. Merauke	Perusahaan Kelapa Sawit	Masyarakat kampung	Pembongkaran lahan untuk kegiatan investasi kelapa sawit di Distrik Elikobel, Kabupaten Merauke beberapa tahun terakhir, telah menimbulkan dampak besar bagi masyarakat di beberapa kampung di sekitar. Misalnya saja, air tercemar oleh limbah pupuk perusahaan hingga berdampak terhadap matinya ikan. Selain itu, air yang biasanya jernih, kini telah berubah menjadi kecoklatan. Bahkan, tubuh anak-anak mengalami gatal-gatal sesudah mandi. Selain itu banyak ikan mati. Perusahaan itu telah membuat pelanggaran dengan tidak mematuhi kesepakatan bersama masyarakat sebagai pemilik hak ulayat.		Jubi

No	Waktu Kejadian	Tempat Kejadian	Pelaku	Korban	Kronologis kejadian	Bentuk advokasi	Sumber
8	Sept' 16	Kampung Bupul dan Muting, Kab. Merauke	PT. Intranusa Jaya Sejati	Masyarakat adat Bupul dan Muting	<p>Di wilayah adat beberapa marga dari Bupul dan Muting wilayah administrasi distrik Elkobel dan Ulinin saat ini ada perusahaan PT. Intranusa Jaya Sejati (IJS) yang beroperasi di sana.</p> <p>Marga pemilik tanah adat saat ini sedang mengeluhkan tentang CSR (Corporate Social Responsibility) atau Tanggung jawab Sosial Perusahaan – kontribusi perusahaan terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan dengan cara manajemen dampak (mengurangi dampak negatif dan membangun dampak positif) terhadap seluruh pemangku kepentingannya dalam hal ini masyarakat adat.</p> <p>Keluhan masyarakat terkait CSR tersebut adalah sudah 1 tahun lebih, marga-marga pemilik tanah ada belum merasakan kontribusi perusahaan itu. Masyarakat juga mengeluh karena banyak tumpukan kayu dan punggusan sugu di areal kerja perusahaan. Persoalan ini sempat disampaikan ke manajemen PT IJS, tapi tidak pernah ada tanggapan. Di lain pihak, pimpinan PT IJS tidak berada di kampung tapi berada atau tinggal di Jakarta.</p> <p>Setelah pihak manajemen berkomunikasi dengan pimpinan di Jakarta, baru diadakan pertemuan dengan beberapa marga pemilik tanah adat di areal perusahaan. Dalam pertemuan tersebut Pimpinan PT. IJS berjanji akan menjawab semua keluhan itu, tetapi dengan catatan bahwa marga-marga juga harus bantu pihak perusahaan ke Merauke bertemu dengan Bupati.</p> <p>Tujuan pertemuan dengan Bupati Merauke adalah untuk menyampaikan persoalan areal konsesi. Menurut pihak PT. IJS wilayah konsesi sesuai ijin malah berkurang karena di dalamnya terdapat hutan produksi yang menurut aturan tidak boleh digusur. Hutan Produksi Konversi (HPK) dari PT. IJS terdapat Hutan Produksi (HP) sehingga untuk gantinya pihak marga-marga dan perusahaan bertemu bupati agar bupati dapat memberikan ijin bagi areal penggunaan lain (APL) untuk dijadikan hutan produksi konversi (HPK) bagi PT. IJS</p>		
9	19/9/16	Dekai, Yahukimo	Aparat kepolisian Yahukimo	Menus Salla	<p>Polisi Yahukimo kembali menangkap 21 anggota Komite Nasional Papua Barat (KNPB) wilayah Yahukimo saat aksi damai bersama pada Senin (19/9/2016) di Pasar Lama Dekai, JI Sudirman, pukul 08.00 waktu setempat. Sebanyak 28 orang anggota KNPB ditahan dan disiksa di Polres Yahukimo. Sementara tiga diantaranya belum diketahui identitasnya.</p>		Laporan KNPB

No	Waktu Kejadian	Tempat Kejadian	Pelaku	Korban	Kronologis kejadian	Bentuk advokasi	Sumber
10	5/11/16	Kampung Getentiri, Distrik Jair, Kab. Boven Digoel.	Perusahaan baru	Masyarakat pembudi daya karet	Salah satunya adalah Menus Salla. Dia dipukul oleh anggota polisi hingga harus dilarikan ke rumah sakit umum Dekai. Ia mengaku dipukul polisi saat hendak ke kantor Polres Yahukimo untuk bernegosiasi membebaskan 10 anggota KNPB yang sudah ditahan lebih dulu. Kampung Getentiri, Distrik Jair, Kabupaten Boven Digoel adalah sebuah kampung yang kaya akan pohon karet. Dalam sebulan penghasilan penjualan karet bisa Rp 4.000.000 sampai Rp 5.000.000. Tapi usaha sadap karet ini berhenti di tahun 2010. Hal ini karena ada perusahaan yang masuk ke Getentiri. Masyarakat ada yang kerja di perusahaan. Selain itu, ada agen atau pembeli dari perusahaan yang mainkan harga karet. Tahun 2011 sampai sekarang tidak ada pembeli lagi yang masuk ke Getentiri. Akibatnya masyarakat sudah tidak menyadap karet lagi. Masyarakat berharap ada perhatian dari Pemerintah Kabupaten Boven Digoel, supaya ada pasaran karet untuk warga.		Laporan SKP KAME
11	Des'16	Kampung Anggai, Kab. Boven Digoel	Perusahaan Kayu dan Manager IPK	Pemilik Dusun Sabageran	Sabageran adalah dusun marga Afu dan marga Hosagi di Kampung Anggai, Distrik Jair, Kabupaten Boven Digoel. Lokasinya terletak dekat kampung lama Omba. Ada perusahaan baru dari Jakarta datang bertemu Manager IPK (Jin Produksi Kayu) di perusahaan yang ada di Anggai sini dan mengatakan bahwa kedatangannya untuk membangun pabrik kayu. Pihak perusahaan baru dengan beberapa ketua-ketua marga Afu dan Hosagi di luar Kampung Anggai, sedangkan beberapa ketua marga lainnya tidak mengetahui. Bahkan tidak ada sosialisasi dengan pihak masyarakat setempat. Masyarakat takut tertipu lagi oleh perusahaan-perusahaan baru, terlebih akibatnya bagi tanah adat mereka.		Laporan SKP KAME
12	19/12/16	Wamena, Jayawijaya	Aparat Polres Jayawijaya	Givson Kogoya (19)	Pada 19 Desember 2016, Givson Kogoya (19) mendapat pukulan dan siksaan oleh Aparat Kepolisian Resor Jayawijaya saat demo damai mendukung sidang MSG di Port Villa Vanuatu sekaligus penolakan Tiga Komando Rakyat (TRIKORA). Pemukulan ini terjadi di Kantor Kepolisian Resor Jayawijaya.		Laporan KNPB

No	Waktu Kejadian	Tempat Kejadian	Pelaku	Korban	Kronologis kejadian	Bentuk advokasi	Sumber
<b>TAHUN 2017</b>							
1	11/1/17	Kampung Beraf, Nimbokrang, Kab. Jayapura	Polres Jayapura	David Tarkouw	<p>Pada 11 Januari 2017, Bapak David Tarkouw berada di rumahnya di Kampung Beraf, Kabupaten Jayapura. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak David Tarkouw di Kantor LBH Papua, dia menceritakan bahwa anggota kepolisian dari Polres Jayapura ke rumahnya dengan senjata lengkap. Mereka menembaki pintu rumahnya dan menembak dirinya. David tidak melakukan perlawanan. Dia mengangkat tangannya tanda menyerah, namun aparat kepolisian tetap melakukan penembakan. Pihak kepolisian tidak menjelaskan alasan mengapa David ditangkap. Menurut pengakuan David, dia ditembak dengan senjata laras panjang oleh Komandan pasukan tersebut.</p> <p>Tembakan itu sebanyak dua kali di paha kiri dan kanan sebanyak satu kali ketika masih berada di halaman rumahnya. Dalam keadaan yang sudah tertembak, aparat kepolisian meminta David untuk berdiri tetapi David menjawab bahwa "tulang paha sudah patah jadi saya tidak bisa berdiri." Selanjutnya, aparat kepolisian menarik dan menyeret Bapak David dari halaman rumah menuju ke mobil patroli.</p> <p>Tindakan ini dilakukan di depan orang tua, istri dan anak-anak dari Bapak David Tarkouw. Di dalam perjalanan menuju Mapolres Jayapura di Doyo, Kabupaten Jayapura, tepatnya di Kampung Waibron, aparat kepolisian menembak lagi kaki David Tarkouw. Penembakan ini menyebabkan kondisi David lemah. Setibanya di Mapolres Jayapura, aparat kepolisian mengantarnya ke Rumah Sakit Bayangkara di Kota Jayapura.</p> <p>David dituduh oleh Kapolsek Nimbokrang terlibat dalam kasus di tahun 2011. Menurut pengakuan David, dia adalah korban dari isu tersebut. Penangkapan ini tidak ada surat perintah atau tugas dari pihak kepolisian. Padahal sebelum kejadian David selalu pergi ke kota Jayapura dan di tempat umum lainnya.</p> <p>Sampai saat ini David harus menggunakan kedua tongkat untuk berjalan dan masih melakukan pemeriksaan di Rumah Sakit Dian Harapan Waena, Kota Jayapura.</p>	Korban didampingi oleh LBH Papua dan urusan kelanjutan pemeriksaan kesehatan didampingi oleh SKPKC Fransiskan Papua	Laporan LBH Papua, KPKC Sinode GKI Papua dan SKPKC FP

No	Waktu Kejadian	Tempat Kejadian	Pelaku	Korban	Kronologis kejadian	Bentuk advokasi	Sumber
2	11/1/17	Wamena	Anggota Polres Jayawijaya	Edison Hesegem	Seorang pemuda di Wamena bernama Edison Hesegem dilaporkan meninggal dunia karena dianiaya oleh 6 orang anggota polisi dari Polres Jayawijaya. Edison dianiaya dan meninggal dunia di RSUD Wamena pada 11 Januari 2017. Korban dipukul dengan menggunakan popor senjata hingga otak bagian kecil hancur dan bocor karena dipukul bertubi-tubi di tempat yang sama. Korban menghembuskan napas terakhir di UGD Rumah Sakit Umum Wamena.		Laporan KNPB
3	21/2/17	Sungai Mosairo, Distrik Makimi, Kab. Nabire	PT Kristalin dan Kolonel TNI Bosco dan sejumlah oknum TNI	Masyarakat adat Nifasi, Nabire	Pada 20 Februari 2017, PT. Kristalin dengan bantuan Kolonel Bosco dan sejumlah oknum TNI dengan senjata lengkap, diduga telah melakukan penyerobotan di lokasi Kilo 42, Sungai Mosairo, Distrik Makimi Nabire, tempat lokasi proyek yang sedang dikerjakan oleh Ahmad Nurcholis, orang bagian Sub Kontraktor TAP Holding Company. Dengan tindakan itu mengakibatkan semua hasil kerja selama satu bulan dari Sub Kontraktor Ahmad berpindah di bawah kekuasaan KE dan Arif dengan bantuan oknum anggota TNI. Kolonel Bosco ini juga menyampaikan kepada Made karyawan PTTAP bahwa dia juga datang di Nabire atas restu petinggi militer di Jakarta yaitu ASPAM dan WAKAPOLRI	Pada 20 Februari 2017, Dewan Adat Papua. Wilayah Meepago, Melayangkan surat kepada DIRJEN MINERBA, untuk mempertanyakan keberadaan PT.Kristalin Ekalestari dalam data base MINERBA. Pada 21 Februari 2017, Masyarakat adat Nifasi melalui Dewan Adat Papua, melaporkan Arif Setiawan ke POLDA Papua. Namun sampai saat ini Arief Setiawan, (PT. KRISTALIN EKALESTAR) sebagai terlapor belum diperiksa. Pada 22 Februari 2017 dilakukan pertemuan di Kampung Nifasi, dalam pertemuan itu masyarakat adat menyatakan sikap penolakannya, kepada PT. Kristalin Ekalestari, yang berujung terjadi konflik dan perkelahian antar masyarakat.	Laporan dari Jhon Gobay dan Masyarakat Adat Nifasi Nabire

No	Waktu Kejadian	Tempat Kejadian	Pelaku	Korban	Kronologis kejadian	Bentuk advokasi	Sumber
4	29/7/17	Kali Mosairo, Distrik Makimi, Nabire	Orang tak dikenal	Aktivis masyarakat adat Robertino Hanebora, Gunawan Ingeruhi dan Jurnalis Tabloid Jubi Titus Ruban	Kasus ini bermula ketika korban dan Kepala Sub Suku Kampung Nifasi Azer Monei, hendak menegur perusahaan tambang PT Kristalin Eka Lestari (KEL) yang tidak patuh pada surat Kepala Suku Besar Wate terkait pemberhentian operasi tambang di Kali Mosairo. Namun, ketika berdiskusi dengan mandor perusahaan tiba-tiba datang puluhan orang membawa potongan balok kayu, panah, parang, pisau dan batu sambil meneriakkan. Kepala Sub Suku Nifasi dan korban keluar untuk menjelaskan maksud mereka tetapi tidak diperdulikan oleh orang-orang tersebut. Orang-orang tersebut memukul korban mengenai badan, tangan dan rusuk. Titus ditempeleng dan dikejar dengan parang. Korban akhirnya melarikan diri dengan mobil.		Laporan Bersama Walihi Papua, Pustaka, Jerat Papua, KPKC Sinode GKI, SKPKC FP dan SKP KAMe
5	1/8/17	Kampung Oneibo, Distrik Tigi Selatan, Kab. Deiyai	Brimob BKO Papua	1.Yulianus Pigai (27 thn): meninggal 2.Delian Pekei (20 thn) 3.Yohanes Pakage (29 thn) 4.Albertus Mote (11 thn) 5.Esebius Pakage (14 thn) 6.Yunior Pakage (15 thn), Kelas 2 SMP 7.Amos Pakage (27 thn) 8.Marius Dogopia (21 thn) 9.Penias Pakage (14 thn), siswa kelas 2 SMP 10.Titus Pekei (30 thn) 11.Meky Pakage (14 thn), siswa kelas 2 SMP	Pada Selasa, 1 Agustus 2017, Pukul 07.30 WIT, beberapa warga Kampung Oneibo pergi ke kali untuk mandi dan menangkap ikan. Kali itu berdekatan dengan proyek pembangunan jembatan oleh PT Putra Dewa Paniai. Salah satu dari masyarakat Kasianus Douw tenggelam di Kali Oneibo. Melihat itu, teman-temannya berusaha menyelamatkan Kasianus. Setelah berhasil menyelamatkan Kasianus, salah satu dari mereka meminta bantuan ke salah satu karyawan PT Putra Dewa Paniai yang sedang mengerjakan jembatan. Mereka meminta bantuan mobil untuk membawa temannya Kasianus ke Rumah Sakit. Dalam percakapan, karyawan itu menolak untuk memberikan jasa angkutan. Karena ditolak salah satu dari antara teman korban mencari bantuan mobil di Terminal Waghete. Di dalam perjalanan Kasianus meninggal dunia. Kematian Kasianus membangkitkan kemarahan warga Oneibo terhadap PT Putra Dewa Paniai. Mereka merusak camp karyawan perusahaan. Pihak perusahaan meminta bantuan aparat keamanan (Brimob) untuk mengatasi kemarahan warga. Pada kesempatan itu Brimob menembak warga yang menyebabkan Yulianus Pigai meninggal dan ke-11 warga yang lainnya mengalami luka tembak.	Penyelesaian kasus ini adalah anggota yang melakukan penembakan diberi hukuman meminta maaf dan dipindahkan. Selain itu ada kesepakatan PT Putra Dewa Paniai harus angkat kaki dari Deiyai. Pihak Gereja Katolik dalam hal ini Uskup Keuskupan Timika Mgr. Jhon Sakili, Pr telah mengeluarkan pernyataan terhadap peristiwa tersebut.	Laporan SKP Keuskupan Timika, KPKC Kingmi, SKPKC FP dan media Satu Harapan, Jubi.

No	Waktu Kejadian	Tempat Kejadian	Pelaku	Korban	Kronologis kejadian	Bentuk advokasi	Sumber
6	9/8/17	Pelabuhan Paumako, Kab. Mimika		Theo	<p>Pada 9 Agustus 2017, pukul 14.30-15.00 WIT, Perlahan-lahan perahu-perahu nelayan semi modern, kembali ke pelabuhan bersama dengan beberapa nelayan lokal (orang Papua) yang terus mengiring mereka. Tak lama kemudian, Ketua nelayan pendatang menelpon Ketua RT Paomako, dan menyampaikan bahwa nelayan 'pribumi' sedang menyita-menahan perahu-perahu para nelayan pendatang. Karena ingin segera memastikan peralatan para nelayan pendatang yang disita, maka 2 pimpinan nelayan pendatang (Pak Semi dan Pak Budi) beserta rombongannya mencari Pak RT Paomako. Dan setelah bertemu dengan Pak RT di sekitar Pos Polisi Paomako, kemudian Pak RT diajak untuk berbicara di dalam Pos Polisi. Pada waktu itu, rombongan para nelayan pendatang sudah penuh menutupi jalan masuk-portal pintu Pos. Sedangkan rombongan nelayan pribumi ada di luar, di sekitar kios-kios panjang di seberang jalan.</p> <p>Lalu terjadi pertengkaran mulut antara kedua belah pihak, Pak Semi, yang sudah emosi, lalu keluar dari Pos Polisi tanpa pamit, mendatangi seorang nelayan pribumi, merampas botol yang dipegang oleh nelayan itu, dan lalu memukul kepala nelayan itu dengan botol. Maka marahlah warga nelayan lokal, lalu mulai menyerang Pak Semi dan rombongan di halaman Pos Polisi. Dan kemudian terdengarlah suara tembakan. Tembakan itu sekitar 3 kali. Seorang pemuda yang berdiri di dekat tiang bendera bernama Theo, kemudian menyampaikan kepada Pak RT yang ada juga di dekatnya, bahwa dia (Theo), sudah ditembak.</p> <p>Kemudian Theo pun terjatuh dan meninggal dunia di tempat. Melihat kejadian itu, warga masyarakat Paomako menjadi marah, lalu masuk ke dalam Pos Polisi, menggejar, mencari Pak Semi dan rombongan termasuk penembak di sekitar Pos Polisi. Dalam pengejaran itu, mereka merusak fasilitas dalam Pos dan sebuah mobil pick up hitam yang sedang parkir di sekitar dan menganiaya seorang anggota militer yang diduga sebagai penembak. Polisi kemudian mengevakuasi Theo dan Rudi yang juga tertembak ke Rumah Sakit Umum Daerah Mimika.</p>		Laporan SKP Keuskupan Timika



No	Waktu Kejadian	Tempat Kejadian	Pelaku	Korban	Kronologis kejadian	Bentuk advokasi	Sumber
7	Okt' 2017	Dusun Ureko dan Kapiremi, Sorong Selatan	PT Permata Putera Mandiri, Brimob	Masyarakat pemilik hak ulayat: Arnold, Edison Oropae dan Yan Ever Mengge	<p>Sejak September hingga saat ini, ada tujuh marga pemilik tanah adat di Kampung Puragi, Distrik Metamani, Kabupaten Sorong Selatan, Provinsi Papua Barat, yakni Marga (1) Gue, (2) Atoare, (3) Mengge, (4) Bumere, (5) Kawaine, (6) Oropae I, (7) Oropae 2, mereka masih melakukan "pe-malangan secara adat" untuk menghentikan aktivitas dan membatasi lokasi perusahaan perkebunan kelapa sawit PT. Permata Putera Mandiri (PT. PPM) di lokasi bernama Ureko hingga Nyono.</p> <p>Alasan warga melakukan pemalangan karena sejak pembongkaran hutan pertama hingga penanaman, dan kembali perusahaan membuka hutan baru di tanah adat marga ini pada September 2017 hingga saat ini, perusahaan belum menyelesaikan kewajibannya, bermusyawarah dengan masyarakat untuk menyepakati status lahan, kompensasi atas kerugian, kehilangan sumber kehidupan masyarakat, hasil hutan dan dusun pangan. Perusahaan juga tidak secara terbuka membicarakan program pemberdayaan hak-hak sosial ekonomi dan budaya.</p> <p>Pada awal Oktober 2017, aparat melakukan kekerasan dan intimidasi terhadap Arnold di lokasi Logpond Jamarema. Edison Oropae, pemilik tanah di Dusun Ureko, melakukan pemalangan tanah dan dusun adatnya. Aparat Brimob yang bertugas di camp perusahaan melakukan kekerasan verbal, mengintimidasi dan mengancam akan melakukan tindakan kekerasan terhadap Edison.</p> <p>Pada 23 Oktober 2017, Yan Ever Mengge alias Bowake bertemu dengan operator perusahaan yang sedang menggsur tanah dan hutan di Dusun Kapiremi. Bowake menanyakan mengenai realisasi tuntutan masyarakat terkait pembayaran kompensasi tanah dan hasil hutan yang hilang. Perusahaan menjanjikan akan merealisasikan pada 22 Oktober 2017. Kenyataannya, tuntutan Bowake dan marga lainnya tidak mendapatkan tanggapan hingga waktu tersebut.</p>	<p>Keluarga Mengge di Kota Teminabuan kemudian mengetahui permasalahan yang dialami Bowake. Bowake berbicara mengenai kekerasan dan kesakitan yang dialami keluarga besar Mengge di Kota Teminabuan. Keluarga dan tiga kepala kampung dari Puragi, Tawanglire dan Bedare, bermusyawarah dan menuntut penyelesaian kasus kekerasan Bowake, pengobatan dan pemulihan kesehatan Bowake, serta penyelesaian hak-hak adat masyarakat. Pada 5 November 2017, keluarga besar Mengge dari Teminabuan dan Puragi pergi ke camp perusahaan dan meminta permasalahan ini diselesaikan di Kampung Puragi, tetapi pihak perusahaan tidak mau, mereka menginginkan diselesaikan di kantor perusahaan. Lalu terjadi pembicaraan hingga tengah malam. Keluarga dari Bowake menuntut pembayaran denda adat atas penylksaan dan pemukulan yang dilakukan tiga orang aparat keamanan sebesar Rp. 150 juta. Masing-masing pelaku didenda Rp. 50 juta, tetapi perusahaan menawar denda sebesar Rp. 50 juta.</p>	<p><a href="https://awasmifee.potager.org/?p=1577&amp;lang=id">https://awasmifee.potager.org/?p=1577 &amp;lang=id</a></p>

No	Waktu Kejadian	Tempat Kejadian	Pelaku	Korban	Kronologis kejadian	Bentuk advokasi	Sumber
8	5/10/17	Kampung Moso, daerah Perbatasan PNG	Anggota Yonif 432 Kostrad Makasar	Alfred Mandowen	Bowake lalu melakukan pemalangan adat di Dusun Kapiremi dan meminta operator berhenti membongkar dusun milik mereka. Bowake mencabut kunci motor dan kunci kendaraan ekskavator, lalu pergi meninggalkan operator.	Perusahaan membuat berita acara tentang pernyataan pemberian biaya pengobatan dan denda pemukulan sebesar Rp. 50 juta, serta menyatakan bahwa permasalahan selesai. Uang denda akan dikirim kepada keluarga di Teminabuan seminggu kemudian. Namun hingga saat ini uang itu belum dikirim dan Bowake sudah tidak punya obat. Saat ini ia berobat tradisional. Keluarga menolak isi berita acara itu karena ditandatangani secara tergesa-gesa saat malam hari oleh perwakilan keluarga; Max Mengge, Cristina Mengge Tesia (diwakili ibu Dorce Mengge) dan Ashari mewakili perusahaan. Isinya juga merugikan pihak keluarga, misalnya kasus dianggap selesai, dan pihak perusahaan tidak memenuhi pembayaran denda kepada keluarga korban.	Laporan KPKC Sinode GKI Papua

No	Waktu Kejadian	Tempat Kejadian	Pelaku	Korban	Kronologis kejadian	Bentuk advokasi	Sumber
9	20/12/17	Kediaman, Jln. Heatubun, Kwamki, Timika	Orang tak dikenal	Adolfina Kuum (Doli), aktivis front Masyarakat Adat Independen Timika	Pada Rabu, 20 Desember 2017, pukul 24.00 WIT, Adolfina sedang duduk minum teh di para-para samping rumahnya, didatangi tiga orang yang mengendarai sepeda motor. Salah satu dari mereka mengeluarkan pedang samurai hendak menyerang dan membacok Adolfina. Korban sempat menghindar dan berteriak sehingga anggota keluarga sempat mengejar para pelaku. Namun pelakunya berhasil meloloskan diri. Penyerangan ini ada kaitannya aktivitas Adolfina yang melakukan aksi kampanye penolakan PT Freeport dan memperjuangkan hak masyarakat setempat.		Laporan Bersama Walhi Papua, Pusaka, Jerat Papua, KPKC Sinode GKI, SKPKC FP dan SKP dan KAMe